



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Dokumen	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	II-57
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-77
2.4. Isu-isu Strategis	II-79

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018	IV-6

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

.....	V-1
-------	-----

BAB VI PENUTUP	VI-1
-----------------------------	------

DAFTAR ISI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PATI TAHUN 2008

	Halaman
BIDANG PRASARANA DAN TATA RUANG	
1. DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH	1
2. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	48
3. DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	60
4. KANTOR PENGELOLAAN PASAR	74
5. KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN	95
6. DINAS PERTANAHAN	156
7. BAPPEDA KABUPATEN PATI	159
8. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA SETDA KAB. PATI	210
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. PATI	220
10. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. PATI	240
11. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. PATI	252
12. BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. PATI	261
13. BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PATI	266
14. BAGIAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN SETDA KAB. PATI	278
15. BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SETDA KAB. PATI	283
16. BAGIAN HUMAS SETDA KAB. PATI	288

DAFTAR ISI

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PATI TAHUN 2008**

	Halaman
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
1. DINAS PENDIDIKAN KAB. PATI	1
2. DINAS KESEHATAN KAB. PATI	19
3. BRSD "RAA SOEWONDO" PATI	46
4. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PATI	53
5. DINAS KB DAN KS KAB. PATI	60
6. BADAN PENGAWAS	70
7. BDAN KEPEGAWAIAN	77
8. KANTOR LITBANG	103
9. KANTOR KESBANGLINMAS	118
10. KANTOR SATPOL PP	138
11. KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	141
12. KANTOR ARSIP	151
13. SEKRETARIAT DPRD	161

**DAFTAR ISI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PATI TAHUN 2008**

BIDANG EKONOMI :

1.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1
2.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. PATI	31
3.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI	60
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PATI	95
5.	KANTOR KOPERASI KAB. PATI	118
6.	KANTOR PENDAPATAN DAERAH KAB. PATI	124
7.	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KAB. PATI	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2018 ini merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2018-2022 yang masuk dalam tahapan ketiga (2015-2019) pembangunan lima tahunan yaitu tahapan pementapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Namun RPJMD tersebut belum ditetapkan, oleh karena itu maka RKPD tahun 2018 mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJPD 2005-2025. Maka RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 juga disusun dengan semangat dasar pada upaya pencapaian visi Kabupaten Pati "Pati Bumi Mina Tani Sejahtera", dan masih berfokus pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi. Urusan-urusan tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, perumahan dan permukiman, pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan serta pariwisata.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu penyusunan RKPD 2018 juga merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, antara lain: RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2018 terutama dari sisi keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Seperti halnya proses penyusunan RKPD tahun-tahun sebelumnya, RKPD Kabupaten Pati tahun 2018 juga disusun melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sehingga dalam proses penyusunan RKPD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan 5 (lima) tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pati Tahun 2018, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBD, serta menjadi landasan operasional masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan PP Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ditindaklanjuti juga oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Yang apabila dijabarkan dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati), yaitu sebagai berikut:

1) RPJP Nasional

RPJP Nasional tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan nasional “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Sebagai satu kesatuan dengan Republik Indonesia, Kabupaten Pati juga berkontribusi untuk mewujudkan visi pembangunan nasional 2005-2025 melalui RKPD Kabupaten Pati tahun 2018 yang dilandasi semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

2) RPJM Nasional

Pada saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat visi misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 dengan prioritas pembangunan pada 4 dimensi yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri.

3) RKP

RKP Tahun 2018 menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 karena memuat isu strategis dan arah kebijakan pembangunan nasional pada Tahun 2018.

4) RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 memuat visi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun, yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan semangat “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

5) RKPD Provinsi Jawa Tengah

RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 memuat isu-isu strategis dan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah menjadi pertimbangan dalam penentuan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pati yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pati.

6) RPJPD Kabupaten Pati

RKPD Kabupaten Pati tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari pentahapan pertama RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2018-2022, namun RPJMD tersebut belum ditetapkan sehingga arah prioritas pembangunan RKPD tahun 2018 mengacu pada RPJPD 2005-2025. Oleh karena itu, program kegiatan prioritas yang termuat di dalamnya harus mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

7) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati

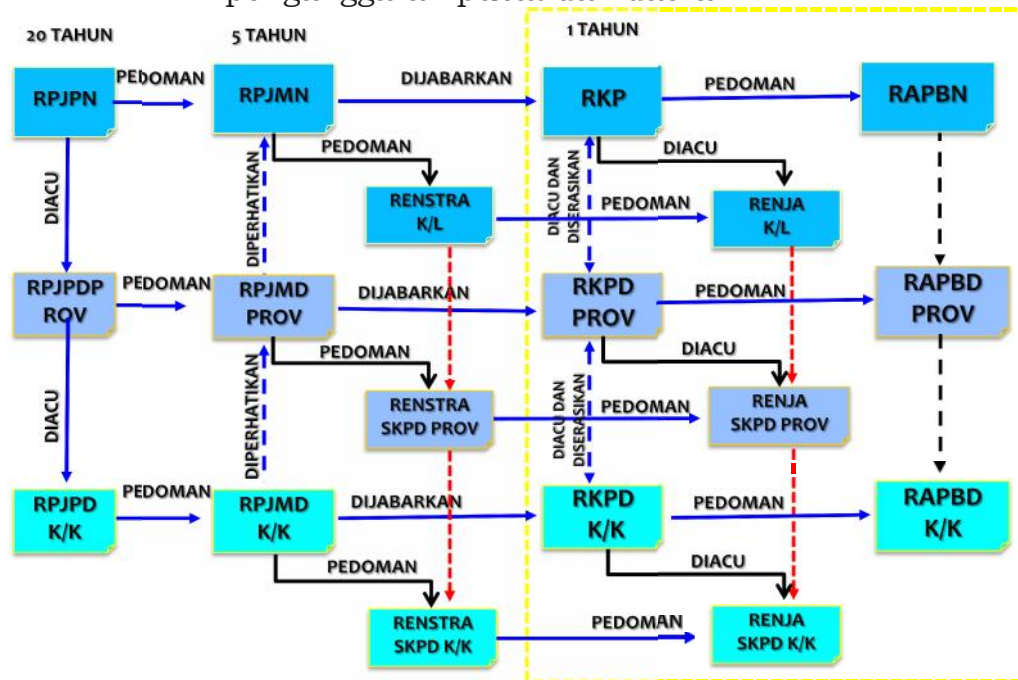
RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, indikasi program, dan ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. Sehingga setiap perencanaan pembangunan dan pembangunan kawasan di Kabupaten Pati harus memperhatikan RTRW Kabupaten Pati.

8) Renja PD

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rancangan Renja PD Tahun 2018 yang akan dibahas dalam forum PD digunakan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018, dan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD tahun 2018.

Hubungan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam kesatuan sistem perencanaan pembangunan dapat digambarkan dalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pusat dan daerah



1.4.Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : **PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan antar Dokumen, Sistematika dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan.
- BAB II : **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah,
- BAB III : **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat penjelasan tentang Arah Kebijakan Ekonomi daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV : **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

BAB V : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI : **PENUTUP**

1.5.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 adalah:

1. Maksud

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 ini adalah menjabarkan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 dan sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional serta Program Indikatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 adalah :

- a. Sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati dalam penyusunan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan penyusunan RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2018.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Pati.
- d. Mewujudkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pati.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 110°,50' - 111°,15' Bujur Timur (BT) dan 6°, 25' - 7°,00' Lintang Selatan (LS) dan mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten pati sangat strategis karena berada diantara kota-kota pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan. Secara administratif Kabupaten Pati terbagi dalam 21 Kecamatan yang terdiri dari 406 Desa/Kelurahan.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara; daratan rendah, membujur di tengah sampai utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2 - 624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus antara 2 - 8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Tlogowungu antara 38 - 624 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Secara keseluruhan iklim di dipengaruhi oleh letak geografisnya. Maka dari itu, Kabupaten Pati beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2011 sebanyak \pm 2.734 mm dengan 132 hari hujan.

Suhu udara terendah di Kabupaten Pati adalah 23°C dan suhu tertinggi 39°C. Kondisi iklim Kabupaten Pati tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, suhu udara terendah berkisar antara 23°C suhu udara tertinggi berkisar antara 34°C sedangkan curah hujan terendah 43 mm/tahun curah hujan tertinggi 4.686 mm/tahun.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pati menurut data BPS pada tahun 2014 terdiri dari 59.299 ha (39,44%) lahan sawah dan 91.069 ha (60,56%) lahan bukan sawah. Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Peruntukan Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Apabila dirinci luasan penggunaan kawasan Budidaya di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249Ha.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan dan pengolahan ikan. Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya tambak mencapai 9.606 Ha, dan pengembangan perikanan budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu bara dan Minyak serta gas bumi.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

a. Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi diKecamatan Margorejo (306Ha) dan Kecamatan Pati (200Ha).

b. Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan (318Ha), Kecamatan Juwana (102Ha).

c. Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu (30Ha), Kecamatan Trangkil (24Ha), Kecamatan Margoyoso (53Ha), Kecamatan Tambakromo (300Ha), Kecamatan Kayen (48Ha), Kecamatan Sukolilo (17Ha).

d. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan dimasing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaaan.

Di samping beberapa potensi wilayah yang bisa dikembangkan, Kabupaten Pati juga merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2013, Kabupaten Pati merupakan daerah yang beresiko tinggi terjadi bencana dengan skor 174 dan menempati peringkat 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah sedangkan secara nasional menempati rangking 153.

Ada beberapa bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Pati. Pada musim penghujan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin topan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pati yang memiliki 93 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% dan wilayah yang rawan longsor yaitu wilayah Kecamatan Cluwak, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi. Sedangkan pada musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Pati juga terjadi bencana kekeringan. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang cukup panjang (± 60 km), bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga bisa terjadi di kabupaten ini. Lebih lanjut menurut Badan Geologi, di sebagian wilayah Kabupaten Pati mempunyai tingkat ancaman rendah sampai dengan tinggi untuk bencana gempa bumi. Di Kabupaten Pati pernah menjadi episenter gempa bumi pada tahun 1890 M.

2.1.1.2. Aspek Demografi

Pada tahun 2016 (hasil proyeksi dengan dasar sensus penduduk 2010) jumlah penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.239.989 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 600.721 jiwa dan perempuan sebanyak 639.268 jiwa dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 93,97. Rata - rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati sebesar 0,57 %.

Sebaran penduduk di Kabupaten Pati tidak merata yang ditunjukkan perbedaan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan. Kecamatan Pati merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 107.028 jiwa dan juga kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 2.519 jiwa/km². Kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gunungwungkal dengan jumlah penduduk sebesar 36.012 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan

kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pucakwangi yaitu sebesar 341 jiwa/km².

Data kependudukan Kabupaten Pati secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Pati Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2016				Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	
1	Sukolilo	44.273	45.816	90.089	96,63	568
2	Kayen	34.817	37.989	72.806	91,65	758
3	Tambakromo	23.841	25.733	49.574	92,65	684
4	Winong	22.023	27.984	50.007	78,70	500
5	Pucakwangi	19.665	22.179	41.844	88,66	341
6	Jaken	20.554	22.185	42.739	92,65	624
7	Batangan	21.072	21.806	42.878	96,63	846
8	Juwana	47.225	48.372	95.597	97,63	1.709
9	Jakenan	18.944	21.857	40.801	86,67	769
10	Pati	51.470	55.558	107.028	92,64	2.519
11	Gabus	24.411	28.168	52.579	86,66	947
12	Margorejo	29.550	31.895	61.445	92,65	994
13	Gembong	22.152	22.236	44.388	99,62	660
14	Tlogowungu	24.801	25.933	50.734	95,63	537
15	Wedarijaksa	29.450	30.793	60.243	95,64	1.475
16	Trangkil	30.088	31.460	61.548	95,64	1.437
17	Margoyoso	36.146	37.023	73.169	97,63	1.220
18	Gunungwungkal	18.062	17.950	36.012	100,62	583
19	Cluwak	21.267	22.238	43.505	95,63	628
20	Tayu	32.293	33.077	65.370	97,63	1.374
21	Dukuhseti	28.617	29.016	57.633	98,62	706
Jumlah 2016		600.721	639.268	1.239.989	93,97	825
Jumlah 2015		597.314	635.398	1.232.712	94,01	820

Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2016

Tabel 2.2
**Perbandingan Penduduk Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2013**

No	Tahun	KAB. PATI			PROV. JAWA TENGAH		
		Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	2012	1.503,68	1.207.399	802	32.548	33.270.207	1.022
2.	2013	1.503,68	1.218.016	810	32.548	33.264.339	1.022
3.	2014	1.503,68	1.225.594	815	32.548	33.522.663	1.030
4.	2015	1.503,68	1.232.712	820	32.548	33.264.339	1.022
5.	2016	1.503,68	1.239.989	825	32.548	33.522.663	1.030

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2016.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB

Meskipun perekonomian global masih dihantui oleh ketidakpastian ekonomi, namun masih ada harapan ditengah-tengah ketidakpastian tersebut. Fenomena Brexit, penurunan harga minyak yang tajam, serta beberapa penurunan dan stagnasi kondisi ekonomi di beberapa belahan dunia memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional.

Faktor eksternal lain yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menaikkan suku bunga acuan Federal Reserves di awal Tahun 2017. Hal ini berdampak tidak hanya pada kinerja pasar modal dan pasar uang domestik namun juga berdampak pada skala regional bahkan global, meskipun ini hanya dalam skala jangka pendek.

Ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, perekonomian Indonesia pelan tapi pasti telah mengalami kebangkitan. Setelah adanya tren penurunan pertumbuhan ekonomi sejak 2013 sebesar 5,58% hingga tahun 2015 menjadi 4,80%, pada tahun 2016 telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekonomi hingga tumbuh menjadi 5,02% atau naik sebesar 22 basis poin (bps) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengingat semakin membaiknya mesin ekonomi global serta adanya banyak peluang masuknya investor asing ke Indonesia, peningkatan daya beli masyarakat, kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan serta performa net ekspor yang menunjukkan tren positif pada awal tahun 2017, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di Tahun 2018 akan mencapai 5,2% - 5,4 % (prediksi Bank Indonesia dan harapan Presiden Jokowi pada Ratas Kabinet Bulan Maret 2017).

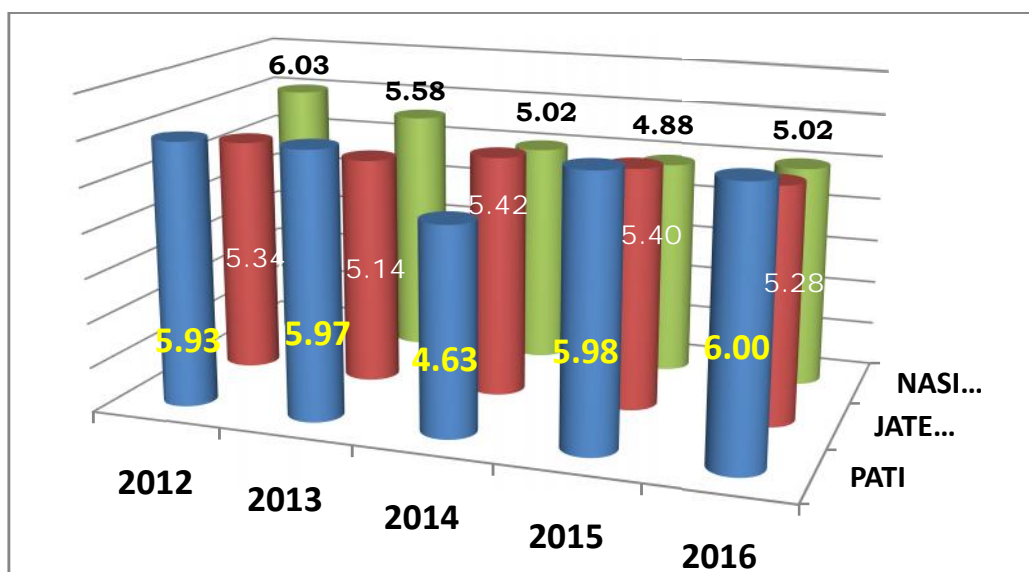
Tren penurunan ekonomi juga terjadi pada level regional Jawa Tengah, dimana sejak tahun 2014 tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula berada pada angka 5,42% atau meningkat sebesar 28 bps dari tahun sebelumnya, terus menurun hingga pada angka 5,40% pada tahun 2015 dan 5,28% pada tahun 2016 yang menandai level terendah capaian pertumbuhan ekonomi pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Optimisme pemerintah menyambut tahun 2018, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan target pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah pada tahun yang sama sebesar 5,9% - 6,2%. Hal ini didasarkan pada tren kondisi ekonomi nasional yang terus mengalami kenaikan serta adanya kecenderungan pergeseran investasi dari wilayah jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah, tersedianya kawasan industri yang sangat representatif dan mudah diakses, meningkatnya kondisi infrastruktur, peningkatan kesempatan kerja, serta tersedianya sumber daya ekonomi yang sangat potensial bagi tumbuh kembangnya perekonomian lokal dan regional.

Kabupaten Pati yang memiliki struktur ekonomi industri khususnya industri berbasis pertanian (agro-industri) mempunyai daya dukung yang cukup kuat guna mendorong roda perekonomian daerah. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2012 hingga 2015, perekonomian daerah Kabupaten Pati cenderung mengalami fluktuasi yaitu pada kisaran 5,9% kecuali pada tahun 2014 yang mengalami kontraksi hingga turun pada angka pertumbuhan 4,6%. Hal ini terjadi disebabkan oleh kejadian luar

biasa berupa bencana alam banjir yang melanda Kabupaten Pati di beberapa wilayah, khususnya di daerah penghasil komoditas pertanian dan perikanan yang mengalami kerugian finansial akibat gagal panen/puso maupun hanyutnya ikan hasil budidaya baik tambak maupun kolam air tawar. Namun pada tahun 2015, menjadi momentum membaiknya perekonomian daerah sehingga pada tahun ini, terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98%. Sedangkan di tahun 2016, ekonomi Kabupaten Pati akan tumbuh sebesar **6% (angka prediksi)**. Angka pertumbuhan ekonomi ini relatif masih di atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Dengan melihat berbagai peluang serta dengan mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, Pemerintah Kabupaten Pati telah mempersiapkan berbagai langkah/strategi kebijakan yang mendorong pada peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing daerah, diantaranya dengan menitikberatkan pada upaya penyediaan infrastruktur yang memadai, penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi potensi investasi, pengembangan dan promosi produk unggulan daerah, serta peningkatan kualitas produk usaha mikro dan kecil.

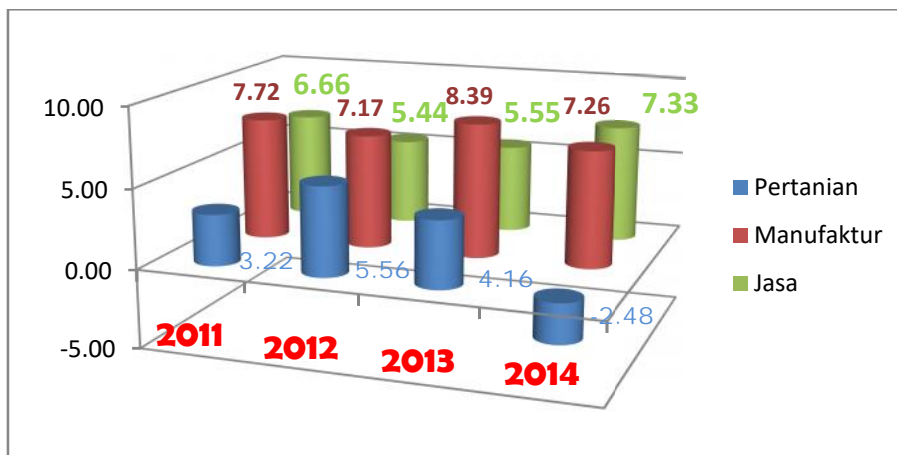


Sumber : BPS, PDRB Kabupaten di Indonesia 2012-2016**

Grafik 2.1
Tren Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jateng dan Kabupaten Pati Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati 2012 – 2016

Ditinjau dari jenis lapangan usaha, terdapat 3 (tiga) lapangan usaha (sektor) yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pati yaitu sektor utama di Kabupaten Pati yaitu pertanian, industri manufaktur dan jasa (sebagaimana grafik 2.2) terlihat bahwa pertanian dan industri manufaktur merupakan sektor penyumbang melemahnya perekonomian yang sangat signifikan. Bahkan sektor pertanian sejak 2013, cenderung terus menurun hingga hanya tumbuh minus 2,48% pada tahun 2014. Sedangkan industri manufaktur tahun

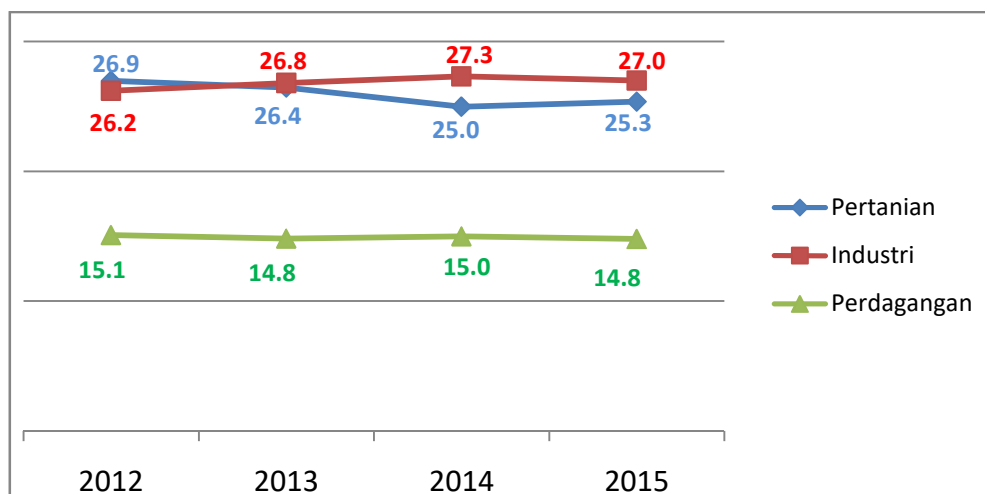
2014 tumbuh sebesar 7,26% atau turun 113 basis poin dibanding tahun sebelumnya.



Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati
Berdasarkan 3 (tiga) Lapangan Usaha Utama Tahun 2011 – 2014

Berdasarkan basis ekonomi, Kabupaten Pati memiliki kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari agraris (pertanian) ke arah industri manufaktur (mengarah pada industrialisasi). Hal ini terlihat dari distribusi persentase atau kontribusi sektoral masing-masing lapangan usaha yang terus bergeser dari tahun ke tahun. Data distribusi persentase PDRB Kabupaten Pati menurut lapangan usaha sebagaimana grafik 2.3.



Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2012-2015

Grafik 2.3
Perkembangan Kontribusi Sektoral terhadap PDRB
Kabupaten Pati 2012 – 2015

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupati Pati cenderung terus menurun dari tahun 2012 sebesar 26,9% menjadi 25,3% pada tahun 2015. Secara teori, penurunan kontribusi suatu sektor pada PDB/PDRB bukan berarti bahwa sektor pertanian mengalami kemunduran/penurunan jumlah produksi atau produktivitas, namun karena adanya pertumbuhan sektor dominan lain yang lebih tinggi yang

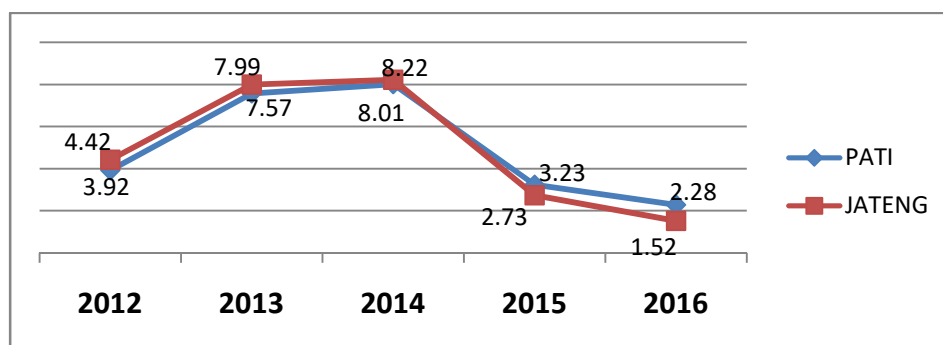
outputnya memiliki nilai tambah di atas output sektor pertanian. Selama asumsi dari teori ini sesuai atau berlaku pada suatu perekonomian, berarti sektor pertanian tidak bermasalah. Namun sebaliknya, bila penurunan kontribusi sektor pertanian lebih disebabkan oleh adanya penurunan produktivitas karena suatu hal (bencana alam, perubahan fungsi lahan pertanian, gangguan hama/penyakit dll), hal ini yang perlu mendapat perhatian yang sangat serius, mengingat sektor pertanian sebagai sumber bahan pangan utama masyarakat luas. Disamping itu harus ada perhatian khusus dari pemerintah daerah berupa fasilitasi dan regulasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan manajemen kelembagaan petani, akses permodalan, kemitraan, pemanfaatan teknologi proses produksi hingga pengemasan dan perluasan akses pasar.

Sedangkan sektor industri manufaktur memberikan kontribusi terhadap PDRB yang cenderung terus meningkat, demikian pula dengan sektor jasa. Kedua sektor ini mengalami kecenderungan kontribusi yang terus meningkat terhadap PDRB karena memang produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi dibandingkan produk sektor pertanian, sehingga hal ini merupakan suatu kewajaran dalam dinamika struktur ekonomi pada suatu wilayah/negara. Namun demikian, untuk sektor industri manufaktur perlu terus didorong untuk berkembang dengan lebih diprioritaskan investasi sektor industri yang padat karya, sehingga mampu terus menyerap tenaga kerja lokal guna mendorong peningkatan perekonomian daerah yang lebih berkualitas.

2. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif dan mengikuti pola inflasi regional Jawa Tengah, dimana tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 masing-masing adalah 8,01% untuk Kabupaten Pati dan Jawa Tengah sebesar 8,22%. Tingginya angka inflasi dipengaruhi oleh naiknya harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu untuk pengeluaran pada kelompok bahan makanan seperti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.

Sejak tahun 2014, kenaikan harga-harga barang dan jasa cenderung terus menurun seiring lancarnya produksi, distribusi dan akses barang/jasa (khususnya barang/jasa yang memiliki sifat permintaan yang inelastik yaitu pada barang/jasa kebutuhan pokok dan tak tergantikan) oleh masyarakat yaitu pada tahun 2016 berada pada angka 2,28% Kabupaten Pati dan Jawa Tengah lebih kecil yaitu sebesar 1,52%. Kelompok komoditas yang cenderung sering memberikan andil/sumbangan deflasi adalah kelompok sandang dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.



Sumber: BPS Kabupaten Pati 2016 (diolah)

Gambar 2.4
Laju Inflasi Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2016

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB harga berlaku maupun nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. Berdasarkan tabel 2.3 berikut terlihat bahwa baik PDRB perkapita ADHB maupun ADHK Kabupaten Pati dari tahun 2011 – 2015 terjadi kenaikan. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas penduduk Kabupaten Pati.

Tabel 2.3
PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
1	2011	17.514.923	16.553.493
2	2012	19.276.492	17.414.788
3	2013	21.232.112	18.320.575
4	2014	23.186.384	19.033.268
5	2015 ^{*)}	25.666.881	20.086.076

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016
Ket. *): Angka Sementara

4. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran berdasarkan Koefisien Gini melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015, didapatkan angka Gini Ratio Kabupaten Pati tahun 2015 sebesar 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan di Kabupaten Pati berada pada kategori sedang. Padahal selama periode 2011 s/d 2014, angka Gini Ratio Kabupaten Pati menunjukkan angka

ketimpangan yang rendah. Peningkatan dari kategori pemerataan pendapatan rendah ke pemerataan pendapatan sedang ini menunjukkan makna bahwa pendapatan yang diterima orang kelas atas jauh lebih besar dari kalangan bawah. Dengan kata lain kelas atas ekonominya naik sangat cepat dan kelas bawah juga naik, tapi lambat. Hal ini perlu diwaspadai karena angka indeks gini relatif meningkat dalam kurun lima tahun terakhir yang berarti ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin melebar sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Garfik 2.5
Gini Ratio Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan penduduk dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan, di mana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Pati tahun 2015 tergolong tinggi atau mempunyai ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari angka 19,29% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan rendah; 33,6% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan menengah dan 47,11% pendapatan dinikmati oleh penduduk berpendapatan tinggi. Hasil capaian ini perlu diwaspadai karena persentase pendapatan yang dinikmati oleh penduduk berpendapatan rendah maupun menengah dalam lima tahun terakhir cenderung turun sedangkan persentase pendapatan yang dinikmati penduduk berpendapatan tinggi cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan ketimpangan pemerataan pendapatan semakin meningkat. Pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Pati versi Bank Dunia dapat dilihat pada tabel 2.4.

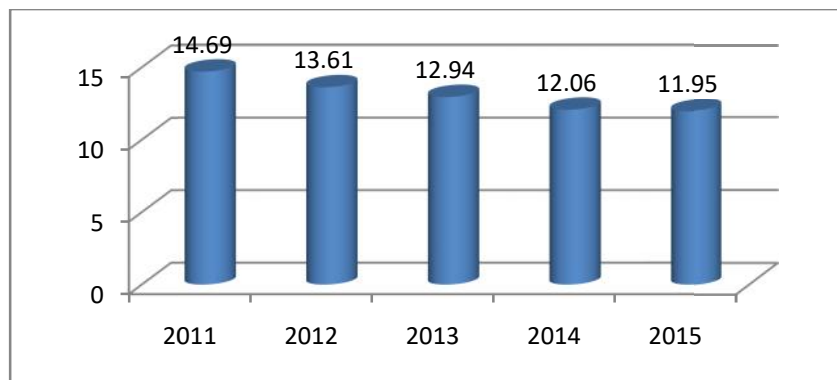
Tabel 2.4
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Pati
Menurut Bank Dunia Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Kriteria Bank Dunia		
		40 % I	40 % II	20 % III
1	2011	22,03	36,77	41,2
2	2012	22,51	35,48	42,01
3	2013	23,21	36,34	40,45
4	2014	23,11	34,95	41,94
5	2015	19,29	33,6	47,11

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

6. Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2011 – 2015 cenderung menurun walaupun dengan persentase penurunan yang sangat kecil. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2015 sebesar 147.100 jiwa atau 11,95%, menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 148.050 jiwa atau 12,06%. Hal ini memerlukan evaluasi dan inovasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sehingga bisa menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pati tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik 2.6.

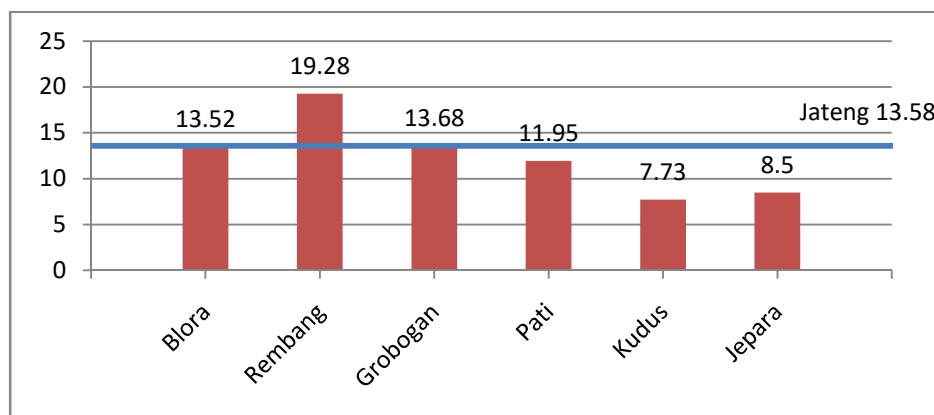


Sumber : BPS Kabupaten Pati 2015

Grafik 2.6

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pati tahun 2015 masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pati dan Kabupaten sekitar serta Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.7

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pati dan Kabupaten sekitar serta Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015

7. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tinggi rendahnya tindak kriminalitas menunjukkan kenyamanan dan keamanan suatu wilayah untuk ditinggali. Semakin tinggi tindakan

kriminal terjadi maka suatu wilayah menjadi semakin tidak nyaman dan aman untuk ditinggali. Kejadian kriminalitas di Kabupaten Pati sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 berfluktuatif namun ada kecenderungan terjadi penurunan. Bila dilihat dari rasio tindak pidana yang bisa diselesaikan telah terjadi peningkatan, menunjukkan kinerja aparaturnya dalam menciptakan kondusivitas wilayah semakin baik. Hal ini sejalan dengan tren perkembangan angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

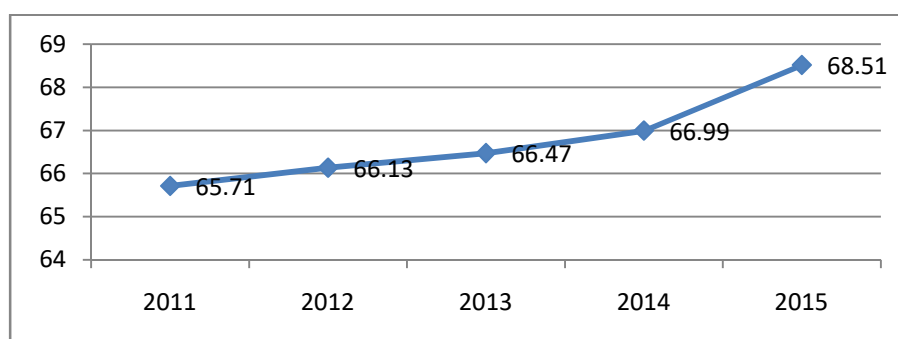
No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana			Angka Kriminalitas yang Tertangani
		Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2011	864	454	52,55	3,79
2	2012	237	148	62,45	1,23
3	2013	444	277	62,39	2,27
4	2014	276	187	67,75	1,53
5	2015	228	164	71,93	

Sumber : Polres Pati 2015

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu : umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

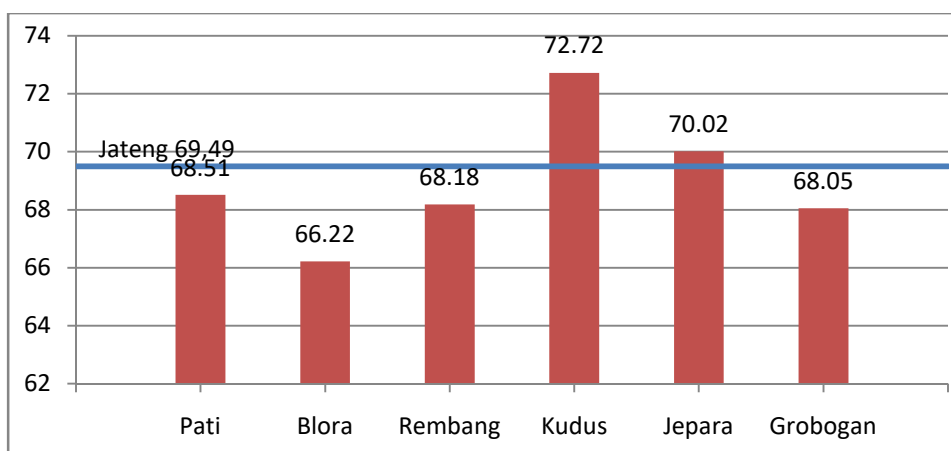
Nilai IPM di Kabupaten Pati saat ini berada pada kategori sedang (60-70), walaupun sudah terjadi peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini perlu diwaspadai oleh pengambil kebijakan karena nilai IPM merupakan salah satu alokator dalam penentuan DAU sedangkan APBD Kabupaten Pati sebagian besar masih bersumber dari DAU. Nilai IPM Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016 (diolah).

Grafik 2.8
IPM Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

Capaian IPM Kabupaten Pati tahun 2015 sebesar 68,51 masih berada di bawah capaian IPM Jawa Tengah sebesar 69,49. Capaian IPM Kabupaten Pati apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten lain sekitar dapat dilihat pada grafik 2.9.



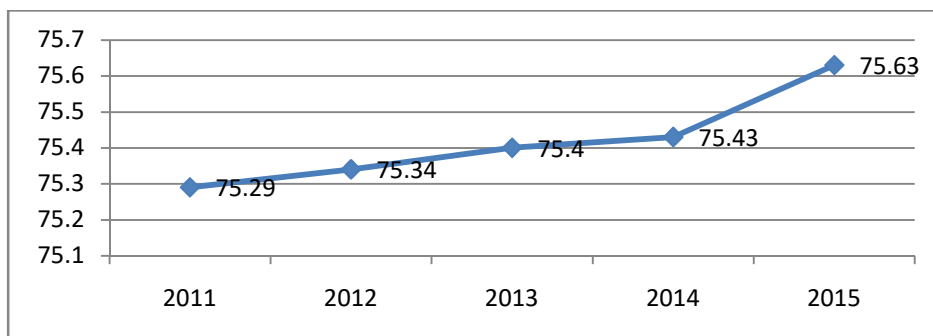
Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.9
IPM Kabupaten Pati dan Kabupaten sekitar Serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Adapun indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan indikator AHH Kabupaten Pati pada tahun 2011 – 2015 cenderung meningkat sehingga harus disertai dengan kewaspadaan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang responsif untuk usia lanjut. Perkembangan AHH Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik 2.10.



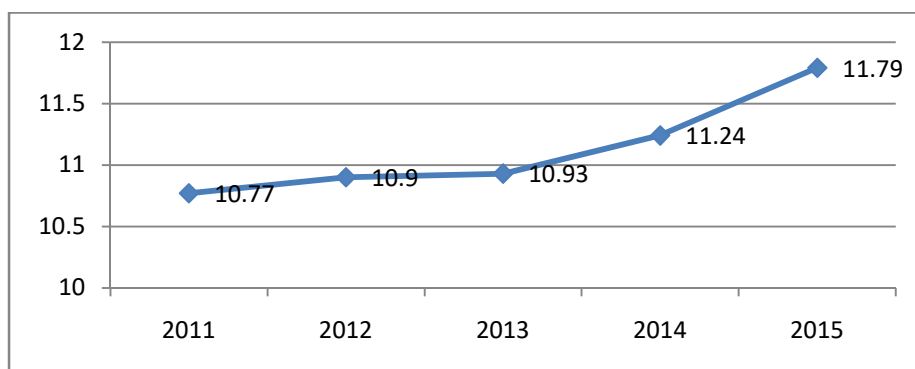
Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.10
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator IPM dengan metode penghitungan baru yang didefinisikan lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia tujuh tahun ke atas dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Pada grafik 2.11 dapat dilihat Perkembangan HLS Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 semakin meningkat dan setiap penduduk mempunyai harapan bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah walaupun belum sampai tamat.

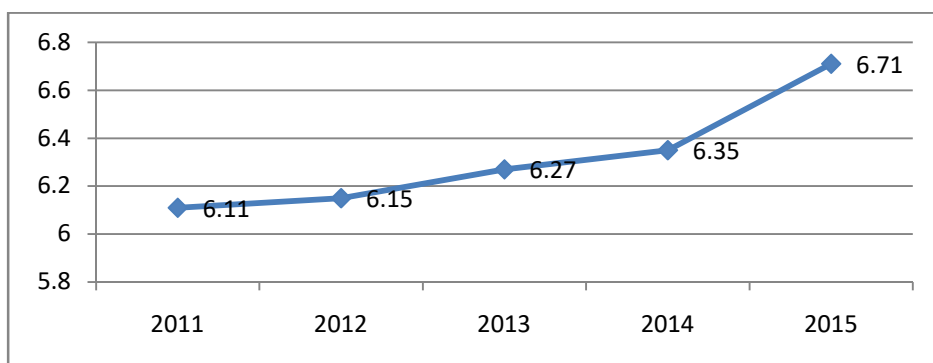


Sumber: BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.11
Perkembangan HLS Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah pada IPM metode penghitungan baru adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Oleh sebab itu, RLS Kabupaten Pati relatif kecil baru setara dengan tamat jenjang pendidikan sekolah dasar, pada tahun 2011 – 2015 nilainya baru sebesar 6,11 – 6,71, walaupun ada tren perkembangan meningkat sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.12. Hal ini perlu perhatian pengambil kebijakan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik pada semua jenjang dan mempermudah akses seluruh warga masyarakat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



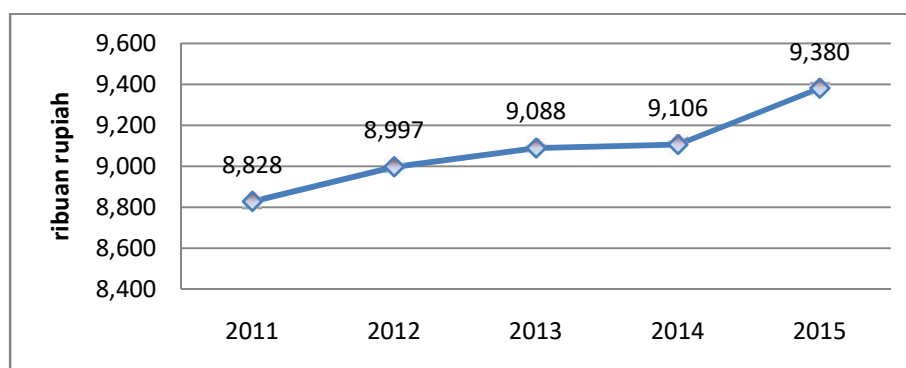
Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.12
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pati 2011 – 2015

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita di Kabupaten Pati meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 meningkat tipis menjadi sebesar 9.380 ribu rupiah dibanding tahun 2014. Angka ini masih di bawah pengeluaran

per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yang sebesar 9.930 ribu rupiah. Perkembangan pengeluaran per kapita di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada grafik 2.13.



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Grafik 2.13
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

9. Angka Partisipasi Kasar

Pada tahun 2012 – 2015, capaian APK pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Untuk capaian APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA perlu mendapatkan perhatian karena masih cukup rendah dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan APK Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pati
Dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTs. (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
1	2011	114,08	114,93	98,75	99,72	55,47	64,93
2	2012	112,06	109,06	99,16	100,50	57,71	67,00
3	2013	112,16	109,08	99,38	100,52	58,37	70,00
4	2014	112,80	109,10	100,14	100,54	60,72	73,05
5	2015	112,68	109,31	102	100,69	63,67	74,01

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2017

10. Angka Partisipasi Murni

Pada tahun 2012 – 2015, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang berarti akses penduduk terhadap pendidikan semakin meningkat. Untuk capaian APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA perlu mendapatkan perhatian karena masih cukup rendah dan berada di bawah capain Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan APM Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.7.

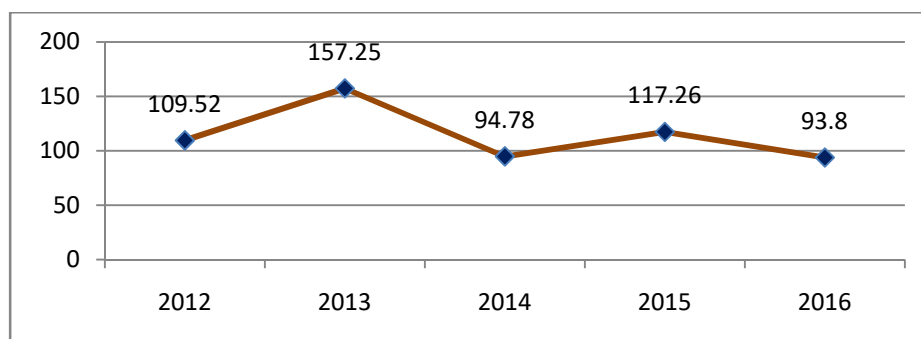
Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pati
Dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTs. (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.
1	2011	98,92	96,04	77,75	78,33	38,02	51,46
2	2012	98,94	98,30	78,17	78,92	39,79	53,00
3	2013	99,46	98,60	78,83	79,00	39,91	55,00
4	2014	99,90	98,32	80,84	77,83	42,11	59,20
5	2015	99,63	98,43	81,37	79,51	44,22	60,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

11. Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir AKI di Kabupaten Pati berfluktuatif walaupun terlihat tren terjadi penurunan. Capaian pada tahun 2014 sudah berada di bawah target MDG's, namun kembali meningkat di tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2016 sebagaimana terlihat pada grafik 2.14. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga konsistensi program.



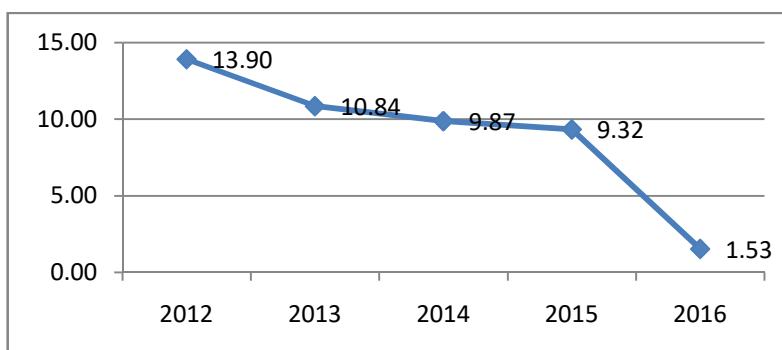
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2016 (diolah)

Grafik 2.14
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

12. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Pada grafik 2.15 terlihat bahwa AKB di Kabupaten Pati memiliki tren penurunan dalam lima tahun terakhir, bahkan pada tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup tajam dibanding tahun sebelumnya.



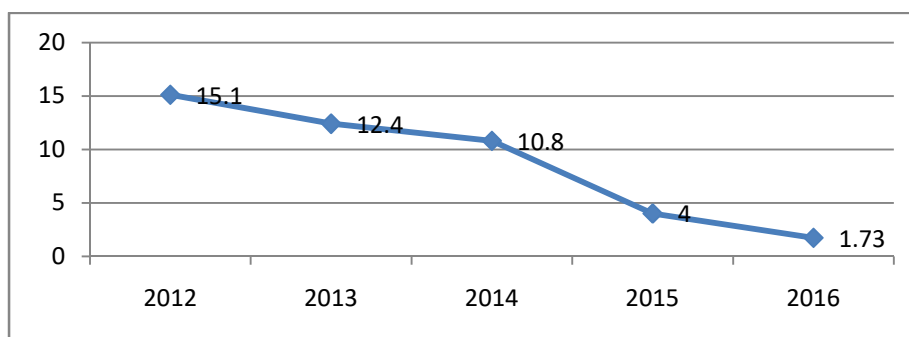
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (diolah)

Grafik 2.15
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

13. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya sehingga kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Capaian AKABA di Kabupaten Pati tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan keberhasilan program kegiatan bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan anak balita. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.16.

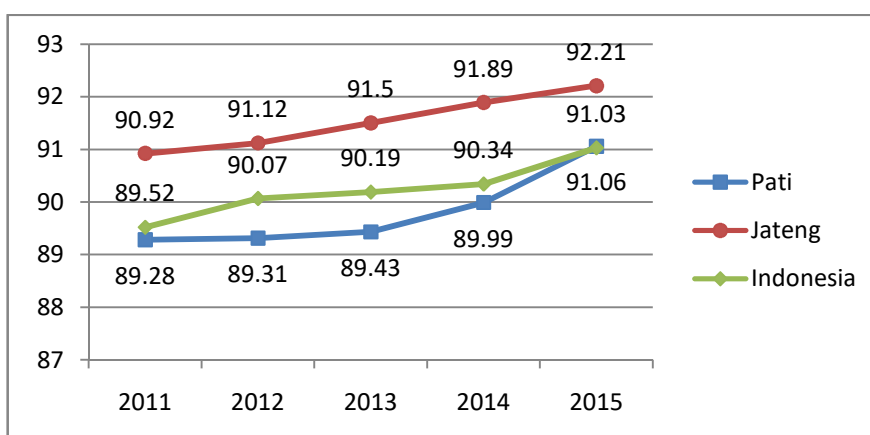


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (diolah)

Grafik 2.16
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

14. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan pada status perempuan khususnya pada kemampuan dasar. Pada tahun 2014 terjadi perubahan metode dan juga indikator dalam penghitungan IPG sejalan dengan perubahan metode dan indikator dalam penghitungan IPM. Metode maupun Indikator yang digunakan sama dengan metode dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM namun dalam penghitungan IPG keseluruhan indikator dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Kabupaten Pati tahun 2010 – 2014 mengalami kenaikan namun apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia, nilai IPG Kabupaten Pati masih berada dibawahnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.17.



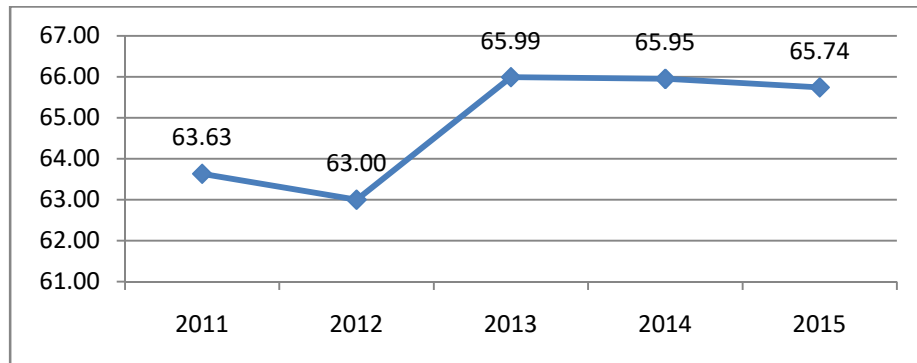
Sumber : BPS 2016

Grafik 2.16
Nilai IPG Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia
Tahun 2011 – 2015

15. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pada tahun 2011 Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Pati sebesar 63,63 sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 63,00. Akan tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali menjadi sebesar 65,99 walaupun dalam dua tahun terakhir mengalami sedikit

penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.17. Ini menunjukkan adanya peningkatan peran serta perempuan di parlemen, lembaga pemerintah, perusahaan swasta sehingga turut memperbesar sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.



Sumber : BPS 2016

Grafik 2.16
Nilai IDG Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1). Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Capaian APS tahun 2010 – 2014 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung meningkat dari 99,05 menjadi 99,65. Pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 90,46 menjadi 98,16. Perkembangan APS di Kabupaten Pati periode tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI (7-12 th)	100	98,22	98,35	99,65	100
2	SMP/MTs. (13-15 th)	91,53	90,93	93,33	98,16	97,62

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan. Pada periode 2011 – 2014, ketersediaan sekolah pada jenjang SD/MI mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari 875 unit menjadi 877 unit, sedangkan untuk SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 210 menjadi 217. Perkembangan jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar pada tahun 2011 – 2015 sebagaimana terlihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SD/MI	875	876	873	877	876
2	Jumlah SMP/MTs.	210	214	216	217	218
3	Jumlah Penduduk usia 7 s/d 12 th	108.004	108.220	104.796	98.362	103.633
4	Jumlah Penduduk usia 13 s/d 15 th	58.732	59.084	61.077	61.245	59.289

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun, pada kurun waktu tahun 2011 – 2014, rasio tersebut mengalami peningkatan dari 81,02 menjadi 89,16. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Pati cukup memadai. Untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu yang sama mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari 35,76 menjadi 35,43. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Kabupaten Pati
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio SD/ MI per 10.000 penduduk usia 7 - 12 tahun	81,02	80,95	83,30	89,16	84,53
2	Rasio SMP/MTs. per 10.000 penduduk usia 13 - 15 tahun	35,76	36,22	35,37	35,43	36,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

3). Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Pada periode waktu

tahun 2011 – 2015, rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI di Kabupaten Pati semakin meningkat dari 74,80 menjadi 83,56. Hal tersebut juga terjadi pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 89,87 menjadi 94,72. Capaian ini sudah melebihi angka ideal yaitu SD/SMP 1:20 dan MI/MTs 1:15. Perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	SD/MI					
	Jumlah Guru	9.191	8.840	9.179	10.976	9.754
	Jumlah Murid	122.880	121.111	117.432	116.752	116.728
	Rasio	74,80	72,99	78,16	94,01	83,56
II	SMP/ MTs.					
	Jumlah Guru	5.215	5.213	5.460	5.697	5.672
	Jumlah Murid	58.029	57.956	60.187	60.812	59.884
	Rasio	89,87	89,95	90,72	93,68	94,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indicator kondisi bangunan/ ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Pada tahun 2011 – 2015, kondisi ruang kelas pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Perkembangan data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/ MTs.
Kabupaten Pati dalam Kondisi Baik Tahun 2011 -2015 (%)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	67,09	64,61	63,41	63,08	61,82
2	SMP/ MTs.	81,87	79,50	55,59	74,92	78,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

c. Angka Putus Sekolah

Pada kurun waktu 2011 – 2015, angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI cenderung konstan pada angka 0,04 dan pada jenjang SMP/MTs cenderung menurun dari 0,38 menjadi 0,15. Kondisi angka putus sekolah tahun 2011 -2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	0,04	0,03	0,14	0,04	0,01
2	SMP/ MTs.	0,38	0,10	0,19	0,18	0,15

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2011 – 2015 untuk jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari 98,42 menjadi 100, begitu juga dengan jenjang SMP/MTs dari 98,12 menjadi 99,92. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs.
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	98,42	99,58	100	100	100
2	SMP/ MTs.	98,12	99,62	99,85	99,67	99,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

e. Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD/MI ke SMP/MTs dari 99,75 menjadi 123,9, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 76,61 menjadi 84,95. Capaian angka melanjutkan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. dan
SMP/MTs. ke SMA/SMK/MA Kabupaten Pati
Tahun 2012 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.	99,75	108,22	100,89	123,9
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs. ke SMA/SMK/ MA	76,61	84,97	84,76	84,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

f. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan

Standar Nasional Pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2011 – 2015 pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. 16.

Tabel 2.16
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru PAUD berkualifikasi S1/D4	11,80	19,59	27,36	53,30	60,49
2	Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	52,80	69,13	76,78	83,00	84,83
3	Guru SMP/ MTs. berkualifikasi S1/D4	77,97	80,78	84,12	87,47	89,69
4	Guru SMA/ SMK/ MA berkualifikasi S1/D4	85,49	86,05	90,97	91,40	92,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 2011-2015

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 cenderung semakin kecil yang berarti beban pelayanan Puskesmas semakin berat. Data pada tabel 2.17 menggambarkan rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Kecamatan yang memerlukan penambahan Puskesmas baru diantaranya Kecamatan Kayen, Juwana, Margorejo, Trangkil dan Dukuhseti.

Tabel 2.17
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2015

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
2011	29	1.198.529	1 : 41.329
2012	29	1.207.399	1 : 41.634
2013	29	1.218.016	1 : 42.000
2014	29	1.225.594	1 : 42.261
2015	29	1.239.989	1 : 42.758

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

b. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2011 – 2014, rasio dokter umum dan dokter spesialis per satuan penduduk cenderung meningkat sedangkan untuk dokter gigi cenderung menurun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Rasio Dokter per satuan Penduduk
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	110	0,092	55	0,046	21	0,018
2012	61	0,051	23	0,019	16	0,013
2013	107	0,088	59	0,048	21	0,017
2014	166	0,135	59	0,048	21	0,017

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

c. Kondisi Penyakit Menular Yang Terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Pati adalah TB, HIV/AIDS dan DBD. Angka kesakitan DBD (IR DBD) di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan. Demikian juga dengan penemuan kasus HIV/AIDS yang cenderung meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terutama kasus penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga yang merupakan kelompok beresiko rendah. Data penyakit menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2014

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	HIV/AIDS	
				Kasus HIV	Kasus AIDS
2011	27,8	1,2	22,85	36	40
2012	23,9	1,3	97	40	56
2013	47,16	0,7	78,96	53	79
2014		0,4	48,63	59	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Prasarana Jalan

Total panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Pati sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 812,72 km menjadi 825,33 km. Sedangkan kondisi jalan kewenangan kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Kondisi Jalan						Total Panjang (Km)
	Baik		Sedang		Rusak		
	Km	%	Km	%	Km	%	
2011	258,65	31,83	128,73	15,84	425,34	52,34	812,72
2012	281,67	34,66	117,18	14,42	413,88	50,92	812,73
2013	281,67	34,66	117,18	14,42	413,88	50,93	812,72
2014	398,72	49,06	153,84	18,93	260,16	32,01	812,72
2015	380,82	46,14	71,42	8,65	373,09	45,21	825,33

Sumber : BPS dan DPU Tahun 2015

Kondisi jembatan kewenangan kabupaten pada kurun waktu 2012 – 2015 tidak ada penambahan panjang jembatan namun terjadi peningkatan prosentase jembatan dalam kondisi baik dari 87,33 menjadi 95,1. Kondisi jalan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten
Tahun 2012 – 2015

Tahun	Kondisi Jembatan						Total Panjang (m)
	Baik		Sedang		Rusak		
	m	%	m	%	m	%	
2012	2.713,60	87,33	72,5	2,33	321,1	10,33	3.107,20
2013	2.766,90	89,05	59,2	1,91	281,1	9,05	3.107,20
2014	2.883,35	92,8	11,75	0,38	212,1	6,83	3.107,20
2015	2.954,85	95,1	7,75	0,25	144,6	4,65	3.107,20

Sumber : DPU Kabupaten Pati Tahun 2015

b. Prasarana Sumber Daya Air

Luas areal layanan irigasi di Kabupaten Pati sebesar 43.115,6 ha tercakup dalam 386 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 56 DI kewenangan pusat, 3 DI kewenangan provinsi dan 327 DI kewenangan kabupaten sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.22
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi
Di Kabupaten Pati

Kewenangan	Luas Area (Ha)	%	Jumlah DI
Pusat	17.875,22	41,46	56
Provinsi	4.275,38	9,92	3
Kabupaten	20.965	48,62	327
Jumlah	43.115,60	100	386

Sumber : DPU Kabupaten Pati Tahun 2015

c. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Cakupan layanan air minum, sanitasi dan persampahan dalam kurun waktu 2011 – 2015 telah terjadi peningkatan. Data cakupan layanan air minum, sanitasi maupun persampahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Air Minum (%)	35,02	42,27	49,46	56,68	63,9
2	Sanitasi (%)	52,3	57,6	62,9	68,2	73,5
3	Persampahan (%)	8	8	8.94	12.21	

Sumber : DPU Kabupaten Pati Tahun 2015

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan sebagaimana terlihat pada tabel 2.24 Telah terjadi peningkatan jumlah rumah layak huni dan penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni diantaranya dilaksanakan oleh DPU, Disosnakertrans maupun Bapermades.

Tabel 2.24
Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2014

Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Rumah Layak Huni		Rumah Tidak Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (%)	Jumlah (unit)	Rasio (%)
2012	355.584	259.836	73,07	95.748	26,93
2013	355.584	260.643	73,3	94.941	26,7
2014	355.584	261.208	73,46	94.376	26,54

Sumber : DPU Kabupaten Pati Tahun 2015

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah kabupaten dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2011 – 2014 pelanggaran peraturan daerah belum mampu diselesaikan secara tuntas namun prosentasenya dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Penyelesaian Pelanggar Perda Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2011	109	92	84,40
2	2012	98	95	96,94
3	2013	157	150	95,54
4	2014	181	176	97,24
5	2015	199	170	85,43

Sumber : Kantor Satpol PP dan Linmas Kabupaten Pati Tahun 2015

Sedangkan untuk mengatasi kurangnya jumlah personil aparat untuk menjaga kamtramtibum dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan anggota Linmas. Rasio Linmas per 10.000 penduduk pada kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2011	9.027	1.198.529	75,32
2	2012	9.027	1.207.399	74,76
3	2013	9.027	1.218.016	74,11
4	2014	9.431	1.225.594	76,95
5	2015	9.431	1.232.912	76,49

Sumber : Kantor Satpol PP dan Linmas Kabupaten Pati Tahun 2015

6. Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada kurun waktu 2011 – 2015 berfluktuatif, sedangkan upaya penanganan yang telah dilakukan berupa pemberian bantuan sosial kepada PMKS cenderung meningkat dari 0,073 % pada tahun 2011 menjadi 0,392 % pada tahun 2015. Data penanganan PMKS di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Penanganan PMKS di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Populasi PMKS (jiwa)	Jumlah Penangan	Persentase
1	2011	143.100	105	0,073
2	2012	145.121	226	0,156
3	2013	70.041	126	0,180
4	2014	70.041	101	0,144
5	2015	78.318	307	0,392

Sumber : Disosnakertrans Kabupaten Pati Tahun 2015

2.1.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (angkatan kerja) merupakan indikator seberapa banyak penduduk usia kerja yang memiliki kesempatan untuk memasuki pasar kerja pada bidang atau lapangan usaha yang tersedia. Semakin besar rasio berarti kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk setempat semakin terbuka. Pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja sangat menentukan besar kecilnya rasio kesempatan kerja. Laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tinggi dari pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja akan memperkecil angka rasio.

Tabel 2.28
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja
1	2011	603.103	899.934	67,02
2	2012	562.487	903.167	62,28
3	2013	594.736	901.182	66,00
4	2014	607.933	942.338	64,51
5	2015	617.299	952.195	64,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2012-2016

Berdasarkan tabel 2.28, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Pati cenderung berfluktuatif antara angka 62,28 – 67,02. Dari tahun 2011 hingga 2015 jumlah penduduk

usia kerja meningkat sebesar 5,81% atau bertambah sebanyak 52.261 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang bekerja/telah bekerja sebesar 2,35% atau meningkat sebanyak 14.196 jiwa. Jadi selama kurun waktu lima tahun tersebut, proporsi peningkatan jumlah penduduk pada usia kerja dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja hampir seimbang sehingga rasionya cenderung memiliki amplitude/fluktuasi yang kecil.

Proporsi jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif merupakan keuntungan tersendiri, manakala peluang kerja atau penciptaan lapangan kerja secara efektif dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Hal ini yang lebih dikenal sebagai *bonus demografi*, namun sebaliknya manakala jumlah penduduk usia kerja tidak tersalurkan ke dalam pasar kerja atau sangat minim yang memiliki jiwa *entrepreneurship*, akan mendatangkan masalah yang disebut dengan *bencana demografi*.

Sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya bencana demografi, pemerintah daerah harus terus berupaya menciptakan wirausaha-wirausaha baru melalui berbagai pelatihan kepada pemuda-pemuda dan masyarakat umum lainnya serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wadah penyerapan tenaga kerja yang dapat diandalkan.

b. Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Adanya beberapa kasus hubungan kerja secara individu/kelembagaan antara buruh yang diwakili oleh serikat pekerja di daerah dengan perusahaan tempat bekerja sering memberikan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak maupun masyarakat sekitar lokasi perusahaan serta perekonomian daerah. Diperlukan upaya penyelesaian damai secara bipartit ataupun tripartit yang melibatkan pemerintah setempat agar permasalahan yang ada tidak sampai berlarut-larut dan justru berdampak buruk bagi dunia ketenagakerjaan maupun dunia usaha.

Tabel 2.29
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status (kasus yang terselesaikan)	Persentase
1	2012	12	12	100
2	2013	14	10	71,43
3	2014	4	4	100
4	2015	8	8	100
5	2016	6	6	100

Sumber : Disosnakertrans Kabupaten Pati Tahun 2015

Dari kasus yang muncul dalam hubungan industrial di Kabupaten Pati, sebagaimana pada Tabel 2.29, rata-rata masalah tersebut sudah dapat dituntaskan secara maksimal. Sejak Tahun 2012-2016, masalah

hubungan industrial daerah yang muncul hampir bisa terselesaikan semua, hanya pada tahun 2013 kasus hubungan industrial tidak bisa terselesaikan secara maksimal. Ini merupakan kondisi yang harmonis dalam konteks untuk menjaga kondusivitas iklim usaha, mengingat akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi upaya Pemerintah Kabupaten untuk menarik investasi masuk ke wilayah Kabupaten Pati.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan suatu ukuran perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Angka TPAK yang semakin besar menunjukkan bahwa beban usia ketergantungan kepada kelompok usia produktif semakin kecil. Demikian sebaliknya bahwa semakin kecil angka TPAK, maka beban penduduk usia produktif akan semakin besar.

Tabel 2.30
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	TPAK (%)
1	2011	899.934	651.095	72,35
2	2012	903.167	640.664	70,94
3	2013	901.182	641.599	71,20
4	2014	942.338	649.323	68,91
5	2015	952.195	645.912	67,83

Sumber : Disosnakertrans Kabupaten Pati Tahun 2016

Tabel 2.30, menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Pati Tahun 2010-2014 cukup fluktuatif atau berada pada kisaran 68% - 72% selama kurun waktu lima tahun tersebut. Hal dikarenakan laju pertumbuhan per tahun penduduk angkatan kerja dan laju penduduk usia kerja berbeda tipis atau memiliki rentang angka yang tidak jauh berbeda.

Satu hal yang sangat penting bahwa Pemerintah Kabupaten Pati perlu menyusun kebijakan yang fokus untuk penciptaan lapangan kerja atau menumbuhkan kewirausahaan baru bagi masyarakat khususnya di wilayah kantung kemiskinan maupun wilayah yang kerawanan sosial yang tinggi.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ekonomi makro sebagai penentu berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang belum bekerja atau tidak memiliki pekerjaan (seminggu yang lalu setelah survey) dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Tabel 2.31
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	TPT (%)
1	2011	47.992	7,37
2	2012	78.177	12,20
3	2013	46.863	7,30
4	2014	41.390	6,37
5	2015	28.613	4,43

Sumber : Disosnakertrans Kabupaten Pati Tahun 2016

Sebagaimana Tabel 2.31, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pati antara Tahun 2011 – 2012 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 7,37% pada Tahun 2011, menjadi sebesar 12,20% pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013 turun menjadi 7,30% dan menurun sebesar 93 basis point pada Tahun 2014 menjadi 6,37%.

Penurunan angka pengangguran yang cenderung lambat dikarenakan sektor industri manufaktur yang relative banyak menyerap tenaga kerja belum berkembang secara maksimal. Hal ini diperparah dengan kondisi sektor pertanian, tempat sebagian besar warga masyarakat pedesaan menggantungkan mata pencahariannya belum dapat mengangkat kesejahteraan mereka, sehingga mereka memutuskan meninggalkan profesi petani untuk mengadu nasib di wilayah perkotaan setempat sebagai buruh pabrik atau seagai pelayan. Belum lagi tentang ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan *skill/keahlian* yang dimiliki oleh tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan pengangguran terbuka.

e. UMK

Upah Minimum Kabupaten atau UMK merupakan suatu kerangka kebijakan dalam memberlakukan sistem pengupahan di wilayah kabupaten di berbagai sektor/lapangan usaha khususnya pada lembaga usaha swasta. Penentuan tingkat upah daerah (kabupaten) didasarkan pada kebutuhan hidup minimal/layak(KHL) dimana tingkat upah tersebut diberlakukan. Disamping itu, juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan upah sehingga harus ada kesepakatan antara buruh/karyawan dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui tim pengupahan daerah.

Tabel 2.32
Rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dibanding
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	UMK (RP/bln/orang)	KHL (RP/bln/orang)	Rasio (%)
1	2011	769.550	850.254	90,51
2	2012	837.500	927.600	90,29
3	2013	927.600	1.013.027	91,57
4	2014	1.053.027	1.171.391	89,90
5	2015	1.176.500	1.310.157	89,80

Sumber : Disosnakertrans Kabupaten Pati Tahun 2015

Upah minimum Kabupaten Pati dari Tahun 2011 – 2015 terus mengalami peningkatan, merujuk pada peningkatan KHL tiap tahun. Rata-rata peningkatan UMK per tahun adalah sebesar 11,2%. Sedangkan bila dilihat dari rasio antara besaran UMK dengan KHL, cenderung turun terutama sejak Tahun 2013 hingga 2015 yaitu dari 91,57 turun menjadi 89,80.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2014 sebanyak 5.319 orang meningkat menjadi 5.837 orang pada tahun 2015. Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015, prosentase tertinggi PNS berada pada pendidikan lulus Strata 1 yaitu sebesar 68,6 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 – 2015

Pendidikan	Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan							
	2012		2013		2014		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lulus S-3								
Lulus S-2	159	3,6	287	5,3	332	6,2	363	6,2
Lulus S-1	2.431	55,2	3.597	66,6	3.704	69,6	4.007	68,6
Lulus D3	793	18,0	729	13,5	601	11,3	713	12,2
Lulus SMA sederajat	997	22,6	771	14,3	665	12,5	683	11,7
Lulus SMP sederajat	18	0,4	14	0,3	14	0,3	33	0,6
Lulus SD sederajat	7	0,2	3	0,1	3	0,1	38	0,7
Total	4.405	100	5.401	100	5.319	100	5.837	100

Sumber : BKD Kabupaten Pati Tahun 2015

PNS perempuan yang menempati jabatan eselon III dan IV pada tahun 2012 – 2015 cenderung meningkat, tetapi sejak tahun 2013 – 2015 tidak ada perempuan yang menduduki jabatan eselon II. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Kabupaten Pati Berdasarkan Eselon Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perempuan pada Jabatan Eselon II	1	0	0	0
2	Jumlah Perempuan pada Jabatan Eselon III	29	31	34	33
3	Jumlah Perempuan pada Jabatan Eselon IV	203	215	220	223

Sumber : BKD Kabupaten Pati Tahun 2015

3. Pangan

Kabupaten Pati memiliki potensi sumber pangan yang cukup melimpah baik dalam pemenuhan karbohidrat, protein maupun zat gizi lainnya. Namun pengelolaan sumber daya di bidang pangan dan

pemberdayaan masyarakat terkait pola konsumsi pangan yang sehat dan bergizi selama ini masih perlu diupayakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari capaian target di bidang pangan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Masalah ketahanan pangan tidak hanya terkait tentang ketersediaan pangan saja, namun jaminan aksesibilitas (termasuk distribusi pangan) maupun mutu dan keamanan pangan itu sendiri juga merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat harus memiliki kesempatan yang luas serta kemampuan (harga yang terjangkau) untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara aman dan berkualitas.

Sebagaimana rencana program pembangunan pangan dan gizi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pati Tahun 2011-2015, dimana, Pemerintah Daerah melalui SKPD-SKPD terkait terus berupaya untuk mencapai target pemenuhan pangan dan gizi, guna mendukung kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun keterkaitan dengan komitmen internasional (Millenium Development Goal's/MDG's) guna mereduksi berbagai permasalahan sosial termasuk didalamnya adalah masalah pemenuhan pangan dan gizi yang masih banyak dijumpai di berbagai belahan dunia ketiga (negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin).

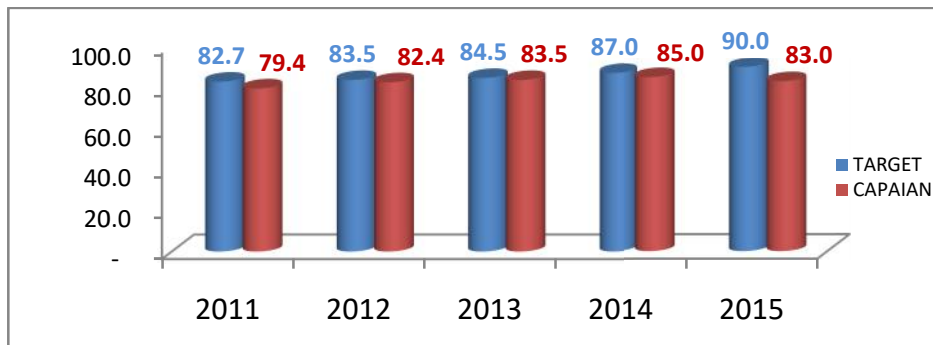
Dari aspek ketersediaan energy sebagai salah satu pilar ketahanan pangan, cenderung selalu mengalami kenaikan, meskipun belum menyentuh angka 2.200 kkal/kapita/hari, sebagaimana standar/target yang telah ditentukan. Hingga tahun 2015, rata-rata ketersediaan energy di Kabupaten Pati baru mencapai 2.025 kkal/kapita/hari dari target yang harus dipenuhi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari.

Tabel 2.35
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Di Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Energi Per Kapita (Kkal/kapita/hari)	Protein Per Kapita (gram/kapita/hari)
1	2011	1.900	
2	2012	1.980	
3	2013	1.980	
4	2014	2.026	
5	2015	2.025	

Sumber : RAD Pangan dan Gizi Kab. Pati Tahun 2011-2015

Adapun dari sisi keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat (karbohidrat, protein hewani / nabati, lemak, vitamin dan mineral) yang tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) cenderung baik dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pada periode 2011-2014 yaitu dari 79,4 pada Tahun 2011, menjadi sebesar 85,0 pada Tahun 2014. Namun di Tahun 2015 Skor PPH justru menurun sedikit pada angka 83,0 (data secara lengkap pada Grafik 2.19).



Sumber :Laporan Akhir RAD Pangan dan Gizi Kab. Pati Tahun 2015

Grafik 2.19
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

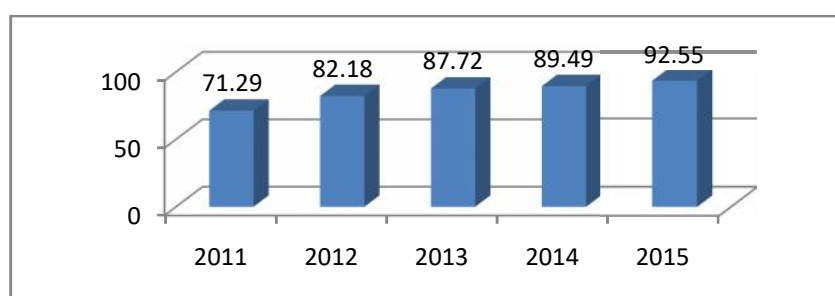
Idealnya skor PPH bisa mendekati angka sempurna (angka 100) yang mengindikasikan pola konsumsi makanan yang lengkap yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Kenyataan bahwa capaian pemenuhan skor PPH belum sesuai target, meskipun ada kecenderungan naik. Masih perlu diupayakan oleh pemerintah daerah khususnya SKPD terkait untuk membuat strategi dan kebijakan yang lebih mendukung pada pencapaian target melalui intervensi-intervensi pada pemenuhan jenis bahan pangan yang masih dibawah target konsumsi.

Hal yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah menjaga kontinuitas ketersediaan dan distribusi bahan pangan yang memadai, merata dan terjangkau (harga) bagi masyarakat. Sumber daya pertanian yang cukup melimpah di Kabupaten Pati, apabila dikelola dengan baik dan benar akan mampu memberikan jaminan ketahanan pangan daerah atau bahkan menjadi salah satu daerah penyangga pangan bagi wilayah yang lebih luas.

4. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Persentase Penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Pati dari tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 71,29 % menjadi 92,55% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

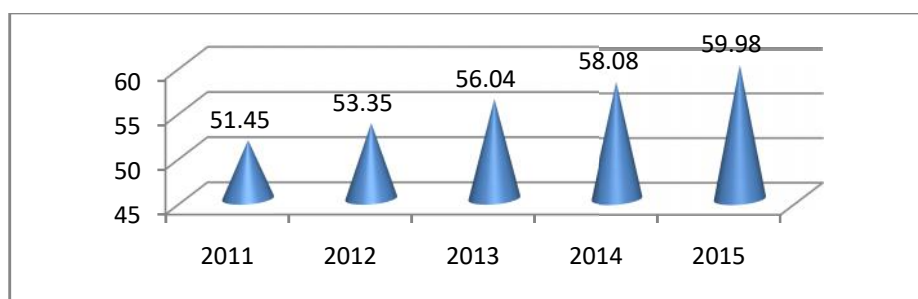


Sumber : Disdukcapil Kab. Pati Tahun 2015

Grafik 2.20
Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

b. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk di Kabupaten Pati dari tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 51,45 % menjadi 59,98% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Disdukcapil Kab. Pati Tahun 2015

Grafik 2.21
Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya yang didukung dengan kebijakan, program dan kegiatan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)					
	- LPMD/K	406	406	406	406	406
	- RT	7.549	7.549	7.549	7.549	7.585
	- RW	1.475	1.475	1.475	1.475	1.484
	- PKK	401	401	401	401	401
	- Posyandu	1.061	1.061	1.061	1.061	1.064
2	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
3	Jumlah LSM aktif (unit)	16	16	16	16	16
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaa masyarakat dalam jutaan	1.850	2.262	2.148	2.362	
6	Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)	20	11	9	70	92

Sumber : Bapermades Kab. Pati Tahun 2015

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB Aktif selama periode 2010 – 2014 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Peserta KB Aktif di Kabupaten Pati
Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
1	2010	268.460	209.772	78,14
2	2011	267.934	208.886	77,96
3	2012	269.260	210.768	78,28
4	2013	265.294	200.297	75,50
5	2014	270.259	210.687	77,96

Sumber : BPP & KB Kab. Pati Tahun 2015

b. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri

Keberhasilan pengendalian penduduk salah satunya ditentukan melalui peran serta masyarakat dalam layanan KB mandiri. Tidak semua layanan KB menjadi beban pemerintah, oleh sebab itu peran PUS dari kalangan masyarakat yang mampu sangat diperlukan. Kepesertaan KB mandiri di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 125.269 menjadi 126.236. Jumlah peserta KB mandiri di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Peserta KB Mandiri di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Peserta KB Mandiri (orang)
1	2011	125.269
2	2012	128.241
3	2013	124.569
4	2014	123.380
5	2015	126.236

Sumber : BPP & KB Kab. Pati Tahun 2015

c. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Jumlah keluarga Pra Sejahtera dari tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan dari 154.910 menjadi 137.062, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II. Selengkapny kondisi pentahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2011	396.183	154.910	39,10	71.902	18,15	83.924	21,18
2012	398.990	144.515	36,22	73.347	18,38	81.462	20,42
2013	413.956	138.144	33,37	84.826	20,49	94.216	22,76
2014	414.085	133.252	32,18	83.703	20,21	90.161	21,77
2015	420.626	137.062	32,59	83.179	19,78	96.512	22,94

Sumber : BPP & KB Kab. Pati Tahun 2015

9. Perhubungan

Perkembangan pelayanan perhubungan di Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.44 dan 2.45.

Tabel 2.40
Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat
Di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/ AKAP (trayek)	-	-	-	14	36
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	675	745	668	719	890
3	Jumlah Bus (unit)	132	159	147	194	209
4	Mobil Penumpang Umum (unit)	-	-	-	19.804	19.804
6	Jumlah Terminal Tipe C	3	3	3	3	3

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati Tahun 2015

Tabel 2.41
Perkembangan Pemasangan Perlengkapan Jalan
Di Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rambu Jalan	1.418	1.534	1.524	1.612	1.572
2	RPPJ	50	63	86	110	116
3	APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	12	12	16	24	27
4	Guardrail		100	180	240	
5	Marka Jalan	500	500	2.192	1.889	9.349

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati Tahun 2015

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Koperasi

Koperasi sebagai salah satu sokoguru/pilar bagi perekonomian rakyat, harus mampu berperan dalam mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para anggotanya. Namun dalam praktiknya, keberadaan koperasi justru kurang bisa

memberikan manfaat, bahkan keberadaannya seringkali terjadi malpraktik baik dari sisi manajemen maupun pelayanan kepada para anggota dan masyarakat. Namun demikian, masih ada beberapa koperasi yang memang dikelola secara baik/professional sehingga perkembangannya cukup bagus dan bias memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggotanya.

Melihat kondisi tersebut, peran pemerintah daerah sangat diperlukan khususnya dalam pembinaan, pendampingan dan pengawasan sehingga jalannya manajemen koperasi dapat menuju ke arah yang benar sesuai dengan peraturan (AD/ART) yang ada pada kelembagaan tersebut maupun peraturan eksternal kelembagaan yang diterbitkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Jumlah koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati, dari tahun ke tahun terus bertambah. Sejak tahun 2012 hingga 2015, koperasi bertambah jumlahnya dari 985 unit menjadi 1.100 unit atau meningkat sebesar 11,68% atau rata-rata per tahun terjadi pertambahan lembaga koperasi sebesar $\pm 4\%$. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi masih menjadi salah satu bentuk badan usaha yang sangat menarik dan cocok bagi ekonomi skala mikro dan kecil. Selain proses pengajuan pendiriannya mudah dan relatif murah, modal awal yang dipersyaratkan/dibutuhkan juga tidak terlalu memberatkan.

Dari aspek operasional kelembagaan, koperasi yang aktif menjalankan kegiatan perkoperasiannya pada tahun 2013 – 2015, berkisar 70% - 75%. Antara 25% - 30% sisanya dalam kondisi mati suri atau tidak beroperasi. Harus ada upaya untuk menggiatkan kembali koperasi yang tidak aktif tersebut, baik melalui pembinaan ataupun pendampingan oleh pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Identifikasi permasalahan kelembagaan dapat menjadi awal pembenahan koperasi yang tidak aktif, kemudian dilanjutkan dengan langkah restrukturisasi dan revitalisasi sumberdaya – sumberdaya yang dimiliki.

Tabel 2.42
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi (unit)	NA	985	1.054	1.078	1.100
2	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	NA	NA	740	809	821
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	NA	70%	70%	75%	75%

Sumber : Dinkop & UMKM Kabupaten Pati

Kondisi eksisting juga menunjukkan bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati pada tahun 2015, koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya sebagaimana peraturan yang berlaku, khususnya pada lembaga koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam, dari 700 unit koperasi (KSP, KSU

ataupun USP), sebanyak 75% yang memiliki status sehat dan cukup sehat, sisanya adalah tidak sehat. Beberapa kendala dalam melakukan pengawasan maupun penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi adalah karena minimnya anggaran yang dialokasikan oleh SKPD terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian tersebut, selain itu juga masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di unit kerja tersebut.

Guna mengefektifkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi, ke depan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati perlu membuat langkah kebijakan yang tepat dan efisien melalui berbagai alternative seperti menutup koperasi yang berkinerja buruk maupun yang sudah tidak aktif selama beberapa tahun, membentuk tim penilai atau pokja dari berbagai SKPD terkait guna memperluas jangkauan pemantauan dan penilaian terhadap koperasi maupun alternatif lain yang memungkinkan untuk diterapkan.

b. UMKM

Usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian baik secara nasional maupun regional/daerah. Menurut data dari Kementerian Koperasi & UMKM RI (2014), secara nasional jumlah UMKM sebanyak 57,9 juta unit atau sekitar 99.9% dari total usaha yang ada. Penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 97% dari total jumlah pekerja di sektor riil dan sumbangan terhadap PDB sebesar 60,34%.

Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 7,9 juta unit yang terdiri 4,2 juta UMKM pertanian dan 3,7 unit UMKM non pertanian.

Hingga Tahun 2015, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, jumlah UMKM di Kabupaten Pati sebanyak 39.882 unit usaha. Dari sejumlah UMKM tersebut, jumlah UMKM terbesar berada di sektor pertanian yaitu sebesar 66,4%, kemudian disusul UMKM di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 24,4%, di sektor industri manufaktur sebesar 5,9% dan di sektor bangunan sebesar 3,2%. Sisanya tersebar di sektor jasa dan sektor pertambangan dan penggalian. Berikut data UMKM

Tabel 2.43
Data UMKM Kabupaten Pati
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Jumlah UMKM (Unit)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian	26,474	66.38
2	Pertambangan dan Penggalian	10	0.03
3	Industri Pengolahan	2,370	5.94
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-	-

No	Lapangan Usaha	Jumlah UMKM (Unit)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Bangunan	1,261	3.16
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	28	0.07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,739	24.42
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-
9	Jasa - Jasa Swasta	-	-
TOTAL		39.882	

Sumber : Dinkop & UMKM Kab. Pati Tahun 2015

11. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu komponen indikator makro pertumbuhan ekonomi. Investasi terbukti secara empirik sebagai indikator kualitas bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi lebih memiliki *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian, khususnya investasi pada sektor riil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal (*labour intensives*). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang lebih didorong karena kinerja investasi, semakin berkualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Gambaran umum penanaman modal Kabupaten Pati berdasarkan kepemilikan sebagaimana tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44
Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pati
Tahun 2013 – 2015

Tahun	PMA			PMDN		
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Σ TK (org)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Σ TK (org)
2013	5	262,79	462	NA	NA	
2014	3	110,92	45	25	342,17	1.527
2015	2	21,6	40	17	4.842,50	9.167

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati

Berdasarkan kondisi eksisting sebagaimana tabel 2.48, nilai penanaman modal asing di Kabupaten Pati sejak Tahun 2013 hingga 2015 cenderung terus mengalami penurunan yaitu dari Rp. 262,79 Milyar menjadi Rp. 21,6 Milyar atau turun sebesar 92 %. Sebaliknya penanaman modal dalam negeri relatif menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp. 342,17 Milyar menjadi sebesar Rp. 4,842 Trilyun atau meningkat sebesar 14 kali lipat. Tren penurunan nilai investasi asing ke Kabupaten Pati harus mejadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pati guna menemukan kendala penyebab penurunannya, apakah pada birokrasi perijinan, jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, ketersediaan lokasi usaha, kondisi keamanan dan politik daerah, promosi investasi yang memang belum optimal atau belum adanya insentif dari pemerintah daerah bagi penanam modal sebagai salah satu indikator daya saing dan daya tarik bagi investor. Berbagai kemungkinan penyebab tersebut dapat dikaji lebih lanjut guna menemukan solusi yang tepat sehingga dapat menjadi pijakan bagi penentuan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal daerah.

Tabel 2.44 di atas juga telah membuktikan bahwa ada korelasi positif antara peningkatan investasi dengan kesempatan kerja. Semakin besar peningkatan investasi maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap di sektor riil tersebut.

Langkah yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pati ke depan adalah menjaga momentum positif, berupa peningkatan nilai investasi daerah, untuk terus dipupuk dan ditingkatkan melalui berbagai kebijakan pro investasi dan upaya promosi investasi yang lebih ekspansif diberbagai media maupun forum-forum strategis lain dalam rangka menarik calon investor sebanyak-banyaknya.

12. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi bidang perpustakaan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan	333	335	338	344	345
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.801	1.979	2.169	18.211	30.025
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33.598	35.983	38.982	43.890	47.703

Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Pati

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pati terus meningkat, demikian halnya dengan jumlah koleksi buku di perpustakaan juga mengalami kenaikan.

13. Kearsipan

Untuk mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintah daerah merupakan kunci utama. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip merupakan sumber informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik kinerja pemerintah daerah. Namun demikian penyelenggaraan karsipan secara baku belum dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Pati sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
1	2011	55	3	0,05
2	2012	55	5	0,09
3	2013	55	11	0,20
4	2014	56	11	0,20
5	2015	56	11	0,20

Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Pati

2.1.3.3. Fokus Layanan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Selain anugerah alam berupa hamparan daratan (dataran rendah dan tinggi), Kabupaten Pati juga terdapat sumber daya laut yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai dari ujung barat (wilayah Kecamatan Cluwak berbatasan dengan Kabupaten Jepara) ke arah timur (wilayah Kecamatan Batangan berbatasan dengan Kabupaten Rembang) sepanjang ±60 km, menambah kelengkapan sumber daya alam yang dimiliki, khususnya hasil perikanan tangkap laut.

Sumber daya alam berupa hasil perikanan di Kabupaten Pati berasal dari sumber perairan umum, laut dan budidaya (tambak dan kolam). Dari ketiga jenis penghasil komoditas mina tersebut, perikanan budidaya dan tangkap, yang selama ini memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi baik untuk dalam daerah maupun luar daerah dan bahkan ekspor. Selain itu, hasil perikanan di sektor hulu tersebut selama ini juga berperan sebagai supplier bagi industri manufaktur berbasis perikanan seperti industri kecil dan menengah (IKM) olahan hasil ikan, rumah makan/restaurant. Sedangkan produksi tangkap dari perairan umum (sungai, danau dan rawa-rawa) selama ini relatif sangat kecil.

Produksi perikanan di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Perikanan tangkap pada Tahun 2011 menghasilkan ikan sebanyak 28.830 ton, dan meningkat menjadi 38.591 ton pada Tahun 2013, kemudian menurun menjadi 22.653 ton pada Tahun 2014 dan sedikit meningkat menjadi 26.710 ton pada Tahun 2015. Ada beberapa faktor penyebab belum maksimalnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pati, antara lain yang pertama adalah belum tersedianya dermaga pelabuhan ikan yang memadai. Selama ini, dermaga pelabuhan ikan di Juwana yang merupakan pelabuhan paling ramai, merupakan pelabuhan yang berada di muara Sungai Juwana. Antara kapasitas pelabuhan dan kapal yang ada sangat tidak ideal, sehingga banyak kapal-kapal khususnya yang berkapasitas besar tidak dapat masuk ke pelabuhan untuk pelelangan ikan serta banyaknya antrean kapal yang ingin mendarat di pelabuhan sehingga banyak kapal yang akhirnya beralih ke pelabuhan lain atau bahkan melakukan pelelangan di tengah laut. Hal ini secara ekonomis, merugikan bagi daerah, terutama terkait pemasukan retribusi ikan dari hasil pelelangan di pelabuhan. Kendala kedua adalah adanya perubahan peraturan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan tentang larangan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang selama ini lazim digunakan oleh para nelayan, khususnya alat tangkap ikan yang ada di kapal-kapal besar. Hal ini butuh penyesuaian dari para nelayan untuk bisa memahami adanya peraturan baru tersebut, karena hal tersebut ditujukan untuk menjaga kelestarian biota laut (konservasi) yang dapat menunjang keberlangsungan produksi perikanan laut. Memang dalam jangka pendek, sangat berdampak pada produksi tangkapan, dan jangka panjang akan bermanfaat dalam menjaga kontinuitas produksinya. Pemerintah daerah dalam hal ini juga diharapkan ikut berperan memberikan pemahaman bagi

masyarakat nelayan di daerah, khususnya pemahaman tentang tujuan usaha perikanan laut yang lebih besar dan berorientasi pada masa depan.

Tabel 2.47
Produksi Perikanan di Kabupaten Pati
Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Perikanan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perikanan Tangkap (ton/tahun)	28.830	32.474	38.591	22.653	26.710
2	Perikanan Budi Daya (ton/tahun)	39.639	42.819	28.954	36.507	39.195

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2015

Kendala produksi perikanan tangkap yang berdampak pada penurunan hasil produksi sebagaimana pada paragraph di atas harus segera ditangani. Pembangunan pelabuhan yang memadai yang memungkinkan untuk sandarnya kapal-kapal ikan secara keseluruhan dapat menjadi salah satu jawaban yang paling logis untuk jangka pendek. Karena ini yang merupakan masalah urgen yang harus segera ditangani.

Disamping perikanan tangkap, Kabupaten Pati juga memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar, baik budidaya tambak air payau maupun air tawar. Ada kecenderungan produksi ikan budidaya yang relative fluktuatif, terutama pada periode tahun 2011-2013. Data lengkap sebagaimana Tabel 2.51. Namun sejak 2013-2015 terus meningkat. Dari 28.954 ton pada Tahun 2013, meningkat menjadi 39,195 ton pada Tahun 2015. Masih banyak kesempatan guna terus meningkatkan produksi perikanan budidaya, mengingat masih banyak areal-areal tambak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama di wilayah-wilayah potensial tambak seperti Kecamatan Juwana, Batangan, Trangkil dan Tayu. Kendala utama yang dihadapi oleh para pembudidaya adalah terkait daya dukung lingkungan tambak yang makin menurun. Kualitas lingkungan sebagai akibat aktivitas manusia yang cenderung merusak lingkungan sangat merugikan bisnis perikanan tambak. Banyak tambak-tambak yang tidak berfungsi karena tidak dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Kendala yang kedua adalah ancaman bencana banjir. Hampir tiap tahun, kantong-kantong penghasil ikan budidaya merugi dan produksinya merosot tajam karena tambak yang hancur oleh bencana banjir. Hambatan berikutnya adalah adanya fenomena elnino sebagaimana yang dirasakan oleh para pembudidaya ikan pada Tahun 2015. Elnino yang berdampak pada kekeringan berkepanjangan sangat berpengaruh pada suhu lingkungan dan suplai air sehingga sangat mengganggu proses budidaya ikan.

2. Pariwisata

Industri pariwisata merupakan salah satu jenis lapangan usaha yang terbukti secara empiris mampu mengangkat perekonomian suatu wilayah. Banyak daerah-daerah yang minim sumber daya alam, namun karena

mampu mengelola sumber daya yang minim tadi secara baik, dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Bahkan sektor pariwisata dianggap menjadi lokomotif yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor yang lain, termasuk diantaranya sektor usaha UMKM.

Wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari daratan (dataran rendah) dan pegunungan menyediakan berbagai keindahan panorama alam. Wilayah barat laut menyediakan keindahan pemandangan pegunungan (Lereng Gunung Muria sebelah timur), wilayah utara berupa panorama pantai dan laut yang membentang dari barat ke timur sepanjang ±60 km. Wilayah tengah banyak terdapat berbagai daya tarik berupa atraksi-atraksi seni-budaya, kegiatan ritual keagamaan di makam-makam tokoh agama islam, tempat hiburan (kolam renang, situs peninggalan sejarah, dll). Sedangkan wilayah selatan sekitar pegunungan karst (kapur) banyak menyimpan potensi wisata seperti goa, pemancingan ikan air tawar, atraksi budaya dan kesenian.

Jumlah obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati hingga Tahun 2015 sebanyak 23 obyek, berupa wisata alam, wisata religi dan wisata buatan. Dan akan segera diramaikan pula dengan adanya pasar produk unggulan daerah Kabupaten Pati (Pasar Pragola) yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yaitu sebagai wisata belanja.

Jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah obyek-obyek wisata yang ada, ada kecenderungan peningkatan per tahun. Pada Tahun 2011, jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 830.834 orang dan sedikit menurun pada Tahun 2012 menjadi 820.663 orang. Namun sejak 2013, jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2014 yang mencapai 1.209.324 wisatawan dan pada Tahun 2015 diprediksikan sebanyak 1.274.682 wisatawan.

Tabel 2.48
Jumlah Obyek Wisata dan Kunjungan Wisata
Kabupaten Pati Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah obyek wisata	21	21	23	23	23
2	Jumlah kunjungan wisata	830.834	820.663	1.147.318	1.209.324	1.274.682

Sumber : RIPPDA Kabupaten Pati Tahun 2015

Upaya pembangunan/pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati akan terus ditingkatkan. Hal ini untuk mensinergikan dengan kebijakan pengembangan pariwisata pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maupun Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi eksisting obyek wisata di Kabupaten Pati saat ini memang belum dikelola secara optimal. Beberapa kendala dalam pengembangannya antara lain adalah infrastruktur khususnya jalan, fasilitas obyek wisata,

masih minimnya keterlibatan pelaku wisata, dan belum adanya regulasi/kebijakan yang khusus mengawal pembangunan pariwisata secara intensif dan terpadu.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, sektor pariwisata yang maju dan dikelola secara profesional, ternyata memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian baik dari segi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menjadi media promosi dan pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah (UMKM) serta menjadi ajang pertukaran pengalaman/pengetahuan dan budaya antara penduduk setempat dengan wisatawan.

Guna mendukung pembangunan/pengembangan pariwisata daerah menjadi lebih maju dan terkenal, Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan beberapa upaya antara lain :

- Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan pariwisata regional Pakudjembara (Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora) dan telah memiliki *roadmap* pengembangan wisata integral di 6 (enam) wilayah kabupaten pengembangan wisata;
- Pendirian *tourism information centre (TIC)* sebagai ujung tombak promosi dan pengenalan daya tarik obyek wisata daerah;
- Adanya *masterplan* atau Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pati Tahun 2015-2030;
- Akan disusunya peraturan daerah (perda) tentang pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Pati;
- Dan berbagai kemudahan dalam perijinan dalam investasi di sektor pariwisata.

Dengan telah tersedianya perda pembangunan/pengembangan pariwisata, dapat memudahkan untuk fokus mengarahkan/mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada sektor pariwisata secara intensif dan berkelanjutan.

3. Pertanian

a. Produksi Pertanian

Kabupaten Pati merupakan daerah agraris dimana sebagian besar wilayahnya (\pm 85% dari total wilayah administrasi) berupa sawah, tegal, perkebunan, hutan, tambak dan daerah perairan umum (rawa) lainnya. Anugerah alam yang luar biasa tersebut bila dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan hasil guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah perdesaan yang mayoritas bermatapenca-harian sebagai petani. Produksi hasil pertanian Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49
Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2014

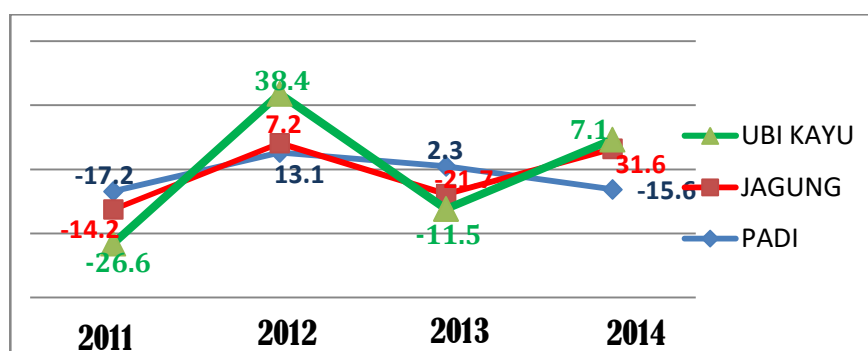
1	Komoditas	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Padi (ton)	509,117	575,905	589,202	497,071
2	Jagung (ton)	114,296	122,574	96,028	126,411
3	Kedelai (ton)	3,827	3,186	3,988	3,058
4	Ubi Kayu (ton)	567,777	786,009	695,460	744,746
5	Ubi Jalar (ton)	1,787	2,550	1,184	2,122
6	Kacang Tanah (ton)	3,473	4,062	5,040	4,584
7	Kacang Hijau (ton)	16,171	17,524	12,510	12,748

Sumber : Data Strategis Kabupaten Pati Tahun 2015

Produksi padi Kabupaten Pati tahun 2012-2014 terus mengalami penurunan hingga menjadi -15,6% (Grafik 2.21). Sedangkan jagung dan ubi kayu dari tahun 2011-2014 cenderung berfluktuatif. Penurunan produksi padi, memang lebih disebabkan oleh adanya kendala alam khususnya bencana banjir dan masalah serangan hama tikus.

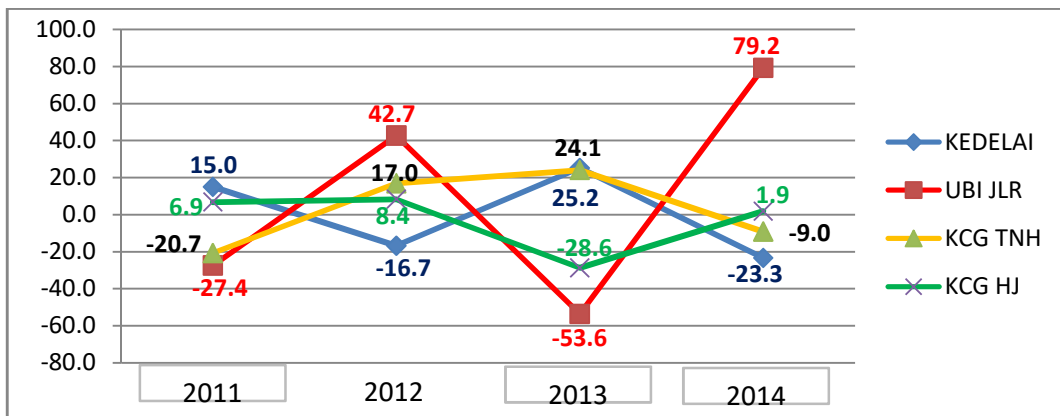
Bencana banjir yang banyak menyebabkan kerugian yang sangat besar di sektor pertanian tanaman pangan, relatif lebih sulit ditanggulangi karena harus melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta kebutuhan anggaran yang sangat besar. Perlu adanya dukungan, komitmen dan koordinasi yang intensif dari berbagai pemangku kepentingan serta masyarakat luas guna menangani masalah tersebut.

Rusaknya ekosistem yang menjadi rantai makanan bagi predator alami pemangsa tikus juga mendorong terjadinya kerusakan tanaman padi sehingga sangat mengganggu hasil produksi pertanian. Selain itu, penggunaan pestisida yang kurang tepat justru dapat menjadikan hama wereng semakin resistan terhadap jenis pembasmi serangga tersebut dan juga dapat merusak habitat sawah yang mendukung terwujudnya *simbiosis mutualisma* yang menguntungkan bagi usaha pertanian. Komoditas padi yang merupakan unggulan produk pertanian Kabupaten Pati perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius karena memiliki peran yang sangat strategis baik dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan maupun dalam rangka menumbuhkan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.



Sumber : Data Strategis Kabupaten Pati Tahun 2015

Grafik 2.21
Laju Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

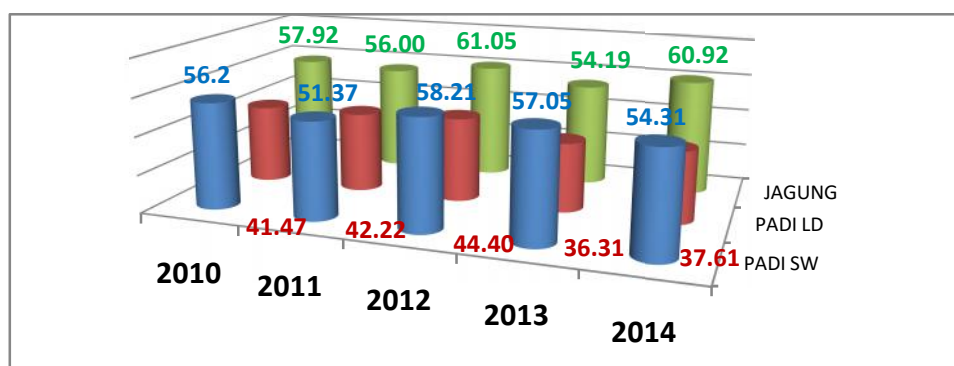


Sumber : Data Strategis Kabupaten Pati Tahun 2015

Grafik 2.22
Laju Kedelai, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

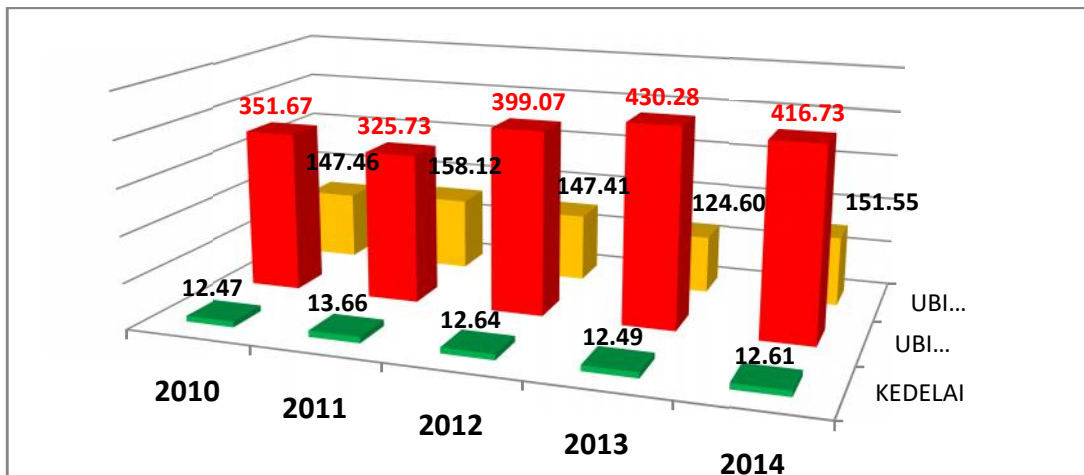
Momen peningkatan produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau tahun 2013-2014, perlu terus diupayakan dan ditingkatkan, karena memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya diversifikasi pangan beragam dan juga dapat menjadi *supplier* bagi industri olahan berbasis produk pertanian. Demikian pula dengan produksi kedelai dan kacang tanah yang cenderung menurun, harus menjadi perhatian untuk terus dipacu, karena memang juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan industri pengolahan makanan di Kabupaten Pati.

Pemanfaatan teknologi kultivasi dan penggunaan bibit unggul merupakan satu keniscayaan guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan ditengah kisaran permasalahan semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian. Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian terbaru, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak akademisi maupun lembaga penelitian untuk melakukan *research and development* (R & D) bidang pertanian.



Sumber : BPS, Data Strategis Kab. Pati 2015

Grafik 2.23
Tren Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Jagung
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014



Sumber : BPS, Data Strategis Kab. Pati 2015

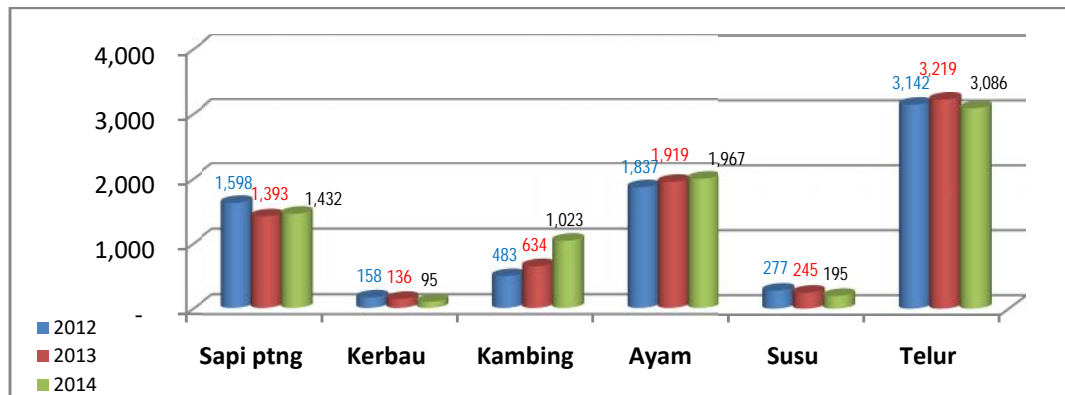
Grafik 2.24
Tren Produktivitas Kedelai, Ubi Kayu dan Ubi Jalar
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

Alih fungsi lahan yang kian mengancam keberadaan usaha pertanian akan sangat berdampak pada ketersediaan lahan budidaya, sehingga pada akhirnya menurunkan suplai lokal terhadap kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat maupun sebagai penyedia bahan baku bagi industri hilir yang banyak berdiri di wilayah Kabupaten Pati.

Mengacu pada konsep pembangunan spasial ekonomi, keberadaan sektor hulu (*on farm industry*) yang berkelanjutan, dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri manufaktur (*off farm industry*) yang menghasilkan produk lanjutan hasil pertanian. Terwujudnya kondisi seperti ini secara industri dapat mendorong : 1) pengembangan industri inti, industri-industri terkait, industri pendukung dan jasa-jasa lainnya secara bersama-sama; 2) usaha kerjasama untuk menciptakan efisiensi kolektif; 3) Peluang investasi usaha pada jenis industri pendukung dan terkait; dan 4) Iklim usaha yang kondusif.

b. Peternakan

Sementara produksi pada sub sektor peternakan sebagai pendukung kebutuhan protein hewani, ada beberapa komoditas yang masih membutuhkan penanganan lebih guna menjamin ketersediaannya, khususnya daging kerbau, susu dan telur.



Sumber : BPS, Data Strategis Kab. Pati 2015

Grafik 2.25
Produksi Subsektor Peternakan (ton)
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2014

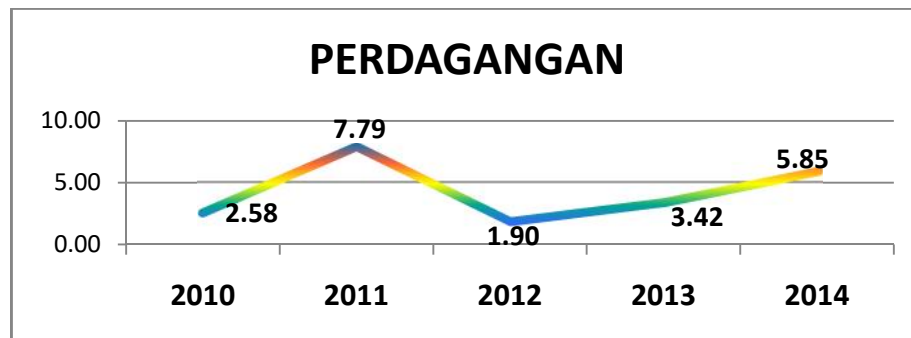
Sebagaimana grafik 2.25 selama tahun 2012-2014, produksi ternak guna mencukupi konsumsi masyarakat, suplai daging sapi, kambing dan ayam cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan suplai daging kerbau, susu sapi dan telur ayam cenderung menurun.

Produksi peternakan sebagai salah satu suplai kebutuhan protein bagi masyarakat lokal, sebisa mungkin diusahakan untuk dipenuhi dari produk peternakan setempat. Hal ini mengingat bahwa wilayah Kabupaten Pati, dari sisi suplai bahan pakan ternak cukup melimpah, angka kesakitan ternak juga dapat terus ditekan, tersedianya lahan budidaya yang masih memadai, sehingga sangat dimungkinkan untuk mendukung upaya swasembada ternak. Kendala-kendala yang ada dapat diidentifikasi di awal yang kemudian dapat dicarikan solusi baik kendala dari segi penyediaan bibit unggul, teknologi pengembangbiakan ternak, pakan ternak, resiko penyakit ternak permodalan, dan lain-lain hingga masalah pemasaran. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait yang lebih luas baik kerjasama antar stakeholder dalam daerah maupun kerjasama antar daerah. Semua bergantung pada komitmen, kesungguhan dan konsistensi dari semua pihak guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan, sebagaimana yang telah menjadi tujuan nasional di bidang kedaulatan pangan.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan (perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2012, setelah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,90%. Semakin membaiknya iklim usaha di wilayah Kabupaten Pati dapat mendorong volume transaksi perdagangan. Sektor perdagangan masih memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2012, bahkan hingga 2014 pertumbuhan perdagangan mencapai 5,85% yang melebihi pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 4,54%. Faktor eksternal

perekonomian tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan transaksi perdagangan di Kabupaten Pati.



Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Grafik 2.26
Pertumbuhan Perdagangan
Kabupaten Pati 2010 – 2014

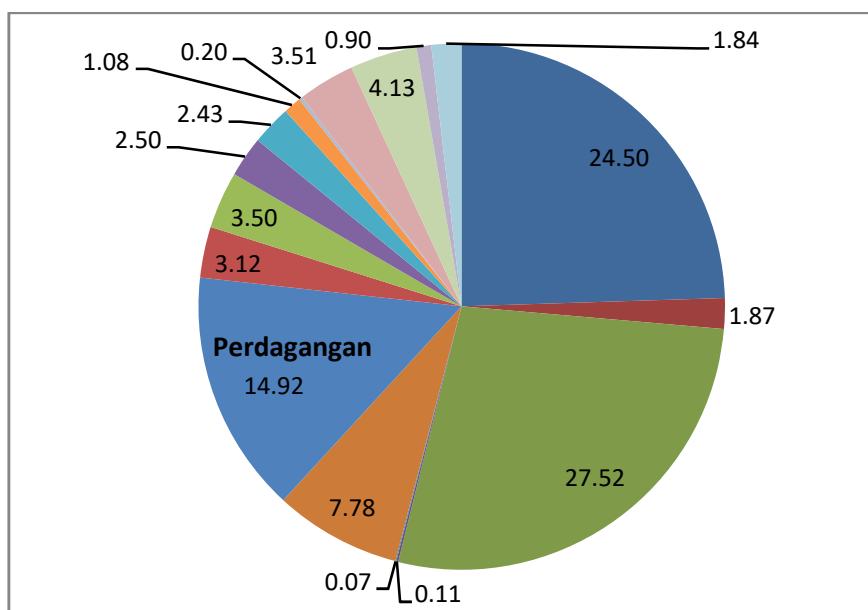
Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pati, sektor perdagangan mengalami sedikit penurunan khususnya sejak 2012 hingga 2014, baik mengacu pada PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2010). Besarnya kontribusi sektor ini masuk pada tiga besar sektor yang paling dominan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Pati dibawah sektor manufaktur dan sektor pertanian.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2014

Tahun	ADHB			ADHK 2010		
	Nilai Total PDRB (Rp.Milyar)	Nilai Sektor Perdagangan (Rp. Milyar)	Kont. (%)	Nilai Total PDRB (Rp. Milyar)	Nilai Sektor Perdagangan (Rp. Milyar)	Kont. (%)
2010	18,782.53	2,893.96	15.41	18,782.53	2,893.96	15.41
2011	21,048.73	3,294.91	15.65	19,893.32	3,119.40	15.68
2012	23,325.05	3,414.41	14.64	21,072.32	3,178.82	15.09
2013	25,861.06	3,655.91	14.14	22,314.76	3,287.46	14.73
2014	28,417.10	4,009.97	14.11	23,327.07	3,479.93	14.92

Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Berikut adalah distribusi persentase lapangan usaha terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2014 berdasarkan atas dasar harga konstan 2010.

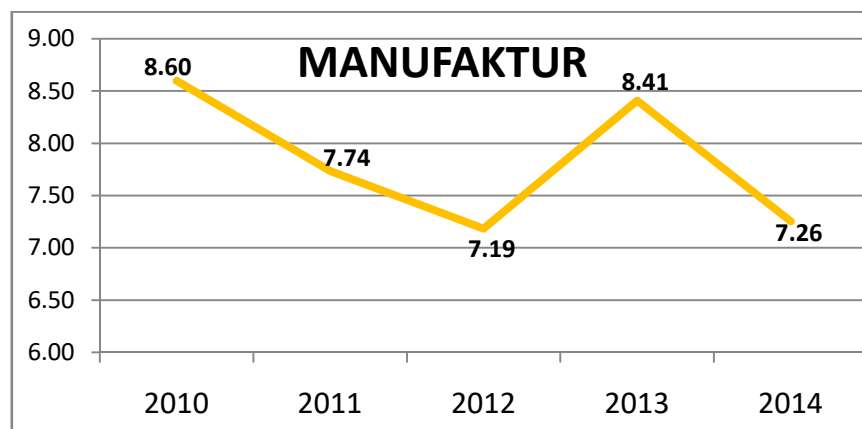


Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Grafik 2.27
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Pati Tahun 2014

5. Perindustrian

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2010-2014, industri manufaktur (pengolahan) Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,60% dan tahun 2013 sebesar 8,41%. Sedangkan 3 (tiga) tahun yang lain memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4%.



Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Grafik 2.28
Pertumbuhan Industri Manufaktur
Kabupaten Pati 2010 - 2014

Sementara kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pati juga terus mengalami peningkatan (PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010). Sumbangan industri pengolahan dari 25,45% pada tahun 2010, menjadi sebesar 27,52% pada tahun 2014. Demikian pula tren kontribusi industri pengolahan selalu naik bila

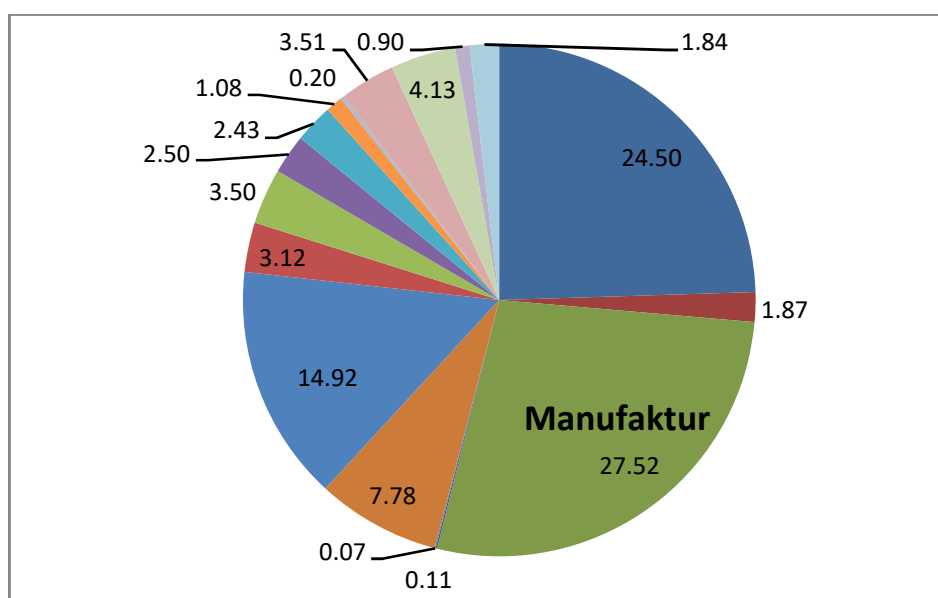
ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku. Berikut data distribusi persentase yang merupakan gambaran seberapa besar kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebagaimana tabel 2.55.

Tabel 2.51
Distribusi Persentase Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2014

Tahun	ADHB			ADHK 2010		
	Nilai Total PDRB (Rp.Milyar)	Nilai Sektor Industri (Rp.Milyar)	Kont. (%)	Nilai Total PDRB (Rp.Milyar)	Nilai Sektor Industri (Rp.Milyar)	Kont. (%)
2010	18,782.53	4,780.70	25.45	18,782.53	4,780.70	25.45
2011	21,048.73	5,481.49	26.04	19,893.32	5,150.50	25.89
2012	23,325.05	6,147.89	26.36	21,072.32	5,520.58	26.20
2013	25,861.06	6,990.56	27.03	22,314.76	5,984.88	26.82
2014	28,417.10	7,933.11	27.92	23,327.07	6,419.10	27.52

Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Sedangkan distribusi persentase lapangan usaha yang menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor atau lapangan usaha terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2014 berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 sebagaimana grafik 2.29.



Sumber :BPS, PDRB Kab. Pati 2010-2014

Grafik 2.29
Kontribusi Sektor Manufaktur PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Pati Tahun 2014

Keterkaitan industri manufaktur dengan sektor pertanian di Kabupaten Pati telah membentuk rantai nilai yang saling menguntungkan. Industri pengolahan berbasis pertanian (*agroindustry*) ini terus berkembang sehingga interaksi positif ini perlu didorong oleh pemerintah daerah. Pengembang industri pengolahan berbasis sumber daya lokal akan mampu mendongkrak daya saing produk karena input produksinya dapat dipenuhi dari wilayah setempat, sehingga efisiensi

produksi bisa mudah dicapai. Corak industri pengolahan berbasis produk pertanian pada umumnya banyak menyerap tenaga kerja (bersifat *labour intensives*) dan ini bisa diperoleh dari lingkungan sekitar industri tersebut. Inilah salah satu *multiplier effect* yang dihasilkan dari tumbuhnya sektor manufaktur. Disamping itu tentunya akan meningkatkan pula pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi bagi daerah.

Pertumbuhan industri manufaktur di Kabupaten Pati juga didorong oleh semakin berkembangnya manufaktur berbasis logam dan non logam. Manufaktur berbasis logam lebih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Juwana dan sekitarnya seperti perusahaan kerajinan dan *sparepart* otomotif/perkapalan berbahan kuningan. Sedangkan manufaktur non logam seperti batik, konveksi dan lain-lain banyak tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan desa.

6. Transmigrasi

Jumlah transmigran yang dikirim dari Kabupaten Pati dalam empat tahun terakhir terus mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52
Capaian Pengiriman Transmigran Kabupaten Pati
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Calon Transmigran (KK)	Jumlah Pemberangkatan/ Penempatan (KK)	Persentase
1	2012	94	30	31,91
2	2013	35	10	28,57
3	2014	30	4	13,33
4	2015	24	5	20,83
5	2016	14	5	35,71

Sumber : Disosnakertrans Kab. Pati 2016

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Makanan Per Kapita

Pola konsumsi makanan penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Masih besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok karena pendapatan penduduk yang rendah. Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2015 mencapai 345.560 rupiah atau 45,57% dari total pengeluaran sebulan. Dari angka tersebut yang paling banyak adalah untuk makanan dan minuman jadi sebesar 26,87%, sedangkan yang terkecil adalah untuk umbi-umbian sebesar 0,47%. Secara lengkap distribusi pengeluaran rata-rata konsumsi makanan per kapita tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Makanan per Kapita
Di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Rata-rata pengeluaran konsumsi (Rp)	221.100	235.723	268.420	296.159	345.560
B.	Distribusi pengeluaran konsumsi (%)					
1	Padi-padian	20,2	20,33	18,68	17,39	17,47
2	Umbi-umbian	0,43	0,33	0,3	0,26	0,47
3	Ikan/ udang/ cumi/ kerang	8,13	8,06	8,65	8,68	8,17
4	Daging	2,42	2,24	2,16	2,36	3,36
5	Telur dan susu	5,42	5,89	5,89	5,7	6,30
6	Sayur-sayuran	8,12	7,12	8,47	7,26	6,33
7	Kacang-kacangan	3,44	3,31	3,38	3,28	2,60
8	Buah-buahan	5,08	4,52	4,58	5,18	5,37
9	Minyak dan Lemak	3,96	3,79	3,31	3,47	3,19
10	Bahan Minuman	3,59	3,66	3,36	2,91	3,39
11	Bumbu-bumbuan	3,44	3,13	2,88	2,81	3,20
12	Konsumsi lainnya	2,08	1,7	1,55	1,63	2,14
13	Makanan dan minuman jadi	23,48	24,71	25,18	27,73	26,87
14	Tembakau dan sirih	10,21	11,21	11,63	11,34	11,14
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pati 2016

2. Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan, maka relatif semakin tinggi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non makanan. Hal ini terjadi pada masyarakat modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersier sudah mulai terpenuhi. Pada tahun 2015, pengeluaran sebulan untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Pati sebesar 412.780 rupiah atau 54,43% dari total pengeluaran. Tiga pengeluaran tersebut dari yang paling besar berturut-turut adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa serta barang tahan lama yaitu masing-masing sebesar 38,07%, 24,64% dan 20,23%. Perkembangan pola konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Pati selama tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Non-Makanan per Kapita
Di Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Rata-rata pengeluaran konsumsi (Rp)	197.253	202.586	253.696	273.378	412.780
B.	Distribusi pengeluaran konsumsi (%)					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	35,34	34,49	33,5	34,92	38,07
2	Barang dan jasa	35,61	42,58	41,93	40,3	24,64
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	6,65	6,77	5,02	5,16	4,59
4	Barang-barang yang tahan lama	11,44	11,06	12,91	10,15	20,23
5	Pajak dan asuransi	3,6	3,66	4,18	3,64	3,63
6	Keperluan pesta dan upacara	7,36	1,44	2,46	5,82	8,85
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pati 2016

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan rasio indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani, sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (*farm gate price*), sedangkan indeks harga yang dibayar petani, sebagai indeks harga konsumen, merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (*retail price*).

Dari angka NTP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

Tabel 2.55
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pati

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks yang diterima petani (It)	144,06	151,52	141,56	111,73	119,80
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	134,58	145,41	134,87	111,15	119,16
3.	NTP	107,05	104,20	105,16	100,16	100,54

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016

Nilai tukar petani di Kabupaten Pati bisa dilihat dari tabel 2.59, dimana pada tahun 2013 nilai tukar petani memperlihatkan kenaikan

dibandingkan tahun 2012 namun menurun lagi pada tahun 2014 dan sedikit meningkat pada tahun 2015.

4. Fasilitas Wilayah

Aspek ini digambarkan dengan rasio panjang jalan dengan banyaknya kendaraan yang melewatinya. Perkembangan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Pati sebagaimana terlihat pada tabel 2. 56 dari tahun 2011 – 2015 semakin kecil dari 0,30 menjadi 0,21. Dampak langsung yang dirasakan adalah di beberapa wilayah terjadi kepadatan lalu lintas terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja karena pertumbuhan jumlah kendaraan lebih tinggi dari penambahan panjang jalan.

Tabel 2.56
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

Tahun	Panjang Jalan (km)	Banyak Kendaraan (unit)	Rasio (%)
2011	954,115	314.301	0,30
2012	954,115	349.873	0,27
2013	954,115	392.937	0,24
2014	954,115	423.110	0,23
2015	973,677	459.373	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2012-2016

5. Sumberdaya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2012 – 2016 semakin menurun yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.57. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang.

Tabel 2.57
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	295.567	287.942	285.849	283.784	280.046
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	95.098	99.550	102.318	105.405	108.964
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	390.665	387.492	388.167	389.189	389.010
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	816.734	830.524	837.427	843.723	850.979
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,478	0,467	0,464	0,461	0,457

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2013-2017 (diolah)

b. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Perbaikan ekonomi mempunyai pengaruh pada penduduk yang bekerja menurut pendidikan. Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya manusianya. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama lima tahun terakhir masih didominasi lulusan SD ke bawah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD ke bawah	329.920	300.606	303.173	314.108	328.702
2	SMP	107.143	106.611	118.671	117.380	117.032
3	SMA	122.154	112.467	127.644	129.856	122.610
4	D I/II/III dan Universitas	43.886	42.803	45.248	46.589	48.955
Jumlah		603.103	562.487	594.736	607.933	617.299

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2012 – 2016

c. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pada tabel 2.59 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Pati menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha rumpun pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.59
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Pati
Tahun 2011 – 2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015
1	219.168	183.798	243.078	237.884	189.608
2	86.063	86.086	70.887	76.296	100.755
3	130.331	122.901	115.647	131.496	140.024
4	95.230	92.098	106.815	77.815	102.154
5	72.312	77.604	58.309	84.381	84.758
JUMLAH	603.103	562.487	594.736	607.933	617.299

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2012-2016

Catatan : 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

2. Industri Pengolahan

3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel

4. Jasa Kemasyarakatan

5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

2.2.1. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 target indicator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
I Pendidikan Dasar							
1.	APK SD/MI/Paket A (%)	114,07	114,07	112,16	112,8	112,8	▼
2.	APM SD/MI/Paket A (%)	99,50	99,25	99,46	99,9	99,9	■
3.	APK SMP/MTs/Paket B (%)	98,96	98,92	99,38	100,14	100,14	■
4.	APM SMP/MTs/Paket B (%)	79,25	78,6	78,83	80,84	80,84	■
5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,025	0,030	0,03	0,04	0,04	▼
6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,02	0,1	0,17	0,18	0,18	▼
7.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,5	99,3	99,99	100	100	■
8.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,04	98,93	99,85	99,67	99,67	■
9.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,85	99,81	100,89	123,9	123,9	■
10.	Rasio guru/murid SD/MI	1:9	1:10	1:13	1:11	1:11	▼
11.	Rasio guru/murid SMP/MTs.	1:9	1:09	1:11	1:11	1:11	▼
12.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	80	70	63,41	62,39	62,39	▼
II Pendidikan Menengah							
13.	APK SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	69,9	65,97	55,37	60,72	60,72	▼
14.	APM SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	39,5	38,8	39,91	42,11	42,11	■
15.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,4	0,5	0,56	1,04	1,04	▼
16.	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	98,8	98,65	99,85	99,96	99,96	■
17.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	85	82,61	84,76	91,83	91,83	■
18.	Rasio Guru terhadap Murid	1:9	1:09	1:11	1:10	1:10	▼
III Pendidikan Anak Usia Dini							
17.	Pendidika Anak Usia Dini (0-6 tahun) (%)	40	36,85	26,43	29,92	29,92	▼
IV Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
18.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	80	74,73	77,77	85,95	85,95	■
V Pendidikan Non Formal							
19.	Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%)	10	9	8,5	8,6	8,6	▼
20.	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A (%)	100	99	98,5	99	99	■
21.	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B (%)	100	98,4	97,5	98	98	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 10 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, 1

indikator diharapkan bisa mencapai target sampai akhir periode RPJMD sedangkan 12 indikator memerlukan upaya keras agar pada akhir periode RPJMD bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 28 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Capaian Indikator Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Angka Usia Harapan Hidup	71,95	71,69	75,43	75,43	75,43	■
2.	Persentase balita gizi buruk	0,00	0,02	0,1	0,08	0,08	▼
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	90,62	83,33	83,33	▼
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100	100	79,00	93,40	93,40	▼
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100	100	99	100	100	▶
6.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	▶
7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	■
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	■
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	99,31	99,31	99,31	▼
10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	100	100	99,32	97,86	97,86	▼
11.	Cakupan puskesmas (%)	15	15	72,50	72,50	72,50	■
12.	Cakupan pembantu puskesmas (%)	5	5	41,7	41,7	41,7	■
13.	Kematian Ibu (kasus)	16	18	17	21	21	▼
14.	Kematian Bayi (kasus)	165	170	178	167	167	▶
15.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	100	100	93,68	91,47	91,47	▼
16.	Cakupan pertolongan tenaga kesehatan (%)	100	100	100,94	93,40	93,40	▼
17.	Cakupan pelayanan nifas (%)	100	100	101,98	92,97	92,97	▼
18.	Cakupan makanan pendamping ASI pada bayi GBM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin (%)	90	85	4,08	9,28	9,28	▼
19.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	64	64	▼
20.	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	1	1	100	100	100	■
21.	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	100	100	100	100	▶
22.	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (%)	75	65	100	100	100	■
23.	Angka CDR-TB (%)	90	89	48,63	60	60	▼

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
24.	Angka kesembuhan TB paru (%)	100	100	86,21	86	86	▼
25.	Angka penemuan diare yang tertangani (%)	100	100	100	99,19	99,19	▼
26.	CFR DBD (per 10.000 penduduk)	<2%	<2%	0,40%	0,40%	0,40%	■
27.	Angka kesembuhan DBD (%)	100	100	99,6	100	100	▶
28.	Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%)	100	100	100	100	100	▶

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai, 6 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 14 target indikator berstatus perlu upaya keras.

3) Pekerjaan Umum

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	65	57	50	54,79	54,79	▼
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) (per satuan penduduk (%)	70,00	60	8	8,94	8,94	▼
3.	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	812,7	780,5	781,2	825,33	825,33	■
4.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	20	30	3	0	0	■
5.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tersumbat (%)	85	79	43,04	54	54	▼
6.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	85	75	0	0	0	▼
7.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	85	77	57	78	78	▶
8.	Lingkungan permukiman kumuh (%)	6,5	7,8	0,01	11	11	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017,

sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 5 target indikator berstatus perlu upaya keras.

4) Perumahan

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Urusan Perumahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	85	75	76,06	13	13	▼
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	97	90	99,68	99,68	99,68	■
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	95	83	71	71	71	▼
4.	Rumah layak huni (%)	96	92	71	74	74	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 3 target indikator berstatus perlu upaya keras.

5) Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Luas RTH perkotaan (ha)	30	15	NA	NA	76,3	76,3	■
2.	Luas wilayah produktif (ha)	120.485	120.485	120.485	120.485	120.485	120.485	■
3.	Luas wilayah industri (ha)	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	■
4.	Luas wilayah kebanjiran (ha)	250	305	NA	NA	61.074	61.074	▼
5.	Luas wilayah kekeringan (ha)	55	82	NA	22.480	NA	NA	▼
6.	Luas wilayah perkotaan (ha)	12.925	12.895	NA	NA	5.877	5.877	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 3 target indikator berstatus perlu upaya keras.

6) Perencanaan Pembangunan

Kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKP			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	■
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	■
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	▸
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKP	ada	ada	ada	ada	ada	ada	▸

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▸ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai.

7) Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Urusan Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKP			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	373.575	373.500	373.250	373.220	373.165	373.165	▼
2.	Rasio ijin trayek	0,90	0,9	0,4	0,41	0,42	0,42	▼
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	12.200	11.600	11.000	12.050	11.965	11.965	▸
4.	Jumlah terminal tipe C (unit)	4	3	2	2	2	2	▼
5.	Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%)	70	70	60	60,39	60,74	60,74	▼
6.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (000)	3.183,7	3.182,4	NA	NA	NA	NA	▼
7.	Jumlah barang/orang melalui terminal pertahun (000)	2.649	2.448	NA	NA	NA	NA	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▸ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus akan tercapai sedangkan 6 target

indikator berstatus perlu upaya keras. Banyaknya target indikator yang belum bisa dicapai dipengaruhi oleh menurunnya arus penumpang angkutan umum karena perubahan perilaku pengguna jasa angkutan penumpang umum yang beralih dari sarana angkut (moda) umum ke moda pribadi baik sepeda motor maupun mobil pribadi. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian jaminan akan kehandalan/ tepat waktu dari tempat asal sampai dengan tujuan akhir perjalanan.

8) Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penanganan sampah (%)	100	98	78	78	98	98	▶
2.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85	70	57,5	76	76,06	76,06	▶
3.	Pencemaran status mutu air	25	35	40	35	35	35	▶
4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	80	65	55	60	65	65	▶
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	60	45	35	40	45	45	▶
6.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	50	35	18	26	35	35	▶
7.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	35	20	10	17	20	20	▶
8.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	80	65	65	80	80	▶

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, seluruh 8 target indikator berstatus akan tercapai.




9) Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Urusan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	20	19,4	NA	80,44	79,82	79,82	
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	NA	100	100	100	

Keterangan :








 Telah tercapai;  Akan Tercapai;  Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator berstatus akan tercapai.




10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	75	65	61	70,4	70,4	
2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	90	80	94	90	90	
3.	Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP	90	80	83	93	93	
4.	Persentase kepemilikan AKTA Kelahiran	90	85	87	87,8	87,8	
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
6.	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK	21	21	21	21	21	
7.	Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pati	100	100	100	100	100	

Keterangan :

 Telah tercapai;  Akan Tercapai;  Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 4 target indikator berstatus akan tercapai.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	8	5	47	47,97	48,14	48,14	
2.	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	20	20	21,95	21,95	16	16	
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,31	51,31	90,95	88,56	90,97	90,97	
4.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah vokal point yang terbentuk (unit)	22	22	22	22	22	22	
6.	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (unit)	22	22	22	22	22	22	
7.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%)	100	99,5	98,23	85,74	99,98	99,98	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1,05	1,1	1,99				
2.	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,40	80,25	82,47	81,8	81,39	81,39	
3.	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS	90	88	82,81	83,14	82,73	82,73	
4.	Rasio PLKB dengan desa/kelurahan	1/2	1/2	1/5	1/5	1/5	1/5	
5.	Persentase keluarga Prasejahtera/Sejahtera I	40	45	53,86	50,92	53,01	53,01	
6.	Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%)	2,25	2,4	2,96	2,71	2,9	2,9	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 5 target indikator berstatus perlu upaya keras.

13) Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	38	38	38	38	38	
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,10	0,09	0,16	0,17	0,17	
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	0,34	0,28	0,39	0,43	0,43	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator berstatus akan tercapai.

14) Ketenagakerjaan

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	2,18	2,18	0,72	0,67	0,67	
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,40	73,01	68,91	67,83	67,83	
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	3.091	2.555	2.400	2.400	2.400	
4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,6	6,77	6,37	4,43	4,43	
5.	Keselamatan dan perlindungan	98	98	97	97	97	
6.	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja	7	7	6	6	6	
7.	Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja	1,78	1,08	0,24	1,42	1,42	
8.	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan	100	100	100	87,5	87,5	

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
9.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	83	79	85	74	74	
10.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	100	100	100	100	100	
11.	Jumlah bursa tenaga kerja	44	34	23	23	23	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 7 target indikator berstatus perlu upaya keras.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Capaian Indikator Urusan Usaha Kecil Menengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Persentase Koperasi Aktif (%)	100	100	100	75	75	
2.	Persentase Koperasi Sehat (%)	50	40	80	75	75	
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%)	30	20	80	98,76	98,76	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator berstatus akan tercapai.

16) Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17	14	38	92	92	■
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (M. rupiah)	1.060	1.043	1.223,3	11.422.734	11.422.734	■
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	4.100	3.150	7.055	21.469	21.469	■
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	4,6	4	51	423,63	581,56	■

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017 dapat dikatakan bahwa kinerja urusan penanaman modal sangat baik karena seluruh target indikator berstatus telah tercapai.

17) Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	7	20	14	14	■
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	140	140	205	205	205	■
3.	Jumlah grup kesenian (kelompok)	72	72	108	183	183	■
4.	Jumlah gedung kesenian (unit)	1	1	1	1	1	■
5.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7	6	5	5	5	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, dan 1 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

18) Pemuda dan Olah Raga

Kinerja penyelenggaraan urusan pemuda dan olah raga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Capaian Indikator Urusan Pemuda dan Olah Raga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKP		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	31	28	18	26	26	▼
2.	Jumlah organisasi olahraga (klub)	23	22	28	920	920	■
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	9	7	7	6	6	■
4.	Gelandang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	1	0	2	2	▼
5.	Lapangan olah raga	4	3	1	1	1	▼
6.	Jumlah gedung olah raga	4	4	1	1	1	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 4 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKP		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	80	60	52	58	58	▼
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	85	55	61	65	65	■

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, 1 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 13 target

indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Capaian Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3	2	1,46	1,34	1,32	1,32	▼
2.	Jumlah linmas	12.750	11.900	11.694	9.027	9.431	9.431	▼
3.	Pertumbuhan ekonomi	5 - 5,5	5 - 5,5	5,92	5,72	NA	NA	▶
4.	Kemiskinan	4,2	7,1	13,61	12,94	NA	NA	▼
5.	Penegakan Perda	100	250	98	314	234	234	▶
6.	Cakupan patrol petugas satpol PP	20/bln	12/bln	7,16/bln	8,3/bln	7,5/bln	7,5/bln	▼
7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan di kabupaten)	75%	72%	80%	79,85%	88,68%	88,68%	■
8.	Sistem informasi manajemen pemda	ada	ada	ada	ada	ada	ada	■
9.	Jenis kelas dan jumlah penginapan/ hotel	19	17	27	27	26	26	■
10.	Jumlah demonstrasi	15	22	14	7	10	10	■
11.	Lama proses perijinan (hari)	3	8	12	12	12	12	▼
12.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	12	9			30	30	▼
13.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	11	8	2	5	8	8	▶

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 6 target indikator berstatus perlu upaya keras.

21) Ketahanan Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Regulasi ketahan pangan	1	1	1	1	1	■
2.	Ketersediaan energy dan protein per kapita						
	- energi (%)	100	90	92	90	90	▶
	- protein (%)	100	90	92	90	90	▶

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
3.	Penguatan cadangan pangan (%)	80	60	100,57	84	84	■
4.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	20	20	98,7	90	90	■
5.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%)	6	6	6	6	6	▸
6.	Skor pola harapan pangan (PPH)	9,4	9	85,9	83	83	■
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	22	20	60	18	18	▼
8.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	65	60	50	58	58	▼
9.	Konsumsi energi (k.kal/hr)	2300	2100	1950	2.000	2.000	▼
10.	Konsumsi protein (gr/hr)	60	54	48,50	57	57	▸
11.	Produksi pertanian tanaman pangan utama						
	- Padi sawah (ton)	576.669	554.277	497.870 ^{a)}	615.884	615.884	■
	- Jagung (ton)	128.630	123.635	126.412 ^{a)}	127.179	127.179	▸
12.	Meningkatnya produksi						
	- Sapi potong (kg)	1.874.471	1.844.836	1.431.971	1.557.520	1.557.520	▼
	- Kerbau (kg)	243.283	239.437	94.500	130.250	130.250	▼
	- Kambing (kg)	426.330	417.929	1.022.570	376.416	376.416	▼
	- Ayam (kg)	1.836.697	1.782.812	1.966.653	2.865.640	2.865.640	■
	- Susu (ton)	325	315	195,417	184.170	184.170	▼
	- Telur (ton)	3.425	3.975	3.086,156	3.075	3.075	▼
	- Gula (ton)	110.257	109.650	46.198,46	62.802	62.802	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▸ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, dari indikator pertama sampai dengan ke sepuluh, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 3 target indikator berstatus perlu upaya keras. Untuk target indikator produksi tanaman pangan utama, komoditas padi sawah berstatus telah tercapai dan komoditas jagung berstatus akan tercapai. Sedangkan target indikator ke dua belas, sebanyak 1 komoditas berstatus telah tercapai dan 6 komoditas berstatus perlu upaya keras.

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)							
	- LPMD/K	406	406	406	406	406	406	
	- RT	7549	7549	0	0	0	0	
	- RW	1475	1475	0	0	0	0	
	- PKK	406	406	401	401	401	401	
	- Posyandu	1.601	1.601	1.601	1.602	1.602	1.602	
2.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah LSM aktif (unit)	16	16	26	32	50	50	
4.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	
5.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaa masyarakat dalam jutaan	2.064	2.024	2.262	2.148	2.362	2.362	
6.	Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)	100	65	NA	75	75	75	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, target indikator jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina, sebanyak 1 kelembagaan yang berstatus telah tercapai, 1 kelembagaan yang berstatus akan tercapai dan 3 kelembagaan yang berstatus perlu upaya keras. Untuk target indikator ke dua sampai dengan ke enam sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai dan 3 target indikator berstatus akan tercapai.

23) Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Capaian Indikator Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Buku Kabupaten dalam angka	ada	ada	ada	ada	ada	
2.	Buku PDRB kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus akan tercapai.

24) Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Capaian Indikator Urusan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKP		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	61,80	50,9	20	28	28	▼
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	15	17	3	3	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus perlu upaya keras.

25) Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKP			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%)	0,67	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	▼
2.	Jumlah surat kabar nasional	8	8	8	8	8	8	■
	lokal (media)	6	6	6	6	6	6	■
3.	Jumlah penyiaran radio	14	14	10	12	14	14	■
	TV lokal	2	1	1	2	3	3	■
4.	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	■

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 5 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 1 target indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk sulit mencapai target karena selaras

dengan perkembangan teknologi banyak wartel/warnet yang berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya area hotspot, mudahnya mengakses info lewat gadget pribadi, terjangkaunya gadget yg mendukung internet dan terjangkaunya pulsa internet.

26) Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Jumlah perpustakaan	1.626	1.426	1.137	1.139	1.139	▼
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	30.000	28.000	20.593	30.025	30.025	■
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.098	41.098	43.890	47.687	47.687	■

Keterangan :

■ Telah tercapai; ■ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.

2.2.2. Urusan Pilihan

1) Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.86.

Tabel 2.86.
Capaian Indikator Urusan Pertanian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,36	57,68	57,89	56,18	53,79	53,79	▼
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	36,33	36,23	32,5	23,62	40,75	40,75	■
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	3,18	3	2,86	2,35	3,47	3,47	■
4.	Produksi pertanian tanaman hortikultura							
	- Kacang panjang (kw)	7.854	7.737	8.671	10.855	12.227	12.227	■
	- Mentimun (kw)	8.692	8.563	7.303	5.410	7.630	7.630	▼
	- Terong (kw)	6.422	6.327	5.477	5.759	4.115	4.115	▼
	- Bawang merah (kw)	93.007	91.626	163.222	216.542	232.291	232.291	■
	- Cabe besar (kw)	27.453	27.046	19.137	17.374	21.398	21.398	▼
	- Mangga (kw)	1.520	1.497	180.156	156.022	205.633	205.633	■

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKP			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Rambutan (kw)	60.061	59.169	50.759	48.354	38.531	38.531	▼
	- Durian (kw)	19.569	19.278	19.990	5.387	4.147	4.147	▼
	- Pepaya (kw)	12.579	12.392	14.829	15.281	20.296	20.296	▼
5.	Populasi produksi komoditas peternakan utama							
	- sapi potong (ekor)	114.168	110.720	111.786	74.559	88.958	88.958	▼
	- Kerbau (ekor)	4.068	3.972	1.248	1.223	1.223	1.223	▼
	- Kambing (ekor)	123.711	120.072	122.958	127.300	163.829	163.829	■
	- Ayam (ekor)	1.520.472	1.454.053	949.092	1.591.323	2.014.955	2.014.955	■
6.	Angka kesakitan ternak (morbiditas)							
	- Ternak besar (%)	50	65	75	70	65	65	▶
	- Ternak kecil (%)	50	65	75	70	65	65	▶
	- Ternak unggas (%)	50	65	75	70	65	65	▶

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar berstatus perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD, sedangkan indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB berstatus telah mencapai target RPJMD. Untuk indikator produksi pertanian tanaman hortikultura, dari 9 komoditas yang ada, sebanyak 3 komoditas produksinya sudah mencapai target dalam RPJMD, sedangkan 6 komoditas memerlukan upaya keras agar bisa mencapai target yang ditetapkan. Lebih lanjut indikator populasi produksi komoditas peternakan utama, sebanyak 2 komoditas berstatus telah mencapai target dan 2 komoditas berstatus perlu upaya keras untuk mencapai target. Terakhir indikator angka kesakitan ternak (morbiditas) berstatus akan mencapai target yang ditetapkan baik untuk ternak besar, kecil maupun unggas.

2) Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Capaian Indikator Urusan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKP			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	80	55	45	50	55	55	▶
2.	Kerusakan kawasan hutan (%)	20	45	0	0	0	0	■
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	▶
4.	Luas hutan rakyat (ha)	24.193	20.899	23.681	26.734	34.178	34.178	■

Keterangan :


■ Telah tercapai; ▶ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai.




3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan energy dan sumber daya mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.88.

Tabel 2.88.
Capaian Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4			8	9
1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,19	1,2	0,76*)	1,88	1,88	

Keterangan :



 Telah tercapai;  Akan Tercapai;  Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus akan tercapai.




4) Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Kunjungan wisata	875.000	860.100	1.009.706	1.274.682	1.274.682	
2.	Pariwisata terhadap PDRB	0,40	0,2	0,001	0,001	0,001	

Keterangan :

 Telah tercapai;  Akan Tercapai;  Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1 target indikator berstatus perlu upaya keras. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB sangat kecil karena yang dihitung hanya pendapatan retribusi masuk obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sedangkan kebanyakan pengunjung wisata di Kabupaten Pati adalah wisata religi yang tidak ada retribusinya.

5) Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produksi perikanan						
	a. Perikanan tangkap	44.637	42.904	16.143,036	26.710	26.710	▼
	b. Perikanan budidaya	43.350	42.250	28.597,267	39.195	39.195	▼
2.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40	36,56	32,16	32	32	▼
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	83	76	100	125	125	■
4.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	110	110	276	373	373	■
5.	Rata-rata pendapatan nelayan (ribuan rupiah/bulan)	4.000	3.000	3.500	1.608	1.608	▼
6.	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (ribuan rupiah/bulan)	3.500	2.500	2.500	2.795	2.795	▢
7.	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)	74	66	792	778	778	■
8.	Luas kawasan mangrove (ha)	221	183	229,6	173,44	173,44	▼
9.	Luas abrasi yang tertangani (ha)	227	187	229,6	42,38	42,38	▼

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▢ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 6 target indikator berstatus perlu upaya keras.

6) Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Urusan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,3	19,15	19,05	19,07 ^{a)}	NA	NA	▼
2.	Nilai ekspor perdagangan (ribu US\$)	14.000	13.400	15.239	11.226	7.570	7.570	▼
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha formal (%)	6	6	6	6	6	6	▢

Keterangan :

■ Telah tercapai; ▢ Akan Tercapai; ▼ Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 1 target indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 2 target indikator berstatus perlu upaya keras.

7) Industri

Kinerja penyelenggaraan urusan industri ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Urusan Industri

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2014	Realisasi Capaian RKPD			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2014	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	18,1	17,6	17,43	17,66 ¹⁾	NA	NA	
2.	Pertumbuhan industri (%)	6	6	6	6	6	6	
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	5	5	5	5	5	5	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 3 target indikator berstatus akan tercapai.

8) Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, seperti tertuang pada tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Urusan Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2012-2017	Target Tahun 2015	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2015	Status Capaian Target Akhir RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015		
1	2	3	4	7	7	8	9
1.	Jumlah transmigran diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	180	30	4	5	5	
2.	Jumlah calon transmigran (KK)	900	700	600	230	230	

Keterangan :

Telah tercapai; Akan Tercapai; Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan data tabel di atas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RPJMD tahun 2012-2017, sebanyak 2 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing

daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJPD dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat di sektor pertanian, manufaktur dan perdagangan skala mikro kecil;
2. Masih tingginya angka pengangguran karena belum berkembangnya sektor riil secara maksimal;
3. Masih rendahnya produktivitas sektor pangan;
4. Meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap penyakit menular;
5. Kondisi infrastruktur daerah khususnya jalan dan prasarana irigasi dan sumber daya air yang kurang memadai;
6. Belum berjalannya reformasi birokrasi secara maksimal;
7. Kurangnya kesadaran budaya hidup sehat di masyarakat;
8. Belum optimalnya pemasaran dan pengendalian harga hasil produksi pertanian/ perkebunan/peternakan;
9. Kurangnya pemberdayaan KUD dan kelembagaan petani untuk kesejahteraan petani;
10. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa;
11. Belum kondusifnya iklim investasi;
12. Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan perkuatan jaringan kluster industri guna memperkuat sektor UMKM;
13. Kurangnya penerapan teknologi industri;
14. Belum optimalnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan pemuda;
15. Belum optimalnya pembinaan bidang olah raga, seni dan budaya;
16. Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah;
17. Masih adanya kawasan perumahan dengan kualitas lingkungan yang rendah (kumuh);
18. Banyaknya bangunan yang tidak memperhatikan garis sempadan dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
19. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan;

20. Belum adanya sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga secara terpadu;
21. Banyak koperasi yang beroperasi tetapi tidak memenuhi persyaratan perkoperasian (*tidak aktif dan tidak sehat*);
22. Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana;
23. Banyaknya pangan yang tidak aman dan tidak berkualitas untuk dikonsumsi (karena kurangnya pengawasan terhadap keamanan pangan yang beredar);
24. Kurang optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam berperan untuk memajukan sektor pariwisata daerah;
25. Masih banyaknya sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang memadai.

2.4. Isu-Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati serta memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati pada tahun 2018.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui melibatkan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Pati hingga saat ini masih cukup lambat, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 147.100 jiwa atau 11,95%.

2. Pengurangan Pengangguran

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diikuti dengan lesunya iklim usaha turut memberikan dampak pada perlambatan penurunan angka pengangguran daripada tahun sebelumnya.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan

Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular. Meningkatnya kasus Kematian Ibu (AKI) untuk tahun 2014 sebesar 17 kasus meningkat menjadi 21 kasus di tahun 2015, kemudian untuk kasus kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014 sebesar 193 kasus meningkat menjadi 198 kasus di tahun 2015. Pada kasus sebaran penyakit HIV/AIDS sejak tahun 1996 s/d 2014 terdapat sebanyak 665 orang dengan korban meninggal dunia sebanyak 93 orang.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan meliputi penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

5. Peningkatan Ketahanan Pangan

Di tengah ketidakpastian harga komoditas pangan yang cenderung kian merangkak naik sehingga menggerus daya beli masyarakat masyarakat kelas menengah bawah dan juga mendorong inflasi yang cukup signifikan, perlu upaya untuk membuat kebijakan yang difokuskan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas dan afordabilitas (harga terjangkau). Disamping itu pembenahan tata niaga komoditas pangan perlu diawasi sehingga dapat menutup celah para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komoditas yang sangat strategis ini. Diperlukan upaya sinergitas antar sektor yang menangani sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antar pemangku kepentingan yang cenderung saling menyalahkan atau mencari pembenaran sepihak.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal

Era perdagangan bebas telah memasuki tahap implementasi yang kian waktu semakin luas cakupannya baik dari aspek geografis, poduk atau komoditas yang diperdagangkan serta kesepakatan-kesepakatan teknis hubungan multilateral dalam perpektif perdagangan bebas.

Dampak negative dari implementasi perdagangan bebas internasional/regional baik ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) maupun ASEAN Economic Community (AEC) yaitu pada aspek daya saing produk UMKM. Mengingat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan bisnisnya seperti kualitas SDM rendah, sulitnya akses pada sektor keuangan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, inovasi maupun pada segi pemasaran.

Pemerintah Daerah harus terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai fasilitasi maupun bantuan teknis/permodalan guna mengangkat daya saing mereka ke tingkat yang lebih kompetitif.

Dan tentunya dalam mendorong pengembangan usaha UMKM didasarkan pada penggalan, pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi juga produk yang kompetitif.

7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Baik buruknya infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengentasan kemiskinan maupun mutu lingkungan hidup.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Pati ditandai dengan masih tingginya persentase jalan dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak, rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan persampahan, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur tersebut memerlukan perhatian oleh pemerintah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Pati dan Kebijakan Keuangan Daerah pada tahun 2017 yang dibahas dalam bab ini meliputi arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Tingkat Investasi serta tantangan dan prospek perekonomian daerah dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatannya, disamping itu akan dibahas juga arah kebijakan keuangan daerah yang diperlukan yang mencakup arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

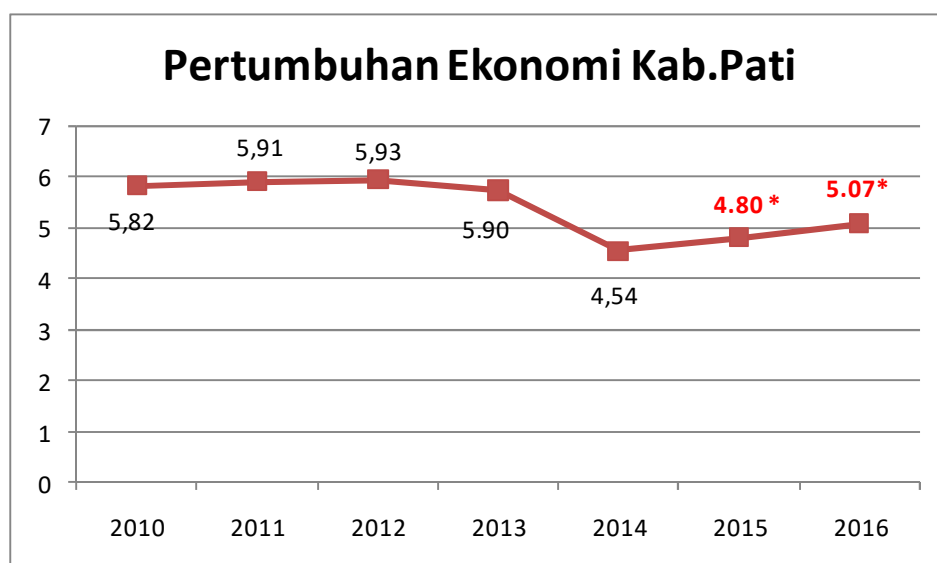
Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang digariskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana juga dalam agenda nawa cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa arah ekonomi nasional tahun 2017 yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 antara lain adalah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,1%, PDB perkapita sebesar Rp 58.489.000,-, Tingkat Kemiskinan berkisar 7,5-8,5% dengan sasaran Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,3%, Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 5,2-5,5% dengan sasaran Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,1%, Laju Inflasi berkisar 4,0% dengan strategi pembangunan pada tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, Dimensi pembangunan sektor unggulan dan prioritas yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur. Sejalan dengan arah dan strategi pembangunan nasional itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 juga mengarahkan pembangunannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah, dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%, Inflasi berkisar 4,5₋1 %, angka kemiskinan 11,30-10,83% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,49-4,27%. Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memberikan arah dan prioritas pembangunannya untuk

mencapai sasaran ekonomi makronya yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5-6%, laju inflasi berkisar 3-5%, PDRB per kapita sebesar Rp 12.978.000,-, angka kemiskinan sebesar 4,20%, Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 6,60%, secara rinci kondisi ekonomi daerah tahun-tahun lalu, perkiraan tahun berjalan dan tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Pati tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016

Dampak memburuknya ekonomi global Tahun 2008 masih sangat dirasakan hingga Tahun 2015. Ketidakpastian perekonomian ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di berbagai belahan dunia dan tentunya hingga pada level wilayah daerah kabupaten/kota.

Kabupaten Pati sebagai daerah industry berbasis pertanian, sangat merasakan dampak melemahnya perekonomian, meskipun dampaknya bukan dominan karena pelemahan ekonomi global, namun disebabkan oleh faktor internal yaitu antara lain karena faktor alam khususnya pada sektor pertanian (Tahun 2014).



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten di Indonesia (data diolah)

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati 2010-2016

Pada Tahun 2015, perekonomian Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan sebesar ± 4,80% (angka proyeksi). Hal ini didasarkan pada hasil produksi pertanian yang meningkat cukup signifikan (dibanding tahun sebelumnya yang justru tumbuh negative) karena keberhasilan dalam menjalankan program peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya komoditas padi. Sektor manufaktur dan jasa yang cenderung terus mengalami peningkatan pertumbuhan, juga memberikan sumbangan positif dalam perekonomian daerah. Kedua sektor ini, dari

tahun ke tahun semakin dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB melampaui kontribusi sektor pertanian. Hal ini semakin memperkuat hipotesa pergeseran basis ekonomi daerah Kabupaten Pati (struktur ekonomi) dari agraris menuju industri manufaktur ataupun jasa, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam berbagai hasil kajian tentang pemetaan potensi ekonomi lokal/daerah.

Perekonomian daerah Kabupaten Pati diharapkan akan mengalami peningkatan secara signifikan pada Tahun 2016, dengan asumsi 3 (tiga) sektor utama yaitu pertanian, manufaktur dan jasa, masing-masing memberikan kontribusi pertumbuhan yang positif sehingga mampu mendorong terus kemajuan ekonomi dengan laju pertumbuhan diperkirakan sebesar 5,07% hingga 5,3%. Proyeksi ini masih menyertakan asumsi bahwa di tahun 2016, perekonomian dunia masih melambat (meskipun cenderung bergerak positif) dan memberikan pengaruh yang signifikan pada perekonomian domestik. Namun demikian, apabila paket kebijakan ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif maka tidak mustahil hal ini akan mampu mendongkrak ekonomi (baik secara nasional maupun regional/daerah) sehingga dapat melampaui proyeksi pertumbuhan yang telah ditetapkan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Kebijakan moneter ekspansif yang diluncurkan pada Januari 2016 oleh pemerintah yaitu penurunan BI rate (suku bunga acuan perbankan) sebesar 25 digit dari 7,5% menjadi 7,25%, paket kebijakan jilid VII yang menekankan pada percepatan penyediaan sumber energy, kelancaran logistic dan kemudahan sumber pangan serta beberapa kebijakan deregulasi yang telah ditetapkan diperkirakan dapat mendorong perekonomian dalam negeri.

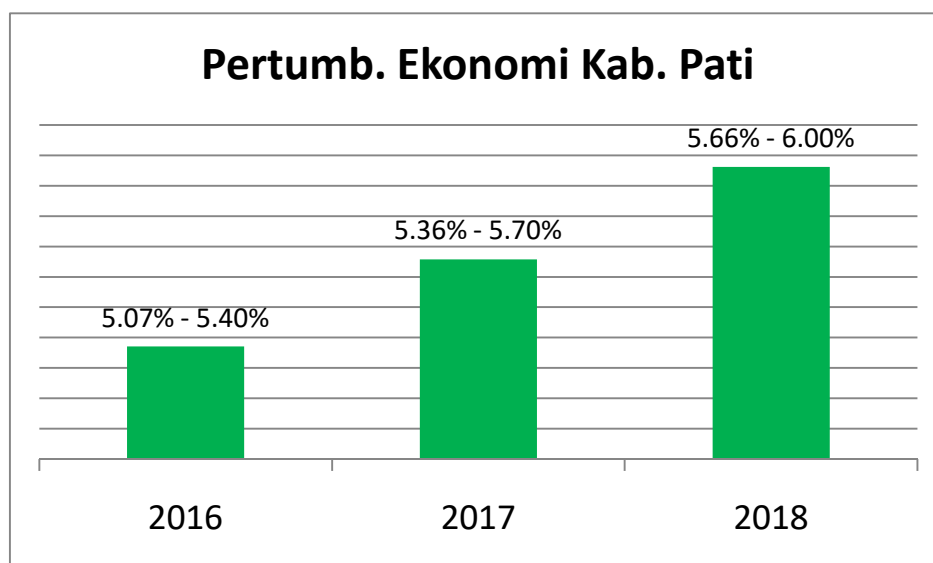
Disamping itu, tahun ini yang merupakan tahun pertama bagi bererlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta tantangan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang telah berlaku sejak 2012, dapat membuka peluang peningkatan skala ekonomi nasional maupun daerah secara lebih luas diberbagai sektor.

Peningkatan daya saing produk daerah (*competitiveness*) di era perdagangan bebas merupakan kata kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan. Salah satu strategi dalam mewujudkan keunggulan kompetitif adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga sumber daya yang ada dapat dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu unsur peningkatan daya saing usaha (produk dan jasa) telah terpenuhi yaitu melalui paket kebijakan pemerintah yang baru saja diluncurkan, diantaranya adalah dukungan perbankan dalam penyediaan modal usaha yang murah, kemudahan dalam mencukupi kebutuhan energi, kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis, stabilitas

ekonomi dan keamanan. Faktor-faktor pendorong itu harus terus dipelihara dan dipupuk serta terus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga akan mampu mendorong positif perekonomian. Adanya tren semakin membaiknya perekonomian global juga menjadi pendorong bagi tumbuhnya sektor riil yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perdagangan bebas diharapkan dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Pati untuk ikut berperan dalam persaingan yang semakin ketat guna meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini menjadi alasan logis untuk memanfaatkan peluang dimaksud, karena Kabupaten Pati memiliki berbagai potensi ekonomi. Tiga sektor/lapangan usaha dominan dalam komponen pembentuk PDRB (Tahun 2014) yaitu pertanian (24,50%), industri manufaktur (27,52%) dan perdagangan (14,92%) dapat dijadikan basis *design* rancangan kebijakan ekonomi daerah, karena ketiganya merupakan kekuatan ekonomi utama di Kabupaten Pati, tentunya ditunjang dengan sektor lainnya (sektor jasa).

Stimulus kebijakan pemerintah pusat yang pro pertumbuhan, bagi daerah menjadi modal utama untuk terus memacu kinerja sektor ekonominya. Kondusivitas iklim usaha yang telah diciptakan oleh pemerintah dan dukungan masyarakat, diperkirakan akan mendorong perekonomian Kabupaten Pati, sehingga berpijak pada tahun berjalan 2016, ekonomi dapat terus tumbuh positif di tahun 2017 dan 2018. Berikut prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2016-2018 sebagaimana grafik 3.2.



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Pati (data diolah)

Grafik 3.2.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2016-2018

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi global semakin membaik, paket kebijakan pemerintah semakin pro pertumbuhan, maka pada tahun 2017 ekonomi Kabupaten Pati akan tumbuh sebesar 5,36% - 5,7% dan

Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,66% - 6,0%. Pertumbuhan ini diharapkan terjadi karena dorongan tumbuh kembangnya sektor agroindustri berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan jasa lokal.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017, tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan yang tertuang dalam *Nawacita* dan agenda-agenda pembangunan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja, kedaulatan pangan dan energi, dan pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Sebagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2017, perekonomian Kabupaten Pati diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,36% - 5,7%. Sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Pati, akan menjadi penentu keberhasilan pencapaian target pertumbuhan tersebut. Investasi yang terus berkembang di tiga sektor dimaksud, yang menjadi komponen utama dari sektor agroindustri, dapat secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor industri manufaktur berbasis agro (*agroindustry*) secara empiris mampu menciptakan daya saing produk. Daya saing produk tercipta karena adanya efisiensi dalam bisnis. Konsep pengembangan industri berbasis spasial pada pengembangan agroindustri merupakan salah satu cara efektif guna mendorong tumbuhnya industri manufaktur beserta pendukung-pendukungnya (sektor hulu dan hilir) baik dari sisi peningkatan kapasitas kelembagaan bisnis, ketersediaan bahan baku, kesempatan kerja maupun peluang pasar.

Kondisi eksisting lapangan usaha (khususnya di tiga sektor utama) di Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan pelaku usaha yang paling dominan (99%). Mereka tersebar di sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan serta jasa. Sehingga maju mundurnya perekonomian daerah, sangat bergantung pada kemampuan sumber daya tersebut dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak selaku regulator sekaligus fasilitator, harus mampu melihat potensi ini sebagai salah satu asset yang strategis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui pemilihan/dukungan kebijakan yang tepat, kendala yang sering menghinggapi pelaku UMKM dapat teratasi, diantaranya seputar SDM, manajemen usaha, permodalan, teknologi, akses informasi, peluang pasar, perijinan, serta keberpihakan pemerintah dalam mendorong UMKM. Pemerintah daerah juga harus ikut berperan menciptakan peluang usaha bagi industri manufaktur besar guna menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM

(*backward and forward linkage*), sehingga dapat menciptakan rantai nilai pada setiap jenjang usaha.

Selain itu, promosi berbagai potensi ekonomi lokal yang menarik/porspektif, akan mampu menjadi magnet bagi calon investor untuk menanamkan modalnya, tentunya dengan jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum serta kondusivitas iklim usaha setempat.

Sektor lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah terbukti mampu menjadi lokomotif bagi kemajuan sektor lain khususnya UMKM maupun pelaku bisnis lainnya. Dengan berkembangnya sektor pariwisata pada suatu daerah, secara otomatis daerah tersebut menjadi semacam *etalase ruang promosi dan pengenalan* produk-produk khas lokal kepada pengunjung/wisatawan yang notabene merupakan konsumen potensial. Disamping itu, sektor ini dapat menyediakan peluang kerja baik bagi warga lokal maupun masyarakat sekitarnya.

Seiring dengan semakin gencarnya pemerintah pusat dan provinsi dalam mempromosikan obyek-obyek wisata unggulan, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk terus berbenah dan memperbaiki segala kekurangan guna mendukung pengembangan sektor pariwisata, mulai dari dukungan master plan, regulasi (perda) maupun pelibatan dan pemberdayaan pelaku usaha pariwisata setempat.

Dari gambaran eksisting potensi ekonomi yang terpapar di Kabupaten Pati, maka kebijakan ekonomi yang sesuai, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian daerah secara garis besar meliputi :

- ❑ Peningkatan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendorong daya saing produk daerah khususnya dalam menghadapi pasar bebas (ACFTA & MEA);
- ❑ Peningkatan penyediaan sarana & prasarana pendukung kegiatan ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian (dalam arti luas), industri dan perdagangan.
- ❑ Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian (dalam arti luas) dengan tujuan untuk peningkatan produksi & produktivitas guna mendukung ketahanan pangan daerah, termasuk peningkatan produksi kedelai serta mendukung tumbuhnya agroindustri;
- ❑ Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah guna meningkatkan nilai investasi daerah.
- ❑ Pembangunan/pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal secara terpadu;

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan realisasi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pati berkaitan dengan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana uraian diatas, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2018 mendatang berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 7% atau naik sebesar Rp 162.695.464.000,- dari tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp 2.482.857.103.000,- menjadi sebesar Rp 2.645.552.567.000,- di tahun 2018, proyeksi sumber-sumber pendapatan pada tahun 2018 itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 347.707.609.000,- Dana perimbangan sebesar Rp 1.704.653.178.000,- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 593.191.780.000,-. Dari ketiga sumber pendapatan itu, sumber pendapatan daerah Kabupaten Pati paling utama berasal dari dana perimbangan sebesar sekitar 64,43%, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,42% dan PAD sebesar 13,14%. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Pati masih tetap mengandalkan SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) yang akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran belanja. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pati dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Realisasi, Proyeksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1,1	Pendapatan Asli Daerah	310.063.640.827	290.469.281.000	291.412.554.000	347.707.609.000
1.1.1	Pajak Daerah	63.369.741.341	56.665.000.000	55.450.000.000	63.310.174.000
1.1.2	Retribusi Daerah	32.186.102.079	15.020.390.000	15.889.856.000	17.470.958.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.176.566.993	12.878.421.000	14.278.421.000	14.992.342.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.331.230.413	205.905.470.000	205.794.277.000	251.934.135.000
1,2	Dana Perimbangan	1.214.974.988.666	1.635.557.882.000	1.685.657.244.000	1.704.653.178.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	35.611.941.666	35.974.502.000	41.948.713.000	41.948.713.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.086.645.667.000	1.207.508.997.000	1.207.508.997.000	1.226.504.931.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	92.717.380.000	392.074.383.000	436.199.534.000	436.199.534.000
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	656.653.331.608	538.751.659.000	505.787.305.000	593.191.780.000
1.3.1	Hibah	20.105.784.346	21.687.284.000	2.725.152.000	-
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	145.137.616.203	130.901.276.000	131.660.731.000	138.243.768.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	427.724.387.000	286.022.699.000	371.401.422.000	454.948.012.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	63.685.544.059	100.140.400.000	-	-

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.3.5	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	2.181.691.961.101	2.464.778.822.000	2.482.857.103.000	2.645.552.567.000
	Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	318.730.722.610	346.467.698.000	74.633.181.000	45.639.335.000
3.1.2	Pinjaman Daerah	-	-	74.633.181.000	45.639.335.000
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	305.332.700	201.222.000	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah/Dana Bergulir	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	319.036.055.310	346.668.920.000	17.000.000.000	-
3.2.1	Penyertaan Modal	18.000.000.000	29.624.266.000	17.000.000.000	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.000.000.000	29.624.266.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	301.036.055.310	317.044.654.000	57.633.181.000	45.639.335.000
	KAPASITAS KEUANGAN DAERAH	2.482.728.016.411	2.781.823.476.000	2.540.490.284.000	2.691.191.902.000

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

Realisasi, target dan proyeksi kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari persentasenya terhadap total pendapatan daerah selama empat tahun berturut-turut (2015-2018). Realisasi, target dan proyeksi kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kabupaten Pati selama kurun waktu 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Persentase Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015-2016, Target 2017 dan Proyeksi 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (%)	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Tahun 2017 (%)	Proyeksi Tahun 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,1	Pendapatan Asli Daerah	14,21	11,78	11,74	13,14
1.1.1	Pajak Daerah	2,90	2,30	2,23	2,39
1.1.2	Retribusi Daerah	1,47	0,61	0,64	0,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,47	0,52	0,58	0,57
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,37	8,35	8,29	9,52
1,2	Dana Perimbangan	55,69	66,36	67,89	64,43
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	1,63	1,46	1,69	1,59
1.2.2	Dana Alokasi Umum	49,81	48,99	48,63	46,36
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4,25	15,91	17,57	16,49
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30,10	21,86	20,37	22,42

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (%)	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Tahun 2017 (%)	Proyeksi Tahun 2018 (%)
1.3.1	Hibah	0,92	0,88	0,11	0,00
1.3.2	Dana Darurat	6,65	5,31	5,30	5,23
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	19,61	11,60	14,96	17,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,92	4,07	0	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	100,00	100,00	100	100

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pati digambarkan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diuraikan sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Perbantuan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sejalan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerahnya tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berlakunya otonomi daerah mendorong daerah untuk terus mengoptimalkan penerimaan ini, namun keinginan ini tidak diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, misalnya pengaruh penambahan suatu jenis pajak dan retribusi baru terhadap sektor riil dan pelayanan kepada masyarakat artinya, diperlukan sensitivitas yang tinggi dari pemerintah daerah dengan upaya-upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak, dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dengan dikeluarkan banyak peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang malah memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan investasi. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tidak hayal lagi akhir-akhir ini Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk membatalkan banyak perda yang dirasa memberatkan masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Pendapatan Daerah yang ada dalam struktur APBD dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

- a. **Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*).** Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga.
- b. **Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*).** Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah

(*local tax, subnational tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pati dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Pati harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Merencanakan penetapan target PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dari masing-masing sumber PAD, dan asumsi pertumbuhan ekonomi.
2. Dalam rangka peningkatan PAD, Pemkab Pati akan berusaha meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan PAD, termasuk kemudahan dan percepatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, efisiensi biaya administrasi, penyederhanaan birokrasi dan memperkecil tunggakan.
3. Memberikan insentif kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang telah dapat melunasi baku ketetapan PBB dalam bentuk insentif.
5. Menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberikan kontribusi pada PAD.
6. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan BUMD kepada masyarakat, serta penataan manajemen secara profesional agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kearah yang positif, walaupun kontribusi PAD menunjukkan trend yang berfluktuatif seiring dengan kenaikan sumber pendapatan lainnya juga. Kontribusi PAD di Kabupaten Pati masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2012-2016 dan target tahun 2017 di Kabupaten Pati, dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan
pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2017

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan
1	2012	163.733.665.531	1.477.993.189.757	11,08
2	2013	169.127.415.979	1.706.030.888.000	9,91
3	2014	279.254.884.135	1.940.575.704.131	14,39
4	2015	310.063.640.827	2.181.691.961.101	14,21
5	2016	290.469.281.000	2.464.778.822.000	11,78
6	2017	291.412.554.000	2.482.857.103.000	13,14
Rata-Rata				12,41

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

b. Dana Perimbangan

Sumber pembiayaan bagi daerah selain Pendapatan Asli Daerah ebagaimana diatas adalah Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD yang komponennya antara lain adalah Pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal. Akan tetapi sampai saat ini Dana Perimbangan masih merupakan sumber utama bagi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah murni menjadi Pajak Daerah.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar (lebih dari 60 persen), hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pati masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD Kabupaten Pati selama kurun waktu enam tahun terakhir (2012-2017) masih besar, tiga tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2012 – 2017

No	Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan	% DP terhadap total Pendapatan
1	2012	997.544.585.124,00	1.477.993.189.757	67,49
2	2013	1.094.864.463.993,00	1.706.030.888.000	64,18
3	2014	1.163.930.993.710,00	1.940.575.704.131	59,98
4	2015	1.214.974.988.666,00	2.181.691.961.101	55,69
5	2016	1.635.557.882.000,00	2.464.778.822.000	66,36
6	2017	1.685.657.244.000,00	2.482.857.103.000	64,43
Rata-Rata				62,83

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Pati cukup besar, keberadaannya juga sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Daerah. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah yang mendukung prioritas pembangunan provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kabupaten Pati bersumber dari:

- (1) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (3) Dana Penyesuaian; dan
- (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Pati terhadap Total Pendapatan Daerah relatif cukup besar (berkisar 25 persen). Selama kurun waktu tahun 2014 – 2017 proporsinya cenderung berfluktuasi, mengalami penurunan pada tahun 2016 dikarenakan alokasi tunjangan sertifikasi guru yang sebelumnya masuk dalam struktur belanja dana penyesuaian dan otonomi khusus, mulai tahun 2016 dikelompokkan dalam kelompok Dana Perimbangan. Proporsi Pendapatan daerah yang sah terbesar diperoleh dari Alokasi Dana desa kemudian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Juga bagi Hasil Pajak-pajak provinsi, karena itu terkait alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati melalui usulan Bantuan Keuangan provinsi berusaha meyakinkan Pemerintah Provinsi bahwa usulan dari Kabupaten Pati memang mendesak pelaksanaannya, sudah siap perencanaannya (*ready criteria*) dan mendukung kepada prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga usulan yang disampaikan dapat disetujui dan terealisasi. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2012 – 2017

No	Tahun	Lain-lain PD Yang Sah	Total Pendapatan	% DP terhadap total Pendapatan
1	2012	316.714.939.102	1.477.993.189.757	21,43
2	2013	442.039.008.028	1.706.030.888.000	25,91
3	2014	497.389.826.286	1.940.575.704.131	25,63
4	2015	656.653.331.608	2.181.691.961.101	30,10
5	2016	538.751.659.000	2.464.778.822.000	21,86
6	2017	593.191.780.000	2.482.857.103.000	22,42
Rata-Rata				24,55

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah pada periode Tahun 2012 -2016 dilakukan melalui analisis belanja daerah.

Belanja Daerah menurut kelompok belanja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Pati belum pernah melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c) Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
 - d) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - e) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial

diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

- f) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - g) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Pati tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - h) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
- 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja Pegawai;
Merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- c) Belanja Modal;
merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pati Tahun rencana (2018) yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka tidak terlepas dari pada arah kebijakan belanja daerah tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, dengan pendekatan *money follow program*.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pati berdasarkan pendanaan urusan pada tahun-tahun sebelumnya, cenderung kepada alokasi terbesar untuk urusan pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pemerintahan umum, yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Belanja menurut Urusan pada APBD Kabupaten Pati
Tahun 2014-2016

No	Uraian	Anggaran Tahun 2014 (Ribu Rp)		Anggaran Tahun 2015 (Ribu Rp)		Anggaran Tahun 2016 (Ribu Rp)	
		JML BTL dan BL	%	JML BTL dan BL	%	JML BTL dan BL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	URUSAN WAJIB	2.002.439.815	95,39	2.314.895.401	94,85	2.401.705.454	94,02
1.01	Pendidikan	906.743.019	43,19	962.191.756	39,43	933.680.530	36,55
1.02	Kesehatan	308.748.542	14,71	383.889.856	15,73	383.141.286	15,00
1.03	PU	291.929.188	13,91	306.020.624	12,54	243.454.811	9,53
1.04	Perumahan	9.439.909	0,45	8.854.022	0,36	10.572.005	0,41
1.05	Penataan Ruang	3.924.000	0,19	1.198.660	0,05	563.704	0,02
1.06	Perencanaan Pembangunan	11.392.223	0,54	11.786.456	0,48	11.347.197	0,44
1.07	Perhubungan	11.974.071	0,57	9.468.422	0,39	10.447.911	0,41
1.08	Lingkungan Hidup	13.163.366	0,63	10.592.332	0,43	12.955.000	0,51
1.09	Pertanahan	1.189.800	0,06	901.830	0,04	956.430	0,04
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	8.439.883	0,40	7.197.974	0,29	7.668.254	0,30
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	593.438	0,03	631.034	0,03	500.167	0,02
1.12	KB dan KS	12.893.298	0,61	14.338.305	0,59	16.111.737	0,63
1.13	Sosial	1.641.760	0,08	1.798.590	0,07	16.418.641	0,64
1.14	Tenaga Kerja	11.982.750	0,57	13.192.790	0,54	12.588.422	0,49
1.15	Koperasi dan UKM	5.395.185	0,26	4.189.355	0,17	4.348.448	0,17
1.16	Penanaman Modal	615.750	0,03	526.200	0,02	539.200	0,02
1.17	Kebudayaan	2.888.430	0,14	1.013.825	0,04	1.658.761	0,06
1.18	Pemuda dan Olah Raga	1.634.290	0,08	1.134.250	0,05	1.493.655	0,06
1.19	Kesbangpol	13.472.607	0,64	13.502.153	0,55	16.551.221	0,65
1.20	Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah dan Kepegawaian (34 SKPD)	358.262.030	17,07	536.528.270	21,98	692.210.677	27,10
1.21	Ketahanan Pangan	5.312.749	0,25	4.518.833	0,19	3.177.468	0,12
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.556.623	0,55	12.037.105	0,49	11.657.750	0,46

No	Uraian	Anggaran Tahun 2014 (Ribu Rp)		Anggaran Tahun 2015 (Ribu Rp)		Anggaran Tahun 2016 (Ribu Rp)	
		JML BTL dan BL	%	JML BTL dan BL	%	JML BTL dan BL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.24	Kearsipan	3.176.969	0,15	2.633.968	0,11	3.202.085	0,13
1.25	Komunikasi dan Informatika	5.260.899	0,25	6.342.240	0,26	6.175.411	0,24
1.26	Perpustakaan	809.036	0,04	406.551	0,02	284.677	0,01
2	URUSAN PILIHAN	96.777.435	4,61	125.582.048	5,15	152.641.316	5,98
2.01	Pertanian	30.681.594	1,46	57.560.265	2,36	55.917.272	2,19
2.02	Kehutanan	8.414.968	0,40	10.278.275	0,42	9.722.120	0,38
2.03	Energi dan Sumber Daya Mineral	173.000	0,01	64.480	0,00	34.418	0,00
2.04	Pariwisata	3.937.763	0,19	3.847.650	0,16	4.265.207	0,17
2.05	Kelautan dan perikanan	28.204.302	1,34	27.975.141	1,15	36.243.796	1,42
2.06	Perdagangan	22.832.407	1,09	23.793.380	0,97	45.937.273	1,80
2.07	Perindustrian	2.449.495	0,12	1.976.417	0,08	408.955	0,02
2.08	Transmigrasi	83.906	0,004	86.440	0,004	112.275	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.099.217.250	100	2.440.477.449	100	2.554.346.770	100,00

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

Alokasi belanja menurut klasifikasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara berturut-turut pada APBD 2014-2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja menurut Kelompok Belanja pada APBD
Kabupaten Pati Tahun 2014-2016, Alokasi Belanja pada APBD 2017

No	Uraian	Anggaran Th. 2014 (Ribu Rp)		Anggaran Th. 2015 (Ribu Rp)		Anggaran Th. 2016 (Ribu Rp)		Anggaran Tahun 2017 (Ribu Rp)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.302.221.853	62,40	1.525.326.552	62,50	1.745.966.702	68,35	1.782.050.640	70,15
2.1.1	Belanja Pegawai	1.131.646.576	54,23	1.186.802.224	48,63	1.232.199.052	48,24	1.186.203.538	46,69
2.1.4	Belanja Hibah	56.111.453	2,69	25.094.670	1,03	37.527.202	1,47	30.492.663	1,20
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.423.963	0,36	6.340.500	0,26	6.284.000	0,25	4.386.755	0,17
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	4.700.117	0,23	8.055.097	0,33	8.700.487	0,34	9.620.000	0,38
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	99.623.794	4,77	294.034.061	12,05	456.255.961	17,86	546.347.684	21,51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.715.950	0,13	5.000.000	0,20	5.000.000	0,20	5.000.000	0,20
2.2	BELANJA LANGSUNG	784.700.408	37,60	915.150.901	37,50	808.380.069	31,65	758.439.644	29,85
2.2.1	Belanja Pegawai	31.073.214	1,49	28.942.096	1,19	25.027.425	0,98	32.247.565	1,27
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	485.591.623	23,27	531.334.515	21,77	466.836.389	18,28	440.818.261	17,35
2.2.3	Belanja Modal	268.035.571	12,84	354.874.290	14,54	316.516.255	12,39	285.373.817	11,23
	JUMLAH BELANJA	2.086.922.261	100	2.440.477.453	100	2.554.346.771	100	2.540.490.284	100

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

Berdasarkan data-data diatas, dapat dilihat bahwa total belanja daerah setiap tahun meningkat, tahun 2015 total belanja meningkat sebesar 16,94% dari belanja pada APBD 2014, pada tahun 2016 total belanja meningkat sebesar 4,7% dari total belanja pada APBD 2015, Total Belanja pada tahun 2017 meningkat sebesar Alokasi belanja sesuai urusan pemerintahan menunjukkan bahwa secara berturut-turut selama

tiga tahun alokasi belanja untuk urusan pendidikan menempati proporsi terbesar yaitu 43,19% (2014), 39,43% (2015), 36,55%(2016) diatas alokasi belanja pendidikan yang diamanatkan undang-undang sebesar minimal 20% dari APBD, disusul alokasi belanja pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, adminitrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian (yang diampu oleh 34 SKPD), disusul alokasi untuk urusan kesehatan dan pekerjaan umum. Urusan kesehatan mendapat alokasi rata-rata selama tiga tahun sebesar 15,15%, dari total anggaran atau sebesar 30,24% dari Total Belanja APBD dikurangi Belanja Pegawai (BTL), sementara undang-undang mengamanatkan anggaran urusan kesehatan minimal 10% APBD diluar gaji, sehingga alokasi anggaran urusan kesehatan sudah lebih dari ketentuan. Urusan pekerjaan umum menempati proporsi alokasi anggaran terbesar keempat dalam APBD walaupun persentasenya cenderung menurun, sementara urusan energi dan SDM serta urusan transmigrasi mendapatkan alokasi belanja paling rendah. Dilihat dari alokasi belanja berdasarkan kelompok dan jenis belanja, Belanja tidak Langsung masih mendominasi alokasi belanja yaitu rata-rata 64,42% dengan persentase Belanja Pegawainya sebesar rata-rata 50,36% dari total belanja, sedangkan Belanja Langsung rata-rata sebesar 35,58%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja gaji pegawai masih sangat besar walaupun dari tahun 2014-2016 menunjukkan adanya penurunan. Pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa pada tahun 2015-2016 menempati persentase tertinggi rata-rata sebesar 125%, hal ini disebabkan keluarnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada kebijakan Pemerintah Pusat tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur, lembaga keagamaan, bantuan keuangan lainnya kepada desa, kemudian Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa rata-rata sebesar 40%, sedangkan Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung mengalami pertumbuhan minus sebesar rata-rata 10% dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2016 ini mengambil kebijakan untuk menghapus belanja honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang memang sudah menjadi tupoksi aparatur sipil negara diganti dengan kebijakan memberikan kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Mengacu pada kebijakan belanja tahun-tahun sebelumnya dan melihat prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan arah serta prioritas pembangunan pada RPJP 2005-2025 serta rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022, kebijakan belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2018 antara lain adalah :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka

- melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terjamin.
2. Mempertahankan alokasi belanja minimal yang diamanatkan undang-undang, diantaranya minimal 20% APBD untuk urusan pendidikan dan 10% APBD minus gaji untuk urusan kesehatan.
 3. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pati tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahun pertama pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dengan pendekatan *money follow program*, meliputi:
 1. Pendidikan.
 2. Kesehatan.
 3. Infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah.
 4. Ketahanan Pangan.
 5. Penanggulangan Kemiskinan.
 6. Koperasi, Usaha Mikro, industri dan perdagangan.
 7. Pariwisata
 8. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel.

Arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 secara umum dapat dilihat pada proyeksi alokasi belanja pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja pada APBD Kabupaten Pati
Tahun 2018

No	Uraian	Proyeksi Anggaran Belanja Tahun 2018 (Ribu Rp)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.850.424.704
2 .1.1	Belanja Pegawai	1.306.130.995
2 .1.4	Belanja Hibah	39.778.834
2 .1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.661.040
2 .1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	9.222.516
2 .1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	483.631.319
2 .1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	885.912.002
2.2.1	Belanja Pegawai	27.427.812
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.610.783
2.2.3	Belanja Modal	346.873.408
	JUMLAH BELANJA	2.736.336.706

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih bersih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto yang harus dapat menutup defisit anggaran. Kebijakan Pembiayaan tahun 2017 masih mengacu pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran (selisih pendapatan dengan belanja), Pemerintah Kabupaten Pati masih mengandalkan SiLPA (pembiayaan internal) dan sedapat mungkin menghindari pembiayaan eksternal dari luar Pemda antara lain dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Pati akan berusaha meminimalkan perolehan SiLPA dari lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal namun akan berusaha meningkatkan perolehan SiLPA dari efisiensi anggaran maupun dari kinerja pendapatan daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan juga masih mengacu pada tahun-tahun yang lalu yaitu diperuntukkan untuk melakukan penyertaan modal (investasi) daerah dalam rangka menjaga rasio penyertaan modal daerah pada Bank Jateng juga Bank Daerah.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pati tahun 2015-2016 dan proyeksi sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan proyeksi/target pembiayaan Kabupaten Pati
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (ribu Rp.)	Realisasi Tahun 2016 (ribu Rp.)	Proyeksi/ Target Tahun 2017 (ribu Rp.)	Proyeksi/ Target Tahun 2018 (ribu Rp.)
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	318.730.722.610	346.467.698.000	74.633.181.000	45.639.335.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	305.332.700	201.222.000	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.036.055.310	346.668.920.000	74.633.181.000	45.639.335.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.000.000.000	29.624.266.000	17.000.000.000	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	29.624.266.000	17.000.000.000	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	301.036.055.310	317.044.654.000	57.633.181.000	45.639.335.000

Sumber : APBD Kabupaten Pati (data diolah)

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2018 merupakan penjabaran dari tahun pertama RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2018-2022, namun RPJMD tersebut belum ditetapkan. Oleh karena itu prioritas pembangunan tahun 2018 mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang pada RPJPD 2005-2025 yang mempunyai visi “**Pati Bumi Mina Tani Sejahtera**”.

Pencapaian visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah;
6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal

Yang apabila diturunkan ke tujuan dan sasaran pembangunan akan didapatkan hubungan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan karakter masyarakat yang berperilaku agamis, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila b. menumbuhkan semangat gotong royong, yang berbudi luhur dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal, bersikap kompetitif dan dinamis c. menciptakan kondisi asah, asih dan asuh yang mampu mengayomi rasa aman dan damai d. meningkatkan konsistensi penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk perilaku masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, dengan target 10%. b. Penguatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkompentensi serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan target 20%. c. Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi, dengan target 20%. d. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dengan target 20%. e. Penguatan sistem kelembagaan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan, dengan target 15%. f. Penguatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja dalam pembangunan sesuai dengan norma agama dan falsafah Pancasila, dengan target 15%. g. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi mandiri, dengan target 10%. h. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, ketrampilan, olahraga dan kewirausahaan, dengan target 15%. i. Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan target 10%. j. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM, dengan target 10%.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam sektor pertanian, perikanan dan pertambangan b. mengembangkan IPTEK yang mampu menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai komponen pendukung dalam peningkatan perekonomian daerah berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan target 20%. b. penguatan usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna memperkuat posisi tawar petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kelestariaanya, dengan target 20%. c. penguatan usaha pertambangan melalui penerapan regulasi pertambangan, dengan target 20%. d. penguatan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan serta keamanan distribusi pangan, dengan target 20%. e. penguatan produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan teknologi, kelembagaan dan prasarana sarana pendukung yang memadai, dengan target 20%. f. pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan target 20%. g. penguatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan target 20%. h. penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum lingkungan, dengan target 20%. i. penguatan manajemen rehabilitasi hutan dan konservasi lahan melalui pola penanaman bibit tanaman yang unggul dengan melibatkan masyarakat, dengan target 20%.
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan	a. meningkatkan kinerja tata pemerintahan (<i>good governance</i>) yang selalu memenuhi etos kerja partisipasi yang aspiratif, konsistensi peraturan perundangan, transparansi, responsif, demokratis, proporsional yang tidak diskriminatif, efektif dan akuntabel	a. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip <i>good governance</i> melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan target 20%.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	<ul style="list-style-type: none"> b. mewujudkan perilaku yang terpuji dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada terciptanya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang c. menumbuhkan kemandirian daerah yang mendapat dukungan dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders) 	<ul style="list-style-type: none"> b. penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa untuk mendukung tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan target 20%. c. penguatan sistem dan akses kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan target 20%. d. penguatan sistem perencanaan dengan berorientasi pada optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam pembangunan daerah, dengan target 20%. e. peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan target 25%. f. penguatan sistem dan kualitas pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme, standar kompetensi dan kesejahteraan aparatur dengan target 10%.
4.	Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi sebagai dasar dalam pembangunan prasarana dan sarana b. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah c. mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh, sesuai RTRW yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendorong peningkatan manajemen pelayanan transportasi barang dan penumpang yang ditunjang efisiensi penyelenggaraan transportasi, dengan target 10%. b. penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, dengan target 15%. c. penguatan infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan fasilitas umum dan sosial, bekerjasama dengan pihak ke tiga, dengan target 15%. d. peningkatan kualitas penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di ibukota kecamatan didukung peran serta masyarakat, dengan target 20% e. penguatan peran penyelenggaraan telekomunikasi melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non telekomunikasi, dengan target 20%.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			f. peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan terutama terminal dan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, dengan target 20%.
5.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. reformasi perijinan investasi yang responsif penuh dengan kemudahan baik dari aspek prosedur, waktu maupun aspek finansial, b. menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang mampu membuka peluang usaha c. meningkatkan daya saing daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan regulasi yang didukung dengan peningkatan infrastruktur dan promosi potensi serta peluang investasi untuk mendorong daya saing daerah dalam pengembangan dunia usaha, dengan target 20%. b. penguatan investasi dan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, dengan target 20%. c. penguatan peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung investasi melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat tentang manfaat investasi, dengan target 15%. d. penguatan daya saing industri melalui pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif guna mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek, dengan target 15%. e. penguatan sektor perdagangan dan perindustrian guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam rangka pengamanan perdagangan bebas, dengan target 15%.
6.	Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan eksistensi budaya daerah dan nilai-nilai tradisional b. meningkatkan sarana prasarana potensi obyek wisata yang dikelola dan proporsional 	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan karakter dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang, dengan target 10%. b. penguatan sektor kepariwisataan yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional ditunjang sarana prasarana yang memadai bekerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan pengembangan obyek wisata, dengan target 10%. c. penguatan akses pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata melalui peningkatan pembangunan sarana pendukung di bidang pariwisata, dengan target 15%.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Prioritas pembangunan Kabupaten Pati berpedoman pada tahapan kedua RPJPD 2005-2025 serta isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan melalui 7 misi :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam tiga dimensi pembangunan, yaitu :

- 1) Dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah yang meliputi desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,3
- 2) Indeks Gini 0,36
- 3) Pertumbuhan ekonomi 8 %
- 4) PDB per Kapita 72.217 ribu rupiah
- 5) Tingkat kemiskinan 7,0 – 8,0 %
- 6) Tingkat Penganggura Terbuka 4,0 – 5,0 %

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 merupakan tahun keempat dari RPJMN Tahun 2015 – 2019, dilaksanakan dalam rangka “**Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas**”. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:

- 1) Pendidikan
 - a) Pendidikan Vokasi
 - b) Pendidikan kualitas guru
- 2) Kesehatan
 - a) Peningkatan kesehatan ibu dan anak
 - b) Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - c) Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- 3) Perumahan dan Permukiman
 - a) Penyediaan perumahan layak
 - b) Air bersih dan sanitasi
- 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - a) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

- b) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
- c) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
- d) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
- e) Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
- 5) Ketahanan Energi
 - a) EBT dan konservasi energy
 - b) Pemenuhan kebutuhan energi
- 6) Ketahanan Pangan
 - a) Peningkatan produksi pangan
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- 7) Penanggulangan Kemiskinan
 - a) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
 - b) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - c) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
- 8) Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
 - a) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
 - b) Pengembangan telekomunikasi dan informatika
- 9) Pembangunan wilayah
 - a) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
 - b) Pembangunan perdesaan
 - c) Reforma agraria
 - d) Pencegahan dan penanggulangan bencana
 - e) Percepatan pembangunan Papua
- 10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
 - a) Penguatan pertahanan
 - b) Stabilitas politik dan keamanan
 - c) Kepastian hukum
 - d) Reformasi birokrasi

Guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional, dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah tersebut, maka dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 ditetapkan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5%;
- 2) Tingkat kemiskinan sebesar 10,4 %;
- 3) Tingkat Penganggura Terbuka sebesar 4,9 %.

b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan untuk “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk :

- 1) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada :
 - a) Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/ pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b) Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/ kerjasama usaha, dengan mengoptimalkan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c) Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif dan peluang investasi;
 - d) Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e) Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
- 2) Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada :
 - a) Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu
 - b) Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c) Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d) Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan ketrampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;

- e) Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f) Penyediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g) Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
- 3) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada :
- a) Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
 - b) Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Stuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c) Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
 - d) Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit'
 - e) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f) Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
- 4) Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a) Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b) Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c) Pemanfaatan lahan melalui *integrated farming system* (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d) Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e) Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f) Pengembang perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g) Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h) Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan

- jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
- i) Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap *energy mix* di Jawa Tengah;
- 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
- a) Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
 - b) Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*);
 - c) Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal aglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
 - d) Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - e) Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremsi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - f) Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - g) Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM

- Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
- h) Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
 - i) Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
 - j) Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
 - k) Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
 - l) Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
 - m) Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
 - n) Pengembangan *Early Warning System* bencana berbasis masyarakat;
 - o) Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
- 6) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada :
- a) Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
 - c) Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan;
 - d) Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
 - e) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (*merit system*);
 - f) Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g) Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
 - h) Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;

- i) Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;
- j) Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018 yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
- 2) Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
- 3) PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
- 4) Indeks Gini sebesar 0,341 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
- 5) Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59;
- 7) Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
- 9) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2018

Pembangunan daerah Kabupaten Pati tahun 2018 mengacu pada arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi, maka isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang bersih, professional, responsive dan akuntabel;
- 2) Daya saing daerah;
- 3) Pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Kesetaraan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan.

Guna mencapai tujuan pembangunan yang diselaraskan dengan isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Pati tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah;
- 4) Ketahanan pangan;
- 5) Penanggulangan kemiskinan;
- 6) Koperasi, usaha mikro, industry dan perdagangan;
- 7) Pariwisata;
- 8) Tata kelola pemerintahan yang bersih, professional, responsive dan akuntabel.

Keterkaitan antara kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2018

No.	Isu Strategis	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1.	Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel	Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	PN 10 : Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
2.	Daya saing daerah	1. Koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan 2. Pariwisata 3. Ketahanan pangan	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan 2. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	1. PN 4: Pengembangan dunia usaha dan pariwisata 2. PN 5: Ketahanan Energi 3. PN 6: Ketahanan Pangan
3.	Pembangunan kualitas sumber daya manusia	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Penanggulangan kemiskinan	1. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin 2. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	1. PN 1: Pendidikan 2. PN 2: Kesehatan 3. PN 7: Penanggulangan kemiskinan
4.	Kesetaraan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan	Infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	1. PN 3: Perumahan dan Permukiman 2. PN 8: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 3. PN 9: Pembangunan Wilayah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2018 dalam arah pembangunan mendasarkan pada dokumen RPJPD serta Rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Pati tahun 2018-2022 yang sedang dalam proses penyusunan, sedangkan terkait dengan Rencana Program dan Kegiatan secara teknis mengacu pada usulan program kegiatan rancangan Renja PD. Dari usulan tersebut masih diperlukan rasionalisasi untuk penyesuaian dan sinkronisasi pencapaian target indikator dan prediksi kemampuan daerah sehingga dapat ditentukan program dan kegiatan prioritas yang mendapatkan porsi utama untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

Secara terminologi, program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Kategori pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 yang dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan pagu indikatif pendanaan disusun mempertimbangkan aspek mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, professional, responsive dan akuntabel; meningkatkan daya saing daerah, membangun kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesetaraan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan.

Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018.

Program prioritas sesuai dengan arah pembangunan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas I :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Pati berdasarkan RPJPD Tahun 2005-20125, isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Pati 2018-2022 yang diselaraskan dengan prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan prioritas provinsi. Fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2018 meliputi pendidikan; kesehatan; infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan; pariwisata; tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel.

Prioritas pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses layanan pendidikan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Non Formal
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Di bidang kesehatan prioritas ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses layanan kesehatan dalam rangka pencapaian target SPM bidang kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- k. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- m. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program prioritas dalam bidang infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah antara lain meliputi :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- f. Program penyediaan dan pengolahan air baku
- g. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- i. Program pengendalian banjir
- j. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
- k. Program Perencanaan Tata Ruang
- l. Program Pemanfaatan Ruang
- m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- n. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- o. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prioritas ketahanan pangan dalam rangka peningkatan skor pola pangan harapan dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- f. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- g. Program pengembangan budidaya perikanan
- h. Program pengembangan perikanan tangkap
- i. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- j. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- l. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 guna menurunkan angka kemiskinan meliputi :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Non Formal
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- i. Program Pengembangan Perumahan
- j. Program perencanaan pembangunan daerah
- k. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- l. Program perencanaan sosial budaya
- m. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- n. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- o. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- p. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- q. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- r. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- s. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program prioritas di bidang koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- e. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- h. Program Penataan Struktur Industri
- i. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- j. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- k. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- l. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- m. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
- n. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Program prioritas di sektor pariwisata yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan

Program prioritas di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

- a. Program perencanaan pembangunan daerah

- b. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - c. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - d. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - e. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Program Pendidikan Kedinasan
 - i. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2. Program Prioritas II :
Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah serta pencapaian indikator daerah.
3. Program Prioritas III :
Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap SKPD.

Program prioritas dijabarkan oleh masing-masing OPD kedalam kegiatan disertai pagunya. Usulan Rencana program/ kegiatan dan pagu indikatifnya per Organisasi Perangkat Daerah seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL 5.1
Rekap Usulan Program dan Kegiatan, Pagu Indikatif serta Usulan belanja Tidak Langsung (Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Usulan Pagu Indikatif	Ket
1	Usulan Program dan Kegiatan dibiayai APBD	1.415.684.022.004	
2	Usulan Program dan Kegiatan dibiayai APBN (DAK)	1.008.202.950.000	
3	Usulan Program dan Kegiatan dibiayai APBD Prov (Bantuan Keuangan)	432.291.914.000	
4	Usulan Belanja Tidak Langsung (Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan)	160.934.855.000	
	TOTAL JUMLAH USULAN	3.017.113.741.004	-

Sedangkan Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Usulan program dan Kegiatan, Hibah/Bansos/Bantuan keuangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 per OPD
yang dibiayai dari APBD Kabupaten

No	Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan	Usulan Anggaran BTL (Hibah, Bansos, Bankeu, Belanja Bagi Hasil)	
			Program	Kegiatan			
1			URUSAN WAJIB				
1	01		Pendidikan				
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	135	76.641.034.000	34.219.766.000
1	02		Kesehatan				
1	02	01	Dinas Kesehatan	18	90	120.217.549.000	
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo"	2	3	175.245.000.000	
1	02	03	Rumah Sakit Umum Daerah "Kayen"	4	6	30.671.187.000	
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33	88	495.572.809.000	228.347.900.000
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	46	17.698.084.000	519.600.500.000
1	05		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	19	94	15.595.743.000	
1	05	02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	61	2.774.826.000	
1	05	03	BPBD	5	45	5.336.861.000	
1	06		Sosial				
1	06	01	Dinas Sosial	25	91	12.374.720.000	190.580.500.000
2	01		Tenaga Kerja				
2	01	01	Dinas Tenaga Kerja	10	59	16.909.341.000	
2	03		Pangan				
2	03	01	Dinas Ketahanan Pangan	6	55	12.481.550.000	
2	05		Lingkungan Hidup				
2	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	11	94	9.855.432.000	
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2	06	01	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	41	7.790.961.000	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	55	6.806.472.000	148.777.355.000
2	09		Perhubungan				
2	09	01	Dinas Perhubungan	11	58	15.079.267.000	
2	10		Komunikasi dan Informatika				
2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	58	16.004.653.000	
2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2	11	01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9	48	9.510.281.850	60.000.000
2	12		Penanaman Modal				
2	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	43	3.014.644.000	
2	17		Perpustakaan dan Kearsipan				
2	17	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	42	4.655.284.259	
3			URUSAN PILIHAN				
3	01		Kelautan dan Perikanan				
3	01	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	15	52	85.869.777.000	
2	13		Pariwisata				
2	13	01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15	72	35.673.843.000	12.875.000.000

No			Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan	Usulan Anggaran BTL (Hibah, Bansos, Bankeu, Belanja Bagi Hasil)
				Program	Kegiatan		
3	03		Pertanian				
3	03	01	Dinas Pertanian	15	73	51.912.489.730	100.057.100.000
3	06		Perdagangan dan Perindustrian				
3	06	01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14	80	77.257.577.000	
4			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	01		Perencanaan				
4	01	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16	85	9.516.803.000	
4	03		Keuangan				
4	03	01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	82	11.455.961.500	6.439.500.000
4	02		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
4	02	01	Badan Kepegawaian dan Diklat	8	59	17.949.644.595	
4	06		Sekretariat DPRD				
4	07	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	49	23.236.986.850	
			Sekretariat Daerah				
4	06	01	Sekretariat Daerah	10	125	28.062.035.000	8.650.000.000
4	05		Inspektorat				
4	05	01	Inspektorat	9	67	8.278.563.500	
4	08		Kecamatan				
4	08	01	Kecamatan Pati	14	38	700.346.000	
			Kelurahan Pati Kidul	9	45	263.000.000	
			Kelurahan Pati Lor	5	23	316.790.000	
			Kelurahan Pati Wetan	5	26	234.100.000	
			Kelurahan Parenggan	5	23	233.900.000	
			Kelurahan Kalidoro	4	23	295.119.000	
4	08	02	Kecamatan Margorejo	12	33	485.492.000	
4	08	03	Kecamatan Tlogowungu	13	36	428.400.150	
4	08	04	Kecamatan Gembong	10	31	483.719.000	
4	08	05	Kecamatan Tayu	10	31	423.375.000	
4	08	06	Kecamatan Margoyoso	11	35	512.763.720	
4	08	07	Kecamatan Gunungwungkal				
4	08	08	Kecamatan Cluwak	12	34	476.485.000	
4	08	09	Kecamatan Dukuhseti	11	36	612.846.000	
4	08	10	Kecamatan Kayen	11	39	539.716.000	
4	08	11	Kecamatan Gabus	12	35	509.264.000	
4	08	12	Kecamatan Tambakromo	11	32	498.635.000	
4	08	13	Kecamatan Sukolilo	10	36	575.259.000	
4	08	14	Kecamatan Juwana	11	34	545.722.000	
4	08	15	Kecamatan Trangkil	11	33	550.743.000	
4	08	16	Kecamatan Wedarijaksa	10	31	517.262.000	
4	08	17	Kecamatan Batangan	12	32	404.603.000	
4	08	18	Kecamatan Jakenan	11	39	583.500.000	
4	08	19	Kecamatan Jaken	12	41	742.422.000	
4	08	20	Kecamatan Winong	11	30	585.545.000	
4	08	21	Kecamatan Pucakwangi	12	31	715.634.850	
			JUMLAH	603	2.783	1.415.684.022.004	1.249.607.621.000

Tabel 5.3
Rekapitulasi Usulan Rencana Program kegiatan, Pagu Indikatif
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 per OPD
yang dibiayai dari APBD Provinsi (Usulan Bantuan Keuangan)

No	Organisasi Perangkat Daerah			Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan
				Program	Kegiatan	
1			URUSAN WAJIB			
1	01		Pendidikan			
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	35	76.641.034.000
1	02		Kesehatan			
1	02	01	Dinas Kesehatan	-	-	0
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo"	1	1	52.895.000.000
1	02	03	Rumah Sakit Umum Daerah "Kayen"	1	1	20.000.000.000
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	8	246.850.000.000
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	15.000.000.000
1	05		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0
1	05	02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	0
1	05	03	BPBD	-	-	0
1	06		Sosial			
1	06	01	Dinas Sosial	-	-	0
2	01		Tenaga Kerja			
2	01	01	Dinas Tenaga Kerja	1	2	15.000.000
2	03		Pangan			
2	03	01	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	0
2	05		Lingkungan Hidup			
2	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	5	7	5.775.000.000
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	06	01	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	0
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	0
2	09		Perhubungan			
2	09	01	Dinas Perhubungan	1	3	5.009.900.000
2	10		Komunikasi dan Informatika			
2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0
2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	11	01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	-	0
2	12		Penanaman Modal			
2	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0
2	17		Perpustakaan dan Kearsipan			
2	17	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	0
3			URUSAN PILIHAN			
3	01		Kelautan dan Perikanan			
3	01	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	7	3.820.000.000
2	13		Pariwisata			
2	13	01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	0
3	03		Pertanian			
3	03	01	Dinas Pertanian	2	2	5.945.980.000

No	Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan	
			Program	Kegiatan		
3	06		Perdagangan dan Perindustrian			
3	06	01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	0
4			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		Perencanaan			
4	01	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	5	340.000.000
4	03		Keuangan			
4	03	01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	0
4	02		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
4	02	01	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	-	0
4	06		Sekretariat DPRD			
4	07	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0
			Sekretariat Daerah			
4	06	01	Sekretariat Daerah	-	-	0
4	05		Inspektorat			
4	05	01	Inspektorat	-	-	0
4	08		Kecamatan			
4	08	01	Kecamatan Pati	-	-	0
			Kelurahan Pati Kidul	-	-	0
			Kelurahan Pati Lor	-	-	0
			Kelurahan Pati Wetan	-	-	0
			Kelurahan Parenggan	-	-	0
			Kelurahan Kalidoro	-	-	0
4	08	02	Kecamatan Margorejo	-	-	0
4	08	03	Kecamatan Tlogowungu	-	-	0
4	08	04	Kecamatan Gembong	-	-	0
4	08	05	Kecamatan Tayu	-	-	0
4	08	06	Kecamatan Margoyoso	-	-	0
4	08	07	Kecamatan Gunungwungkal	-	-	0
4	08	08	Kecamatan Cluwak	-	-	0
4	08	09	Kecamatan Dukuhseti	-	-	0
4	08	10	Kecamatan Kayen	-	-	0
4	08	11	Kecamatan Gabus	-	-	0
4	08	12	Kecamatan Tambakromo	-	-	0
4	08	13	Kecamatan Sukolilo	-	-	0
4	08	14	Kecamatan Juwana	-	-	0
4	08	15	Kecamatan Trangkil	-	-	0
4	08	16	Kecamatan Wedarijaksa	-	-	0
4	08	17	Kecamatan Batangan	-	-	0
4	08	18	Kecamatan Jakenan	-	-	0
4	08	19	Kecamatan Jaken	-	-	0
4	08	20	Kecamatan Winong	-	-	0
4	08	21	Kecamatan Pucakwangi	-	-	0
			JUMLAH	41	72	432.291.914.000

Tabel 5.4
Rekapitulasi Usulan Rencana Program kegiatan, Pagu Indikatif
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 per OPD
yang dibiayai dari APBN (Usulan DAK)

No	Organisasi Perangkat Daerah			Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan
				Program	Kegiatan	
1			URUSAN WAJIB			
1	01		Pendidikan			
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	6	44.456.670.000
1	02		Kesehatan			
1	02	01	Dinas Kesehatan	3	3	17.763.280.000
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo"	1	2	52.895.000.000
1	02	03	Rumah Sakit Umum Daerah "Kayen"	1	3	7.729.000.000
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	9	718.690.000.000
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	30.000.000.000
1	05		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0
1	05	02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	0
1	05	03	BPBD	-	-	0
1	06		Sosial			
1	06	01	Dinas Sosial	-	-	0
2	01		Tenaga Kerja			
2	01	01	Dinas Tenaga Kerja	1	2	2.475.700.000
2	03		Pangan			
2	03	01	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	0
2	05		Lingkungan Hidup			
2	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	3	8	3.588.800.000
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	06	01	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	0
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	0
2	09		Perhubungan			
2	09	01	Dinas Perhubungan	3	5	7.212.500.000
2	10		Komunikasi dan Informatika			
2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0
2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	11	01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	-	0
2	12		Penanaman Modal			
2	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0
2	17		Perpustakaan dan Kearsipan			
2	17	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	0
3			URUSAN PILIHAN			
3	01		Kelautan dan Perikanan			
3	01	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	6	81.050.000.000
2	13		Pariwisata			
2	13	01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	0
3	03		Pertanian			
3	03	01	Dinas Pertanian	2	2	42.342.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah usulan		Usulan Anggaran Program dan Kegiatan	
			Program	Kegiatan		
3	06		Perdagangan dan Perindustrian			
3	06	01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	0
4			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		Perencanaan			
4	01	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0
4	03		Keuangan			
4	03	01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	0
4	02		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
4	02	01	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	-	0
4	06		Sekretariat DPRD			
4	07	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0
			Sekretariat Daerah			
4	06	01	Sekretariat Daerah	-	-	0
4	05		Inspektorat			
4	05	01	Inspektorat	-	-	0
4	08		Kecamatan			
4	08	01	Kecamatan Pati	-	-	0
			Kelurahan Pati Kidul	-	-	0
			Kelurahan Pati Lor	-	-	0
			Kelurahan Pati Wetan	-	-	0
			Kelurahan Parenggan	-	-	0
			Kelurahan Kalidoro	-	-	0
4	08	02	Kecamatan Margorejo	-	-	0
4	08	03	Kecamatan Tlogowungu	-	-	0
4	08	04	Kecamatan Gembong	-	-	0
4	08	05	Kecamatan Tayu	-	-	0
4	08	06	Kecamatan Margoyoso	-	-	0
4	08	07	Kecamatan Gunungwungkal	-	-	0
4	08	08	Kecamatan Cluwak	-	-	0
4	08	09	Kecamatan Dukuhseti	-	-	0
4	08	10	Kecamatan Kayen	-	-	0
4	08	11	Kecamatan Gabus	-	-	0
4	08	12	Kecamatan Tambakromo	-	-	0
4	08	13	Kecamatan Sukolilo	-	-	0
4	08	14	Kecamatan Juwana	-	-	0
4	08	15	Kecamatan Trangkil	-	-	0
4	08	16	Kecamatan Wedarijaksa	-	-	0
4	08	17	Kecamatan Batangan	-	-	0
4	08	18	Kecamatan Jakenan	-	-	0
4	08	19	Kecamatan Jaken	-	-	0
4	08	20	Kecamatan Winong	-	-	0
4	08	21	Kecamatan Pucakwangi	-	-	0
			JUMLAH	29	47	1.008.202.950.000

Penjabaran Program dan Kegiatan dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah dapat dilihat pada matrik terlampir.

BAB VI **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2018 merupakan penjabaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJP 2005-2025. Oleh karena itu pelaksanaan RKPD tahun 2018 dengan program dan kegiatannya diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta target capaian kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan pemantapan terhadap target kinerja pembangunan daerah yang telah tercapai pada tahun perencanaan sebelumnya.

RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pati Tahun 2018, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBD, serta menjadi landasan operasional masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2018.

Selain itu RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 ini juga akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Pati guna bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan publik yang semakin baik. Oleh karena itu keseriusan dan dukungan dari semua pelaku pembangunan di Kabupaten Pati sangat diperlukan.

Pada akhirnya dengan pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pati Tahun 2018 ini diharapkan bisa mendukung pencapaian visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik" serta terwujudnya "Pati Bumi Mina Tani Sejahtera" sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.

BUPATI PATI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H A R Y A N T O

SITI SUBIATI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

**DAFTAR ISI LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2017**

	Halaman
Perangkat Daerah	
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2. Dinas Kesehatan	14
3. RSUD Soewondo	23
4. RSUD Kayen	24
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	98
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	113
8. Satuan Polisi PP	120
9. BPBD	124
10. Dinas Sosial	130
11. Dinas Tenaga Kerja.....	146
12. Dinas Ketahanan Pangan	154
13. Dinas Lingkungan Hidup.....	162
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	183
16. Dinas Perhubungan.....	189
17. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	203
18. Dinas Kopersai dan UMKM.....	209
19. DPMPTSP.....	214
20. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	219
21. Dinas Arsip.....	234
22. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	239
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	256
24. Dinas Pertanian	265
25. Bappeda.....	274
26. BKPP.....	288

27.	BPKAD.....	294
28.	Inspektorat	302
29.	Sekretariat Daerah.....	315
30.	Sekretariat DPRD.....	327
31.	Kecamatan Pati	332
32.	Kecamatan Margorejo	350
33.	Kecamatan Gembong	353
34.	Kecamatan Juwana	356
35.	Kecamatan Batangan	361
36.	Kecamatan Wedarijaksa	365
37.	Kecamatan Trangkil	368
38.	Kecamatan Tayu	372
39.	Kecamatan Dukuhseti	375
40.	Kecamatan Cluwak	379
41.	Kecamatan Margoyoso	383
42.	Kecamatan Jakenan	390
43.	Kecamatan Jaken.....	393
44.	Kecamatan Pucakwangi	400
45.	Kecamatan Winong	404
46.	Kecamatan Kayen	410
47.	Kecamatan Tambakromo.....	414
48.	Kecamatan Sukolilo	417
49.	Kecamatan Tlogowungu	420
50.	Kecamatan Gabus	425
51.	Kecamatan Gunungwungkal.....	430

**DAFTAR ISI LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2017**

Perangkat Daerah	Halaman
1. RSUD Soewondo	1
2. RSUD Kayen	2
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	19
5. Dinas Tenaga Kerja	20
6. Dinas Lingkungan Hidup.....	21
7. Dinas Perhubungan	24
8. Dinas Kelautan dan Perikanan	26
9. Dinas Pertanian	29
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	30
11. Bappeda	31

**DAFTAR ISI LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2017**

Perangkat Daerah	Halaman
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2. Dinas Kesehatan	2
3. RSUD Soewondo	6
4. RSUD Kayen	7
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	31
7. Dinas Sosial	32
8. Dinas Tenaga Kerja.....	33
9. Dinas Lingkungan Hidup	34
10. Dinas Perhubungan.....	40
11. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.....	42
12. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	43
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	46
14. Dinas Pertanian	47

**DAFTAR ISI LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2017**

Perangkat Daerah	Halaman
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	98
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	99
5. Dinas Sosial	100
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	103
7. Dinas Koperasi dan MKM	104
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	105
9. Dinas Pertanian	107
10. Sekretariat Daerah	115